



**2020**

# Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah



Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta

## Sambutan



Laporan Kinerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 disampaikan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Substansi yang ada dalam LKIP ini memuat informasi yang berkaitan dengan capaian kinerja selama kurun waktu tahun anggaran 2020 dan menyajikan informasi capaian kinerja, proses pelaksanaan dan tantangan yang dihadapi. Seluruh informasi tersebut tersaji dalam deskripsi yang tertuang dalam analisis capaian kinerja.

Kami berharap LKIP ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang obyektif dalam menilai kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus sebagai masukan dalam upaya peningkatan kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta di masa mendatang.

Yogyakarta, Januari 2021

Kepala



Dr. Ukik Kusuma Kurniawan, SKM., MPS., MA



# LKIP

**(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)**

**Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta**

**Tahun Anggaran 2020**

# DAFTAR ISI

<i>Sambutan</i> .....	<i>i</i>
<i>Executive Summary</i> .....	<i>iv</i>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. <i>LATAR BELAKANG</i> .....	1
B. <i>TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI</i> .....	1
C. <i>MANDAT DAN PERAN STRATEGIS</i> .....	3
D. <i>PROGRAM REFORMASI BIROKRASI</i> .....	4
E. <i>PERMASALAHAN, TANTANGAN DAN PELUANG</i> .....	4
F. <i>ISU STRATEGIS</i> .....	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>7</b>
A. <i>Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024</i> .....	7
B. <i>Program Prioritas dan Rencana Kerja Tahunan pada tahun 2020</i> .....	16
C. <i>Program Prioritas dan Rencana Kerja Tahun 2021</i> .....	18
D. <i>Perjanjian Kinerja</i> .....	19
E. <i>Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Program</i> .....	22
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>25</b>
A. <i>CAPAIAN KINERJA BKKBN</i> .....	25
B. <i>REALISASI ANGGARAN</i> .....	40
C. <i>CAPAIAN KINERJA LAINNYA</i> .....	43
D. <i>EVALUASI KINERJA</i> .....	48
E. <i>PERBAIKAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2021</i> .....	52
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>56</b>

## DAFTAR TABEL

<i>Tabel 0.1 Trend pencapaian indikator kinerja 2018-2020</i> .....	vi
<i>Tabel 2.1 Program Prioritas Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2020</i> .....	16
<i>Tabel 2.2 Program Prioritas Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2021</i> .....	18
<i>Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2020</i> .....	20
<i>Tabel 3.1 Kategorisasi Indeks Capaian</i> .....	25
<i>Tabel 3.2 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020</i> .....	26
<i>Tabel 3.3 Capaian Kinerja Renstra Tahun 2020</i> .....	27
<i>Tabel 3.4 Perbandingan Tahun 2020 dengan Dua Tahun Sebelumnya</i> .....	28
<i>Tabel 3.5 Perbandingan Tahun 2020 dengan Jangka Menengah 2024</i> .....	29
<i>Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2020</i> .....	38
<i>Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Perwakilan BKKBN DIY TA. 2020</i> .....	41
<i>Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Perwakilan BKKBN DIY TA. 2020 per program</i> .....	41
<i>Tabel 3.9 Hasil Penilaian Internal ZI menuju WBK Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2019/2020</i> .....	50
<i>Tabel 3.10 Hasil Penilaian SAKIP Perwakilan BKKBN DIY</i> .....	51

## DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1.1 Struktur Organisasi Perwakilan BKKBN DIY</i> .....	3
<i>Gambar 3.1 Grafik Perkembangan TFR</i> .....	34
<i>Gambar 3.2 Grafik Perkembangan mCPR</i> .....	35
<i>Gambar 3.3 Grafik Perkembangan Unmet Need</i> .....	35

# Executive Summary

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta bertindak sebagai unit pelaksana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di daerah yang melaksanakan kebijakan dan program yang telah ditetapkan BKKBN Pusat, sehingga visi dan misi mengacu pada penetapan BKKBN Pusat. Perjanjian Kinerja yang diamanahkan kepada Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta berisi sasaran strategis dan sasaran program dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024.

Renstra tersebut memuat Visi BKKBN yaitu **“terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”**, dengan misi :

- a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang
- b. Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif
- c. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup
- d. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global
- e. Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi
- f. Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, ditetapkan 6 sasaran strategis, yaitu :

- a. Menurunnya Angka Kelahiran Total (*TFR*)
- b. Meningkatnya Prevalensi Kontrasepsi (*CPR*) modern
- c. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)
- d. Menurunnya Angka Kelahiran remaja
- e. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
- f. Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 ini terdapat 10 (sepuluh) indikator, diantaranya terdapat indikator Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) sebanyak 4 (empat) indikator. Dari 10 (sepuluh) indikator pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 3 (tiga) diantaranya mampu dicapai dengan capaian lebih dari 100%, sedangkan 6 (enam) indikator lainnya mampu dicapai dengan persentase capaian dikisaran 82,35% s.d. 100%.

Namun, pada indikator presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet Need*) capaiannya masih pada indikator merah, yang artinya belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan hanya tercapai sebesar 42,51%. Untuk sasaran Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) persentase capaian berada di kisaran 82,66% s.d. 100%.

Trend pencapaian indikator kinerja jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya disajikan dalam tabel berikut :

*Tabel 0.1 Trend pencapaian indikator kinerja 2018-2020*

NO	INDIKATOR KINERJA	2018			2019			2020		
		TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,05	2,24	90,73%	2,18	1,80	117,43%	1,92	1,81	105,73%
2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	54,16	53,9	99,52%	61,95	53,79	86,83%	62,01	57,10	92,08%
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,70	9,9	71,43%	8,23	10,01	71,43%	5,74	9,04	42,51%

Anggaran yang diterima oleh Perwakilan BKKBN DIY pada tahun 2020 telah berhasil terserap sebesar 89,92%. Dari pagu anggaran sebesar Rp. 57.365.599.000,-, jumlah yang berhasil direalisasikan adalah sebesar Rp. 51.584.849.642,-

Sedangkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021 sebagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja dan memenuhi target jangka menengah Renstra adalah sebagai berikut :

1. Melakukan revitalisasi KIE dan penggerakan Program kepada masyarakat dengan dukungan komitmen dan kebijakan dalam mempertimbangkan skema kegiatan yang berbasis Tehnologi Informasi dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB yang tepat sasaran;
2. Melakukan pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB;
3. Menajamkan segmentasi sasaran kegiatan program Bangga Kencana dan difokuskan pada wilayah wilayah dengan pencapaian *mCPR* rendah dan *Unmet Need* yang tinggi, melalui KIE dan pelayanan KB di daerah legok termasuk di desa wilayah Kampung KB;
4. Mengintensifkan pelayanan KB Bergerak di wilayah DTPK melalui Baksos pelayanan KB MKJP yang terintergrasi dengan pelayanan papsmear.
5. Mengintensifkan pembinaan program Bangga Kencana baik untuk wilayah Kampung KB maupun wilayah di luar Kampung KB untuk mendorong capaian Program Bangga Kencana dengan mengintensifkan pemanfaatan berbagai media dalam menyebarluaskan program Bangga Kencana di wilayah DIY.
6. Pelibatan generasi milenial menjadi penting di setiap kegiatan yang ada di kelompok kegiatan, oleh karena mobilitasnya yang tinggi dan maju dalam hal Tehnologi Informasi.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perwakilan BKKBN DIY berkewajiban untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai misi dan tujuan organisasi.

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, BKKBN berkontribusi langsung terhadap 2 (dua) dari 7 (tujuh) agenda pembangunan/Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV 2020 – 2024, yaitu untuk “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing” dan mendukung “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”. Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta bertindak sebagai unit pelaksana BKKBN di daerah yang melaksanakan kebijakan dan program yang telah ditetapkan BKKBN Pusat untuk mendukung agenda prioritas tersebut.

### **B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

#### **TUGAS DAN FUNGSI**

Sesuai dengan Perka BKKBN Nomor 82 Tahun 2011 (pasal 2), Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di Daerah Istimewa Yogyakarta.

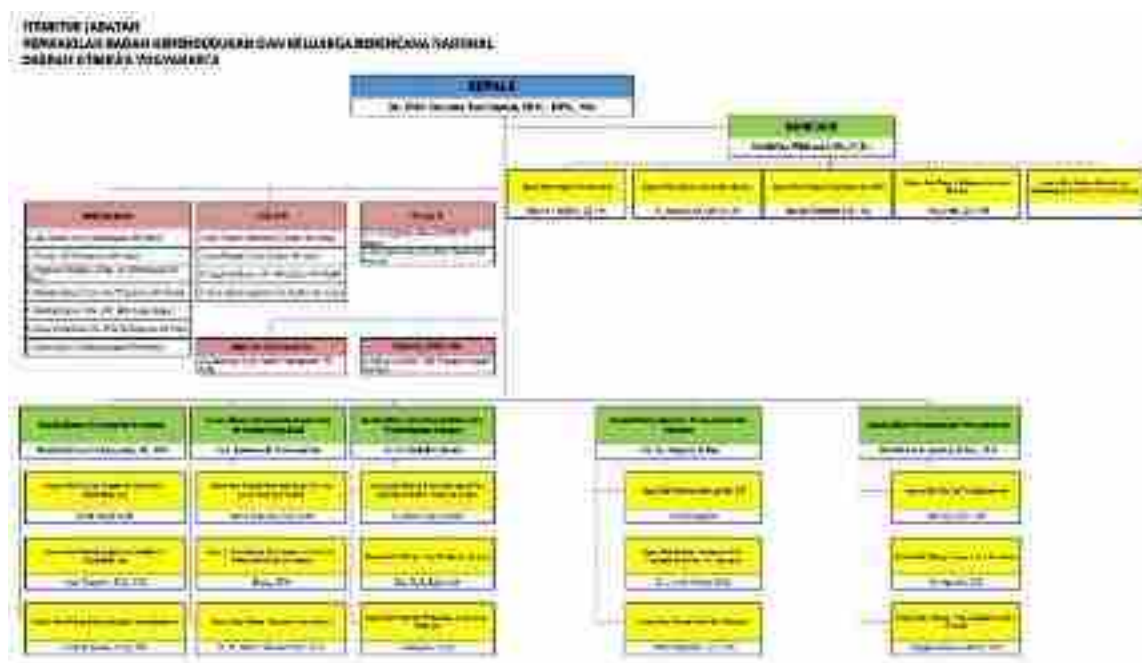
Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional dibidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- b. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- d. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi, penggerakan hubungan antar lembaga, bina lini lapangan serta pengelolaan data dan informasi di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- e. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- f. Pelaksanaan tugas administrasi umum;
- g. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- h. Pembinaan dan fasilitasi terbentuknya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

## **STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN No. 82 Tahun 2011, Struktur Organisasi Perwakilan BKKBN DIY termasuk dalam tipologi Perwakilan BKKBN Provinsi tipe A yang dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan dan membawahi 1 (satu) Sekretariat dan 5 (lima) bidang serta rumpun jabatan fungsional tertentu. Adapun struktur organisasi Perwakilan BKKBN digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Perwakilan BKKBN DIY



### C. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

Sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 BKKBN diberi mandat untuk berkontribusi langsung terhadap 2 (dua) dari 7 (tujuh) agenda pembangunan/Prioritas Nasional (PN). Dalam Prioritas Nasional “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing” BKKBN berperan dalam Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, serta Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan.

Sedangkan pada Prioritas Nasional “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan” BKKBN memiliki peran pada Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter. Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unit pelaksana BKKBN di daerah diberi mandat untuk melaksanakan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang terkait dengan Prioritas Nasional tersebut yang ada di Daerah istimewa Yogyakarta.

## D. PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

Reformasi Birokrasi merupakan upaya dalam rangka memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan bersih dan baik sebagai prasyarat utama pembangunan nasional. Road Map RB-BKKBN terbagi dalam 3 (tiga) periode yaitu Periode 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Dalam Road Map RB BKKBN 2020 – 2024 terdapat 3 (tiga) Sasaran, yaitu Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang kapabel serta Pelayanan publik yang prima.

## E. PERMASALAHAN, TANTANGAN DAN PELUANG

### 1) PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain sebagai berikut :

- a) Masih tingginya angka kebutuhan ber KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum terpenuhi (*unmetneed*). Berdasarkan data SKAP *unmetneed* DIY dari tahun 2017 mengalami kenaikan. Bahkan di tahun 2020 terjadi kenaikan yang cukup tinggi dengan angka *unmetneed* sebesar 14,5.
- b) Rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya dispensasi pernikahan usia anak yang diberikan di DIY akibat kehamilan yang tidak diinginkan dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Fenomena pernikahan usia anak ini merupakan fenomena yang mengerikan karena akan berdampak panjang bagi keluarga baru yang terbentuk, baik dari segi kesehatan fisik maupun mental.
- c) Pandemi Covid-19 yang melanda diawal tahun 2020 ini menjadikan permasalahan yang berdampak pada akses pelayanan KB untuk masyarakat. Salah satu contoh tidak bisa mengadakan bhakti sosial pelayanan KB yang bersifat masal sehingga pelayanan KB tidak bisa terlaksana sepenuhnya.

## 2) TANTANGAN

Tantangan yang dihadapi Perwakilan BKKBN DIY dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana di DIY antara lain :

- a) Penyesuaian kegiatan sesuai protokol kesehatan akibat pandemi COVID-19. Sebagai upaya mematuhi instruksi Gubernur DIY tentang “Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi COVID-19” dan “Penegakan Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19 pada saat Libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021”, kegiatan yang berjalan pada tahun 2020 dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan. Kegiatan ini antara lain; layanan Keluarga Berencana, konseling KB, pemasangan alat kontrasepsi, penyuluhan, pembinaan, pelatihan, penelitian, dan sebagainya.
- b) Refocusing anggaran sebesar Rp 7 Milyar untuk penanganan dan pencegahan COVID-19 dan penyesuaian anggaran untuk penyediaan perlengkapan pendukung protokol kesehatan (Alat Pelindung Diri, hand sanitizer, desinfektan, sabun tangan, dsb) yang biayanya tidak teranggarkan di awal tahun.
- c) Pelayanan KB pada masa pandemi COVID-19, yang semula direncanakan secara massal dan gratis untuk masyarakat, kuantitasnya jadi berkurang. Dukungan anggaran untuk melayani pemberian alat dan obat kontrasepsi lebih mahal daripada pelayanan sebelum pandemi karena BKKBN harus menambah penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kesehatan yang melayani kontrasepsi.

## 3) PELUANG

Peluang yang dimiliki Perwakilan BKKBN DIY dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana di DIY antara lain :

- a) Adanya Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga menjadi landasan komitmen sinergi dalam mewujudkan ketahanan keluarga di DIY.
- b) Ketersediaan Penyuluh KB, kelompok kegiatan dan tenaga lini lapangan yang mampu bertugas kolaboratif dengan melakukan adaptasi sesuai protokol kesehatan.

- c) Etos kerja pegawai serta ketersediaan fasilitas pendukung dalam adaptasi bekerja di masa pandemi Covid-19. Fasilitas ini antara lain; perangkat daring dan Learning Management System berbasis Teknologi Informasi untuk pelatihan daring.
- d) Adanya dukungan mitra kerja dan komitmen lintas sektor (pemerintah daerah, swasta, lembaga non pemerintah, masyarakat) dalam mensukseskan Program Bangga Kencana.

## F. ISU STRATEGIS

Beberapa isu strategis dan permasalahan pengendalian kuantitas penduduk yang harus mendapat perhatian khusus adalah :

### a. Kesertaan ber KB

- 1) Kesertaan ber KB dengan cara modern masih rendah (57,1%), hal ini karena adanya peningkatan metode KB tradisional dari 10,3% menjadi 18,6% (laporan SDKI 2017)
- 2) Angka Putus Pakai masih tinggi yaitu sebesar 28,4% (laporan SDKI 2017) Hal ini menunjukkan bahwa capaian peserta KB baru (PB) tidak berdampak terhadap penambahan Peserta KB aktif (PA) modern.
- 3) Prevalensi KB MKJP mengalami penurunan sebesar 2,5% dan saat ini menjadi 18,6%, terutama penurunan pemakaian KB IUD/AKDR/Spiral (laporan SDKI 2017)

### b. Masih rendahnya indeks pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi yaitu 64,4% (Laporan SKAP 2018).

### c. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)

- 1) Pesan Kunci Advokasi dan KIE perlu penajaman, terdapat Kesenjangan Mendapatkan Informasi
- 2) Peran mitra kerja dalam operasional program Bangga Kencana perlu ditingkatkan
- 3) Dukungan tenaga penggerak lini lapangan perlu ditingkatkan
- 4) Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Keluarga perlu dioptimalkan

## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta bertindak sebagai unit pelaksana kebijakan dan program yang telah ditetapkan BKKBN Pusat, sehingga visi dan misi mengacu pada penetapan BKKBN Pusat.

### **A. Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024**

Penyusunan Rencana Strategis BKKBN merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta Tahun 2020 – 2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Renstra Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta berisi tentang sasaran, strategi, kebijakan program serta kegiatan-kegiatan dalam penguatan pembangunan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sesuai dengan tugas dan fungsi BKKBN sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

#### **A.1. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator**

Visi BKKBN adalah **“terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong.”** Visi BKKBN mengandung pengertian :

- a. Keluarga berkualitas, yaitu tentram, mandiri dan bahagia. Untuk mencapai keluarga berkualitas angka kelahiran total (TFR) diturunkan menjadi 2,26 pada tahun 2020 sampai dengan 2,1 pada tahun 2024.
- b. Kebijakan pengendalian penduduk dilaksanakan untuk mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan menghasilkan Bonus Demografi. Pengendalian penduduk berkontribusi pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.



- c. Pengaturan kelahiran melalui berbagai kegiatan prioritas Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB KR) yang komprehensif dan pendewasaan usia perkawinan (PUP) yang merupakan salah satu upaya pokok dalam menurunkan TFR. Bidang KB KR meningkatkan kesehatan ibu dan anak guna membangun manusia berkualitas dan berdaya saing.
- d. Pembangunan keluarga yang holistic integratif sesuai siklus hidup sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas keluarga yang berketahanan dan berkarakter.

BKKBN mempunyai misi untuk mewujudkan visi tersebut, yaitu :

- a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang
- b. Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif
- c. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup
- d. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global
- e. Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi
- f. Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur

Tujuan BKKBN dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 yaitu :

- a. Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia
- b. Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

Sasaran strategis tahun 2020-2024 Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)
2. Meningkatkan angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR)



3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmetneed*)
4. Menurunnya Angka Kelahiran remaja
5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
6. Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)

Sasaran Program Tahun 2020-2024 Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :

1. Terwujudnya sinergitas kebijakan dan kelembagaan pengendalian penduduk
2. Meningkatnya kesertaan keluarga dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
3. Tercapainya sasaran program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana melalui peningkatan peran serta masyarakat, penggerakan, penguatan jejaring kemitraan dan pengelolaan sistem informasi yang berkualitas
4. Meningkatnya presentase PKB/PLKB yang lulus diklat dengan kategori sangat baik
5. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai Proyek Prioritas Nasional (PRO PN) sebagai berikut :

1. Tersedianya alokasi di Fasilitas Kesehatan
  - Pemenuhan ketersediaan alokasi di faskes
2. Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Baduta tentang 1000 HPK
  - Keluarga yang memiliki baduta terpapar 1000 HPK
3. Meningkatnya pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia
  - Bina keluarga lansia yang melaksanakan 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang

4. Meningkatnya pengetahuan remaja putri sebagai calon ibu tentang edukasi Kespro dan gizi melalui peran pusat informasi konseling (PIK) remaja dan bina ketahanan remaja (BKR)
  - Penguatan peran PIK remaja dan BKR dalam edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai sasaran kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga
  - Sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
  - Kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan
  - Pembinaan pembangunan keluarga di seluruh tingkatan wilayah
  - Penggerakan stakeholder mitra kerja serta perubahan sikap dan perilaku masyarakat berdasarkan data dan informasi yang berbasis IT dalam program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga
  - Layanan dukungan manajemen eselon I
  - Layanan sarana dan prasarana internal
  - Layanan perkantoran
  - Layanan audit internal
  - Layanan pendidikan dan pelatihan
  - Layanan penelitian dan pengembangan

## 2. Proyek Prioritas Nasional

- Pemenuhan ketersediaan alokon di Faskes
- Keluarga yang memiliki Baduta terpapar 1000 HPK
- Peningkatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia
- Penguatan peran PIK remaja dan BKR dalam edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai indikator sasaran program sebagai berikut :

### Bidang KSPK Perwakilan BKKBN DIY

- Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter
- Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan GenRe
- Jumlah Kelompok BKL Yang Melaksanakan 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia
- Jumlah Keluarga yang mengakses PPKS
- Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga

### Bidang DALDUK Perwakilan BKKBN DIY

- Persentase Pemerintah Daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah
- Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB
- Persentase Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/Kota yang efektif
- Cakupan implementasi pendidikan kependudukan di provinsi
- Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk

- Persentase Kampung KB yang melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan

#### Bidang KBKR Perwakilan BKKBN DIY

- Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP
- Indeks Informasi Metode KB (*Method Information Index/MII*)
- Persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota dengan kesertaan rendah
- Persentase Kehamilan Yang Tidak Diinginkan
- Persentase Pelayanan KB Pascapersalinan

#### Bidang ADPIN Perwakilan BKKBN DIY

- Persentase *stakeholders*/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program Bangga Kencana
- Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana
- Persentase Penyuluh KB yang berkinerja baik
- Jumlah pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)
- Persentase cakupan perangkat dan jaringan sistem Teknologi dan Informasi di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota

#### Bidang Lalitbang Perwakilan BKKBN DIY

- Persentase peserta Diklat yang lulus dengan kategori baik dan sangat baik
- Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang digunakan sebagai input rumusan Kebijakan Program Bangga Kencana di Provinsi

#### Indikator Sasaran program DKM :

- Tingkat kepuasan layanan dukungan manajemen program bangga kencana
- Jumlah unit kerja berpredikat wilayah bebas dari korupsi
- Jumlah unit kerja berpredikat wilayah birokrasi bersih dan melayani

## A.2. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta mengacu pada arah kebijakan BKKBN yang tertuang dalam Renstra BKKBN 2020-2024. Lima arah kebijakan dan strategi Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga melalui strategi:
  - Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga.
  - Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga.
  - Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
  - Peningkatan kemandirian ekonomi bagi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP khususnya MOP dan MOW, serta peserta KB mandiri di wilayah Kampung KB.
  - Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan.
  - Penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia
  - Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.
- b. Memperkuat pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk melalui strategi:
  - Pengembangan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK).
  - Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk.
  - Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan.
  - Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan.

- c. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran melalui strategi:
- Penguatan kapasitas fakses dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR.
  - Penguatan kemitraan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan KBKR.
  - Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR di wilayah dan sasaran khusus.
  - Peningkatan KB pria.
  - Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD), dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP).
  - Peningkatan kemandirian PUS dalam ber-KB.
- d. Meningkatkan advokasi dan penggerakan Program Bangga Kencana sesuai karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
- Peningkatan penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah.
  - Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub-PPKBD.
- e. Memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi, dengan strategi:
- Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi Program Bangga Kencana berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan wilayah.
  - Pengembangan *smart technology/smart program* untuk memperkuat pengelolaan Program Bangga Kencana.

Agar operasionalisasi Program Bangga Kencana dapat berjalan dengan baik, perlu mendapatkan dukungan dari :

- a. Aspek Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Program Bangga Kencana Bidang Pelatihan dan Pengembangan bertugas untuk meningkatkan kualitas SDM, memanfaatkan hasil penelitian, dan pengembangan inovasi, yang dapat diwujudkan melalui strategi:

- Peningkatan kualitas SDM Program Bangga Kencana melalui pendidikan dan pelatihan yang terstandarisasi berbasis teknologi informasi.
- Peningkatan kualitas, pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan inovasi Program Bangga Kencana sebagai input/masukan bagi rumusan kebijakan.

b. Aspek Dukungan Manajemen

Sekretariat memberikan dukungan manajemen terhadap Program Bangga Kencana melalui strategi:

- Sosialisasi landasan hukum kependudukan dan KB, serta pengelolaan organisasi dan tatalaksana.
- Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan BMN.
- Penguatan perencanaan program dan anggaran.
- Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM aparatur.
- Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan yang berkualitas.

c. Aspek Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan Program Bangga Kencana guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui strategi:

- Pembinaan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundangan, ekonomis, efektif, dan efisien.
- Pembinaan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) secara efektif dan efisien di Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Monitoring terhadap kebijakan Kepala BKKBN dan Kepala Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta agar dilaksanakan secara konsisten.
- Pemantauan pencapaian sasaran strategis Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta secara efektif dan efisien.

## B. Program Prioritas dan Rencana Kerja Tahunan pada tahun 2020

Program prioritas Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Program Prioritas Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta Tahun 2020

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2020
22	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, kependudukan , dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi	
	Bidang KSPK Perwakilan BKKBN Provinsi	
1	Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	43.856 Keluarga
2	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan GenRe	279 PIK R
		139 BKR
3	Jumlah Kelompok BKL Yang Melaksanakan 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia	143 BKL
4	Jumlah Keluarga yang mengakses PPKS	894 Keluarga
5	Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga	60 %
	Bidang Dalduk Perwakilan BKKBN Provinsi	
1	Persentase Pemerintah Daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah	1 Prov & 5 Kab/Kota
2	Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB	48 RDK
3	Persentase Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/Kota yang efektif	1 Prov & 1 Kab/Kota
4	Cakupan implementasi pendidikan kependudukan di provinsi	3 Jalur
5	Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk	1 Prov & 1 Kab/Kota
6	Persentase Kampung KB yang melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan	155 Kampung KB
	Bidang KB-KR Perwakilan BKKBN Provinsi	
1	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	58,87 %
2	Indeks Informasi Metode KB (Method Information Index/MII)	71 Indeks (Skala 0-100)
3	Persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota dengan kesertaan rendah	56,85 %
4	Persentase Kehamilan Yang Tidak Diinginkan	24,1 %



<b>NO</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)</b>		<b>TARGET 2020</b>	
	5	Persentase Pelayanan KB Pascapersalinan	18,4	%
	Bidang ADPIN Perwakilan BKKBN Provinsi			
	1	Persentase stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program Bangga Kencana	35,6	Stakeholder/Mitra
	2	Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana	55	%
	3	Persentase Penyuluh KB yang berkinerja baik	65	%
	4	Jumlah pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	2	Kab/Kota
	5	Persentase cakupan perangkat dan jaringan sistem Teknologi dan Informasi di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota	100	%
	Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi			
	1	peserta Diklat yang lulus dengan kategori baik dan sangat baik	30	%
	2	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang digunakan sebagai input rumusan Kebijakan Program Bangga Kencana di Provinsi	1	Laporan
31	Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi			
	Sekretariat Perwakilan BKKBN Provinsi			
	1	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	12	Bulan
	Pengawasan Perwakilan BKKBN Provinsi			
	1	Indeks ZI WBK	75	Indeks

### C. Program Prioritas dan Rencana Kerja Tahun 2021

Program prioritas Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta Tahun 2021 sebagai berikut :

*Tabel 2.2 Program Prioritas Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta Tahun 2021*

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2021		
22	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, kependudukan , dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi			
	Bidang KSPK Perwakilan BKKBN Provinsi			
	1	Jumlah Pemerintah Daerah Kab/Kota yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam Bidang Pembangunan Keluarga	4	Kab/kota
	2	Jumlah Keluarga dengan Baduta yang mendapatkan fasilitasi pembinaan 1000 HPK	51.768	Keluarga
	3	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapatkan fasilitasi pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	422	PIK Remaja dan BKR
	4	Jumlah Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi pembinaan Pelayanan Ramah Lansia	143	Kelompok BKL
	5	Jumlah Kampung KB Percontohan yang mendapat fasilitasi pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	5	Kampung KB Percontohan
	Bidang Dalduk Perwakilan BKKBN Provinsi			
	1	Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	1	Kab/Kota
	2	Jumlah Rumah Data kependudukan paripurna di Kampung KB percontohan	1	Prov & 5 Kab/Kota
	Bidang KB-KR Perwakilan BKKBN Provinsi			
	1	Jumlah Faskes yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan	171	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pratama (FKTP)
	2	Jumlah Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan Alokasi	235	Faskes
	Bidang ADPIN Perwakilan BKKBN Provinsi			
	1	Jumlah Pemda yang mendapat fasilitasi pembinaan pergerakan mitra kerja dan pemangku kebijakan (stakeholders), KIE dalam perubahan sikap dan perilaku masyarakat, serta penyediaan data dan informasi dalam sistem informasi keluarga	1	Pemda Provinsi
	2	Jumlah Layanan Data hasil pelaksanaan pendataan keluarga yang tersedia	1	Layanan

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2021
	Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi	
1	Jumlah SDM (internal dan eksternal) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Program Bangga Kencana Tk. Provinsi dan Kab/Kota	154 Orang
2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan hasil penelitian dan pengembangan Program Bangga Kencana	1 Rekomendasi Kebijakan
31	Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi	
	Sekretariat Perwakilan BKKBN Provinsi	
1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker yang dilaksanakan	1 Layanan
2	Jumlah Layanan Perkantoran yang dilaksanakan	1 Layanan
3	Jumlah sarana internal yang diadakan	5 Unit
	Pengawasan Perwakilan BKKBN Provinsi	
1	Jumlah Laporan Pengawasan Internal	1 Laporan

#### D. Perjanjian Kinerja

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja akan digunakan pimpinan BKKBN untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, sebagai dasar melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan kinerja instansi pemerintah, dan menilai keberhasilan atau kegagalan organisasi, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Kepala BKKBN No 104/KEP/B1/2019 tentang Perjanjian Kinerja Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tahun 2020.

Perjanjian kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 memuat indikator sasaran strategis, indikator kinerja renstra, proyek prioritas nasional (Pro PN) dan indikator strategis di luar renstra yang terdiri dari indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN KINERJA	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
1	Menurunnya angka kelahiran total	1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	1,92
2	Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern	1	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR)	62,01
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi	1	Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (Unmet Need)	5,74
4	Menurunnya angka kelahiran remaja	1	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	17,00
5	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	61,43
6	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan	1	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) umur 25-49 tahun	23,00
7	Tersedianya Alokasi di Fasilitas Kesehatan	1	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Faskes	323
8	Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Baduta tentang 1000 HPK	1	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	51.768
9	Meningkatnya Pelayanan Ramah Lansia Melalui 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia	1	Bina keluarga lansia yang melaksanakan 7 dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang	143
10	Meningkatnya pengetahuan Remaja Putri sebagai calon ibu tentang edukasi Kespro dan Gizi melalui peran Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dan Bina Ketahanan Remaja (BKR)	1	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	418

NO	KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	
1	Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1	Sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	336.415.000
		2	Kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan	605.888.000
		3	Pembinaan Pembangunan keluarga di seluruh tingkatan wilayah	316.323.000
		4	Penggerakkan stakeholder mitra kerja serta perubahan sikap dan perilaku masyarakat berdasarkan data dan informasi yang berbasis IT dalam Program KKBPK	907.154.000
		5	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	984.178.000
		6	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	150.000.000
		7	Layanan Perkantoran	48.714.021.000
		8	Layanan Audit Internal	63.395.000
		9	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	194.250.000
		10	Layanan Penelitian dan Pengembangan	169.068.000
2	Proyek Prioritas Nasional	11	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Faskes	3.138.990.000
		12	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	350.000.000
		13	Peningkatan Pelayanan Ramah Lansia Melalui 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia	137.500.000
		14	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	1.298.417.000
		<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>57.365.599.000</b>

Perjanjian kinerja tahun 2020 dilakukan antara Kepala BKKBN dengan Kepala Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta, kemudian antara Kepala Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta dengan eselon III, Eselon III dengan Eselon IV, yang

terakhir antara Eselon IV dengan staf. Untuk jabatan fungsional tertentu juga melakukan perjanjian kinerja dengan atasan masing-masing.

Perjanjian kinerja Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta mengalami beberapa kali revisi. Revisi pertama dilakukan adanya penyesuaian anggaran setelah dilakukan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid dengan target tetap, sedangkan revisi perjanjian kinerja selanjutnya untuk penyesuaian target sehingga perjanjian kinerja yang digunakan merupakan perjanjian kinerja setelah revisi ke 2 dengan penyesuaian target.

### **E. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Program**

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan Program Bangga Kencana di Daerah Istimewa Yogyakarta, Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara rutin.

Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta melakukan monitoring dan evaluasi kinerja melalui :

#### **a. RADALGRAM (Rapat Pengendalian Program)**

Kegiatan Rapat Pengendalian Program dilaksanakan setiap bulan sekali dengan penyesuaian bentuk kegiatan karena pandemi covid-19. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program dilaksanakan dengan tatap muka dan virtual meeting serta dilakukan secara bergiliran ke kabupaten kota serta di kantor Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta. Peserta kegiatan Rapat Pengendalian Program adalah seluruh pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta, perwakilan dari OPD KB kabupaten kota dan juga perwakilan dari PKB/PLKB.

Pada kegiatan rapat pengendalian program dilaporkan hasil pelaksanaan kinerja, baik tentang capaian program maupun keuangan, setiap bulan sesuai dengan tata cara pencatatan dan pelaporan yang berlaku. Sistem pencatatan dan pelaporan yang digunakan dalam melaporkan capaian program adalah Sub Sistem Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan (Dalap) serta Pelayanan Kontrasepsi (Pelkon). Sedangkan untuk laporan keuangan menggunakan data dari F/II/Keu dan F/V/KB untuk persediaan alat kontrasepsi.

Melalui kegiatan rapat pengendalian program ini diketahui perkembangan capaian kinerja masing-masing kabupaten/kota sehingga dapat diketahui hambatan yang dialami di setiap wilayah untuk kemudian dapat menentukan upaya atau langkah yang harus dilakukan agar dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan.

b. RAKORDA (Rapat Koordinasi Daerah)

Rapat Koordinasi Daerah diadakan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja dan pelaksanaan program secara tahunan. Rapat ini melibatkan seluruh mitra kerja/stakeholder baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan adanya forum ini dapat mewujudkan penguatan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) terutama dalam penentuan sasaran program serta kegiatan-kegiatan prioritas yang berkelanjutan di seluruh tingkatan wilayah.

Selain itu juga dapat menjalin sinergitas komitmen, dukungan dan kerjasama antara BKKBN, pemerintah daerah dan mitra kerja di semua tingkatan wilayah sehingga manfaat program KKBPK dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di seluruh tingkatan wilayah.

c. Review / Telaah Program Bangga Kencana

Review / Telaah merupakan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan setiap semester. Forum ini melibatkan seluruh mitra kerja Perwakilan BKKBN DIY baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam pertemuan ini diketahui perkembangan capaian kinerja sampai dengan semester I dan juga faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat kinerja tersebut. Dalam forum ini selain evaluasi capaian Program juga untuk menggalang komitmen dari pelaksana Program KKBPK dan mitra kerja berkaitan dengan upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target kinerja/ capaian Program sampai dengan berakhirnya tahun anggaran.

#### d. Evaluasi Rencana Aksi Pencapaian Kinerja

Pada kegiatan Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta yang mendukung pencapaian indikator kinerja dan sasaran strategis program Bangga Kencana terdapat target kinerja bulanan yang disusun untuk mengontrol pencapaian target kinerja dalam satu tahun. Dengan penetapan target bulanan maka Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta dapat membuat strategi pelaksanaan program supaya apa yang menjadi target kinerja dapat tercapai. Monitoring bulanan perlu dilakukan supaya apabila terdapat permasalahan atau kendala di tengah jalan maka segera bisa dicarikan pemecahan masalahnya.

#### e. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program Bangga Kencana melalui e monev dan SMART

E – monev adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Bappenas. Aplikasi ini mempermudah pemantauan dan evaluasi serta melaporkan hasil capaian dari kegiatan Program Bangga Kencana yang telah dilakukan. Output/capaian diinput ke aplikasi ini sebulan sekali. Melalui aplikasi ini, Bappenas juga dapat ikut memantau pencapaian Program Bangga Kencana terutama kegiatan proyek Pro PN. Hal ini diperlukan agar Bappenas dapat mengikuti perkembangan pelaksanaan proyek Pro PN dan juga mengambil langkah-langkah apabila terjadi keterlambatan/kendala.

SMART adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Kemenkeu RI. Aplikasi ini mempermudah monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dalam capaian kinerja Program Bangga Kencana. Input data pada SMART dilakukan setiap bulan sekali. Variabel yang mempengaruhi Nilai SMART adalah penyerapan anggaran, konsistensi RPD awal dan akhir, capaian keluaran kegiatan, dan efisiensi anggaran. Capaian kinerja Program Bangga Kencana akan bernilai SMART baik jika beberapa variabel tersebut nilainya juga baik



## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. CAPAIAN KINERJA BKKBN**

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi / pencapaian dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Pada bab ini akan dibahas hambatan atau kendala dan upaya yang dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja 2020.

Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian. Penghitungan indeks capaian perlu memperhitungkan kategorisasi capaian. Ketentuan penetapan kategorisasi indeks capaian adalah sebagai berikut :

*Tabel 3.1 Kategorisasi Indeks Capaian*

No	Interval Capaian	Kategori Capaian	Kode Capaian
1	$> 100\%$	Baik Sekali	<b>BIRU</b>
2	$100\% \leq 87,5\%$	Baik	<b>HIJAU</b>
3	$87,5\% \leq 75\%$	Cukup	<b>KUNING</b>
4	$< 75\%$	Kurang	<b>MERAH</b>

#### **1) Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2020**

Dalam Perjanjian Kinerja terdapat 10 (sepuluh) sasaran target yang harus dicapai pada tahun 2020. Cara pengukuran kinerja tahun 2020 ini berdasarkan pada Definisi Operasional Perjanjian Kinerja Provinsi Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh BKKBN Pusat (terlampir). Adapun hasil pengukuran capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	CAPAIAN 2020	PERSENTASE CAPAIAN	SUMBER DATA
1	Menurunnya angka kelahiran total	1	Angka kelahiran total ( <i>Total Fertility Rate /TFR</i> ) per WUS usia 15-49 Tahun	1,92	1,81	105,73%	Puslitbang BKKBN
2	Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern	2	Angka prevalensi kontrasepsi modern ( <i>Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR</i> )	62,01	57,10	92,08%	Puslitbang BKKBN
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi	3	Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi ( <i>Unmet Need</i> )	5,74	9,04	42,51%	Statistik Rutin
4	Menurunnya angka kelahiran remaja	4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun ( <i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i> )	17,00	14,00	117,65%	Puslitbang BKKBN
5	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	5	Indeks Pembangunan Keluarga ( <i>iBangga</i> )	61,43	68,48	111,48%	Puslitbang BKKBN
6	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan	6	Median Usia Kawin Pertama Perempuan ( <i>MUKP</i> ) umur 25-49 tahun	23,00	22,00	95,65%	Puslitbang BKKBN
7	Tersedianya Alokasi di Fasilitas Kesehatan	7	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Faskes	323,00	267,00	82,66%	SMART
8	Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Baduta tentang 1000 HPK	8	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	51.768,00	51.768,00	100,00%	SMART
9	Meningkatnya Pelayanan Ramah Lansia Melalui 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia	9	Bina keluarga lansia yang melaksanakan 7 dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang	143,00	143,00	100,00%	SMART
10	Meningkatnya pengetahuan Remaja Putri sebagai calon ibu tentang edukasi Kespro dan Gizi melalui peran Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dan Bina Ketahanan Remaja (BKR)	10	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	418,00	418,00	100,00%	SMART

Dari 10 (sepuluh) indikator pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020, 3 (tiga) diantaranya mampu dicapai dengan capaian lebih dari 100%, sedangkan 6 (enam) indikator lainnya mampu dicapai dengan persentase capaian dikisaran 82,35% s.d. 100%. Namun, pada indikator Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet need*) capaiannya masih pada indikator merah, yang artinya belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan hanya tercapai sebesar 42,51%.

Hasil pengukuran capaian kinerja Perwakilan BKKBN DIY jika diukur dari capaian target tahun 2020 yang terdapat dalam Renstra 2020 – 2024 Perwakilan BKKBN DIY, sebagai berikut :

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Renstra Tahun 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	CAPAIAN 2020	PERSENTASE CAPAIAN	SUMBER DATA
1	Angka kelahiran total ( <i>Total Fertility Rate/TFR</i> ) per WUS usia 15-49 Tahun	1,92	1,81	105,73%	Puslitbang BKKBN
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern ( <i>Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR</i> )	62,01	75,84	122,30%	Statistik Rutin
3	Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi ( <i>Unmet Need</i> )	5,74	9,04	42,51%	Statistik Rutin
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun ( <i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i> 15-19)	17,00	14,00	117,65%	Puslitbang BKKBN
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	61,43	68,48	111,48%	Puslitbang BKKBN
6	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) umur 25-49 tahun	23,00	22,00	95,65%	Puslitbang BKKBN

5 (lima) dari 6 (enam) indikator yang ada, dapat dicapai dengan kisaran capaian 95,65% s.d. 122,30%. Bahkan 4 (empat) indikator memiliki indeks capaian baik sekali (persentase capaian diatas 100%). Meskipun demikian masih ada 1 (satu) indikator yang belum mencapai target yaitu Persentase *Unmet Need* hanya tercapai sebesar 42,51% dari target yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian kinerja diatas didukung oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Dukungan berbagai pihak yang menjadi mitra pelaksanaan Program Bangga kencana di Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Tingginya komitmen dan perhatian dari stakeholder maupun masyarakat dalam menerima Sosialisasi Program Bangga kencana
- c. Adanya Perda Ketahanan Keluarga tahun 2018 sebagai rujukan bahwa pelaksanaan program ketahanan keluarga dilaksanakan dengan lintas sektor
- d. Adanya kampung KB sebagai miniatur untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program Bangga kencana
- e. Adanya anggaran desa sebagai salah satu pendorong keberlangsungan program Bangga kencana di tingkat wilayah

Namun demikian masih terdapat beberapa faktor penghambat pelaksanaan Program Bangga kencana di DIY antara lain :

- a. Belum optimalnya pemanfaatan media dalam advokasi dan KIE.
- b. Sosialisasi dan promosi program Bangga kencana belum semuanya terfokus pada sasaran
- c. Kurangnya sinergitas program dan anggaran dengan mitra kerja terkait atau pengelola program dari tingkat provinsi hingga tingkat wilayah dalam melakukan pembinaan program Bangga kencana

## 2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020 dengan Dua Tahun Sebelumnya (2019 dan 2018)

Tabel 3.4 Perbandingan Tahun 2020 dengan Dua Tahun Sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA	2018			2019			2020		
		TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,05	2,24	90,73%	2,18	1,80	117,43%	1,92	1,81	105,73%
2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	54,16	53,9	99,52%	61,95	53,79	86,83%	62,01	57,10	92,08%
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,70	9,9	71,43%	8,23	10,01	71,43%	5,74	9,04	42,51%

Dari 10 (sepuluh) indikator Perjanjian Kinerja hanya 3 (tiga) indikator yang selalu diukur dari tahun 2018, yaitu Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun), Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR), serta Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*). Sementara 7 (tujuh) indikator lainnya tidak dapat diukur perbandingan kinerjanya dikarenakan indikator tersebut tidak selalu ada di setiap tahunnya.

### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.5 Perbandingan Tahun 2020 dengan Jangka Menengah 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	CAPAIAN 2020	PERSENTASE CAPAIAN	SUMBER DATA
1	Angka kelahiran total ( <i>Total Fertility Rate/TFR</i> ) per WUS usia 15-49 Tahun	1,83	1,81	101,09%	Sesuai Jalur Untuk Dipertahankan
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern ( <i>Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR</i> )	63,67	75,84	119,11%	Sesuai Jalur Untuk Dipertahankan
3	Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi ( <i>Unmet Need</i> )	5,29	9,04	29,11%	Perlu Upaya dan Startegi lebih kuat untuk mencapai target
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun ( <i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i> )	12,00	14,00	83,33%	Diperkirakan tercapai
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	69,95	68,48	102,10%	Sesuai Jalur Untuk Dipertahankan
6	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) umur 25-49 tahun	23,00	22,00	104,35%	Sesuai Jalur Untuk Dipertahankan

Dari capaian diatas diperoleh gambaran bahwa terdapat 5 (lima) indikator renstra yang sudah berjalan sesuai jalur dan diperkirakan tercapai. Namun ada 1 (satu) indikator masih memerlukan upaya dan strategi yang lebih kuat untuk mencapai target di tahun 2024.

### 4) Analisis Keberhasilan atau Kegagalan

Pencapaian Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Angka Kelahiran Total (*total fertility rate/TFR*) per WUS (15-49 tahun)  
 Pada indikator Angka Kelahiran Total (*TFR*) per WUS (15-49 tahun) di DIY tercapai sebesar 105,73% dari target *TFR* yang ditetapkan dalam KKP Tahun 2020 sebesar 1,92. Sesuai Data Puslitbang BKKBN, angka *TFR* tahun 2020 tercapai sebesar 1,81 sehingga DIY dapat mencapai target KKP yang ditetapkan.

Menurut Buku Penentuan Nilai Ideal dan Ambang Batas Parameter Keluarga Berencana Tahun 2017, nilai ambang batas TFR yang ditoleransi adalah antara 1,8 sampai 2,2. Berdasarkan nilai ambang batas ini, DIY telah berada pada nilai TFR ideal sejak tahun 1991 (nilai TFR adalah 2,04) dan itu berjalan sampai sekarang di 2020 (nilai TFR adalah 1,81). Ini menunjukkan bahwa selama hampir 30 tahun kondisi TFR di DIY telah ideal. Hal ini menunjukkan program Banggakencana mampu diimplementasikan dengan baik di DIY sehingga TFR dapat dipertahankan dalam angka ideal, tetapi tetap perlu diwaspadai adanya trend kenaikan angka capian TFR.

2. Persentase Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern (*mCPR*)

Berdasarkan data Puslitbang BKKBN tahun 2020 Perwakilan BKKBN DIY telah mampu mencapai persentase *mCPR* sebesar 57,1% dari total PUS yang ada. Walaupun pencapaian *mCPR* belum dapat memenuhi target KKP yang ditetapkan sebesar 62,01%, namun pemakaian kontrasepsi di DIY mengalami kenaikan sebesar 3,31% dari tahun 2019. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh naiknya pengguna kontrasepsi tradisional, karena secara umum CPR naik namun rendah pada *mCPR*, dengan distribusi CPR 65% dan 11,2% untuk kontrasepsi tradisional.

Advokasi penggunaan alat kontrasepsi modern pada PUS usia muda dan berpendidikan tinggi harus ditingkatkan karena pada sasaran ini yang merupakan penyumbang besar pengguna kontrasepsi tradisional.

3. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet need*)

Pada tahun 2020 berdasarkan data Statistik Rutin, Persentase *Unmet need* di DIY sebesar 9,04%. Angka tersebut menunjukkan bahwa Perwakilan BKKBN DIY belum dapat *mencapai* target KKP yang ditetapkan sebesar 5,74%. Walaupun demikian persentase *Unmet need* di DIY mengalami penurunan dari 9,9% di tahun 2018 menjadi 9,04% di tahun 2020. Kondisi ini disebabkan oleh banyaknya pengguna kontrasepsi tradisional. Selain itu karakteristik demografi, sosial ekonomi, sikap, akses dan kualitas pelayanan juga merupakan faktor yang erat kaitannya dengan capaian *unmet need* KB.

Salah satu alasan utama kebanyakan orang tidak ingin ber-KB adalah masalah kesehatan dan takut efek samping serta komunikasi dengan

pasangan. Sehingga perlu adanya peningkatan promosi, KIE juga advokasi tentang penggunaan alat kontrasepsi modern terutama pada PUS usia muda dan berpendidikan tinggi.

4. Angka Kelahiran Pada Remaja (*ASFR* 15-19 tahun)

*ASFR* 15-19 tahun di DIY pada tahun 2020 adalah 14, angka ini 3 point lebih kecil dari target yang ditetapkan sebesar 17 atau tercapai sebesar 117,65%. Hal tersebut menggambarkan bahwa program Genre sudah berjalan baik di DIY sehingga dapat menekan angka kelahiran pada usia remaja. Salah satunya dengan pembinaan kelompok PIK secara berkala, baik pada jalur masyarakat maupun jalur pendidikan.

5. Indeks Pembangunan Keluarga (*iBangga*)

Berdasarkan data Puslitbang BKKBN Indeks Pembangunan Keluarga (*iBangga*) DIY tahun 2020 adalah sebesar 68,48. Angka menunjukkan bahwa Perwakilan BKKBN DIY mampu melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 61,43. Bahkan secara nasional DIY memiliki *iBangga* tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Program Bangga Kencana sudah berjalan cukup baik di DIY karena adanya dukungan komitmen yang kuat dari mitra kerja terkait dan masyarakat.

6. Median Usia Kawin Pertama

Median usia kawin pertama DIY Tahun 2020 sebesar 22 yang berarti sudah dapat mencapai 95,65% dari target yang ditetapkan sebesar 23. Hal tersebut didukung oleh keberhasilan program Genre di DIY melalui kampanye Triad KRR bagi remaja. Meskipun demikian masih butuh penekanan pada sosialisasi tentang pendewasaan usia perkawinan bagi remaja di DIY.

7. Pemenuhan Ketersediaan Alkon di Faskes

Dari target 323 faskes yang ditetapkan di tahun 2020, telah tercapai 267 faskes yang telah terdistribusi Alkon IUD dan Implan atau sebesar 82.66% (SMART, 2020). Ada beberapa hal yang membuat kondisi capaian tersebut, beberapa hal diantaranya :

- Dasar perhitungan ketersediaan alkon di Faskes hanya melihat droping alkon pada rentang waktu 1 tahun 2020, bukan melihat ketersediaan riil maupun stock-out alkon di faskes tersebut, sehingga banyak Faskes yang sebetulnya karena masih tercukupi kebutuhan IUD dan

Implannya, tidak mengajukan distribusi IUD dan Implan pada tahun 2020.

- Pemenuhan ketersediaan alkon tersebut hanya dihitung untuk dropping IUD dan Implan, padahal banyak Faskes dalam target tersebut yang tidak melayani KB IUD dan Implan seperti contohnya Dokter Keluarga.
- Terdapat preferensi dari para calon akseptor untuk mencari pelayanan IUD Implan hanya pada faskes-faskes tertentu, sehingga tidak semua faskes (PMB dan Klinik) pada akhirnya melayani IUD dan Implan, yang selanjutnya berpengaruh terhadap demand/permintaan distribusi IUD dan Implan.
- Faktor lain yang berpengaruh diantaranya Faskes diperlakukan seperti jejaring dalam pelaporan F/II/KB oleh PKB, sehingga dropping alkon dan seluruh hasil pelayanan KB tercatat 0 (nol) pada F/II/KB faskes tersebut dan dicatatkan di F/II/KB Puskesmas setempat. Padahal sebenarnya faskes tersebut bukan jejaring dan telah mendapatkan dropping alkon sendiri, didistribusikan langsung dari OPD KB Kabupaten/Kota setempat.
- Hal lain yang berkontribusi adalah koordinasi internal di faskes yang kurang baik, kasus yang banyak terjadi adalah semisal penanggung jawab bagian Farmasi dan KIA adalah orang yang berbeda, padahal penerima dropping alkon (Farmasi) tidak mencatatkan alkon yang diterima di F/II/KB yang notabene dibuat oleh pihak KIA. KIA hanya mencatat alkon yang keluar masuk di poli KIA saja, kurang mengetahui dropping alkon yang ada di Farmasi.
- Selain itu, selama pandemi COVID-19 pada tahun 2020 banyak faskes yang tutup ataupun tidak melayani KB.

8. Keluarga yang memiliki Baduta terpapar 1000 HPK

Pengetahuan Keluarga yang memiliki Baduta terpapar dalam pengasuhan 1000 HPK bagi 51.768 keluarga yang mempunyai baduta sebagai salah satu kegiatan Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) sudah tercapai 100 %. Sasaran tersebut ada di 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Kulonprogo (target sasaran 10.762, roadmap 2018), Kabupaten Bantul (target sasaran 24.673, roadmap 2019) dan Kabupaten Gunungkidul (target sasaran



16.333, roadmap 2020). Informasi dan edukasi tentang pengasuhan 1000 HPK yang disampaikan dalam bentuk cetak seperti buku pegangan kader, leaflet dan praktek penggunaan Kartu Kembang Anak (KKA) serta sosialisasi langsung oleh pakar/ *expert* dan juga para pemangku kepentingan. Dari aspek promotif, preventif penyampaian informasi dan edukasi pentingnya pengasuhan 1000 HPK juga disampaikan pada ibu hamil, ibu menyusui serta para tokoh agama maupun masyarakat, hal tersebut dimaksudkan agar lebih efektif dan efisien dalam upaya penyebaran ilmu dan informasi.

9. Bina keluarga lansia yang melaksanakan 7 dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang

Bina Keluarga Lansia (BKL) yang melaksanakan 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang (PJP) bagi Lansia juga sebagai salah satu kegiatan Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) sudah tercapai 100 %. Kegiatan kelanjutusiaan dalam pelaksanaan 7 (tujuh) dimensi lansia Tangguh dan PJP tidak lepas dari adanya kerjasama dengan beberapa lintas sector, termasuk Perguruan Tinggi (PT), salah satunya dengan Universitas Respati Yogyakarta. Kerjasama yang diwujudkan dengan PT adalah dalam bentuk kegiatan orientasi atau peningkatan kapasitas kader/ anggota kelompok BKL. Bersama Komda Lansia DIY, BKKBN juga ingin mewujudkan DIY yang ramah lansia

10. Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu

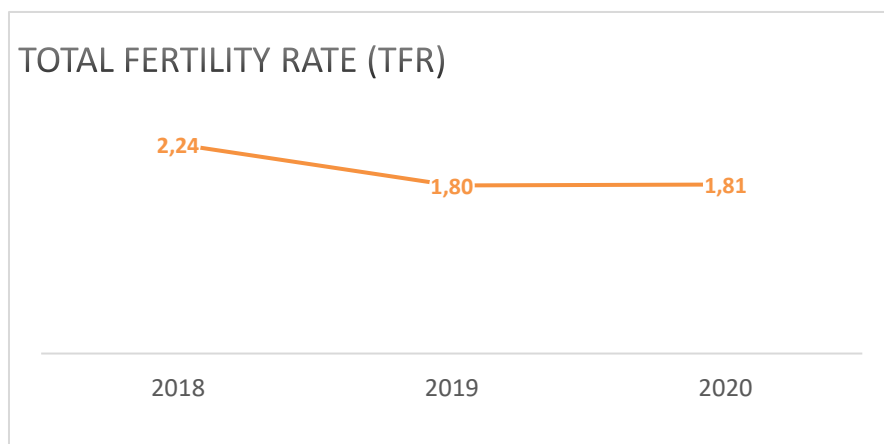
Penguatan peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu, sebagai target Pro PN berikutnya, tercapai 100 %. Dengan pembagian sasaran PIK Remaja sebanyak 279 kelompok dan BKR sebanyak 139 kelompok sehingga total sasaran sebanyak 418 kelompok. Sebagian besar kegiatan remaja dilaksanakan secara *mix*, antara kehadiran secara fisik juga dihadiri secara virtual, hal tersebut dimaksudkan sebagai upaya menegakkan protocol kesehatan covid-19 dan juga sebagai upaya optimalisasi anggaran.

## 5) Analisis Kenaikan atau Penurunan Kinerja

Dari 10 (sepuluh) indikator yang ada dalam perjanjian kinerja, hanya 3 (tiga) indikator yang tidak mengalami perubahan dari tahun 2018. Sehingga hanya 3 (tiga) indikator tersebut yang bisa dianalisa kenaikan atau penurunan kinerjanya. Perkembangan kinerja dari ketiga indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Angka kelahiran total (*total fertility rate/TFR*) per WUS (15-49 tahun)

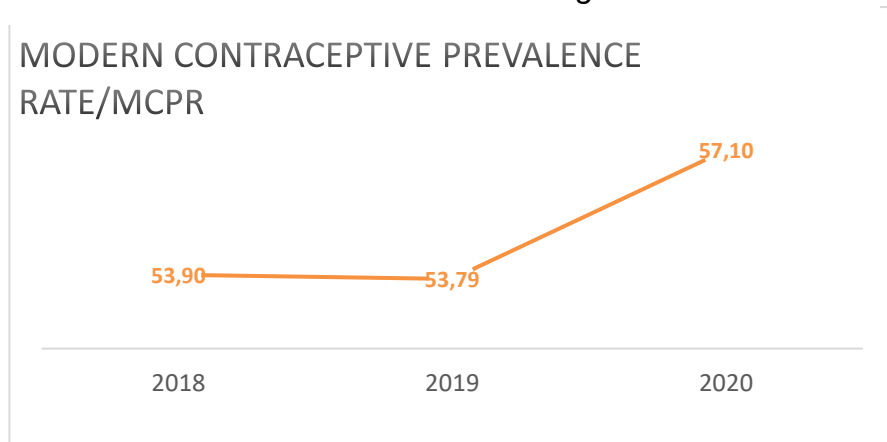
Gambar 3.1 Grafik Perkembangan TFR



Sejak tahun 2018 trend Angka kelahiran total (*total fertility rate/TFR*) per WUS (15-49 tahun) terlihat masih fluktuatif, mengalami penurunan sebesar 0,44 pada tahun 2019 namun pada tahun 2020 mengalami sedikit kenaikan walaupun tidak signifikan dan masih bisa dikatakan stabil. Angka TFR saat ini berkisar 2,24-1,8 masih dalam kondisi ideal, tetapi tetap harus diwaspadai terjadinya kenaikan kembali berdasarkan trend sebelumnya.

2. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (*modern contraceptive prevalence rate/mCPR*)

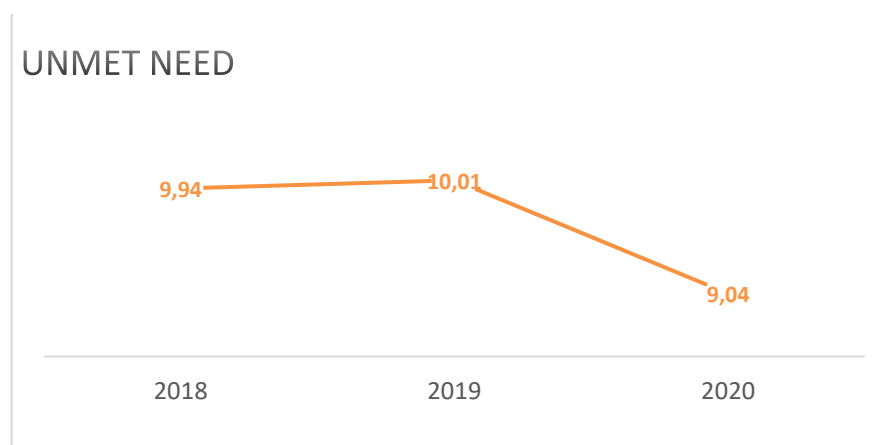
Gambar 3.2 Grafik Perkembangan mCPR



Meski sempat mengalami penurunan di tahun 2019, persentase mCPR di DIY pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 3,31% atau menjadi 57,10% dari jumlah PUS yang ada. Akan tetapi persentase tersebut masih dibawah target yang ditetapkan pada tahun 2020. Menyikapi hal tersebut diperlukan upaya-upaya yang out of the box untuk dapat meningkatkan persentase mCPR ini sebab trend dari tahun ke tahun hanya mengalami perubahan yang kecil bahkan tampak menurun di tahun 2019. Fokus kegiatan lebih diarahkan pada WUS usia muda dengan Pendidikan tinggi dan perlu juga pengembangan metode KIE yang berbeda dan terfokus pada sasaran.

3. Persentase Kebutuhan Ber KB Yang Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

Gambar 3.3 Grafik Perkembangan Unmet Need



Indikator persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) meskipun masih terlihat fluktuatif namun telah menunjukkan trend yang

positif. Tampak terjadi kenaikan angka *unmet need* dari tahun 2018 meskipun angka kenaikannya masih di bawah 1%. Fenomena *unmet need* KB bersifat multidimensial karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti umur ibu, pendidikan, preferensi gender anak, pendapatan, pekerjaan, agama, pengetahuan mengenai kontrasepsi, komunikasi dengan pasangan, akses terhadap media dan tempat tinggal. Selain itu karakteristik demografi, sosial ekonomi, sikap, akses dan kualitas pelayanan juga merupakan faktor yang erat kaitannya dengan capaian *unmet need* KB.

Salah satu alasan utama kebanyakan orang tidak ingin ber-KB adalah masalah kesehatan dan takut efek samping serta komunikasi dengan pasangan. Oleh sebab itu, upaya penurunan *unmet need* KB harus mempertimbangkan berbagai faktor tersebut. Informasi tentang pelayanan KB yang tidak terpenuhi digunakan untuk menilai sejauh mana program KB telah dapat memenuhi kebutuhan KB di kalangan PUS yang mengiginkan untuk ber-KB. Apabila program dapat memenuhi kebutuhan KB, diharapkan angka prevalensi KB dapat meningkat dan kelompok *unmet need* KB akan semakin berkurang

## 6) Langkah – langkah ke depan

Sedangkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021 sebagai upaya untuk meningkatkan capain kinerja dan memenuhi target jangka menengah Renstra adalah sebagai berikut :

1. Melakukan revitalisasi KIE dan penggerakan Program kepada masyarakat dengan dukungan komitmen dan kebijakan dalam mempertimbangkan skema kegiatan yang berbasis Tehnologi Informasi dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB yang tepat sasaran;
2. Melakukan pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB;

3. Menajamkan segmentasi sasaran kegiatan program Bangga Kencana dan difokuskan pada wilayah wilayah dengan pencapaian *mCPR* rendah dan *Unmet Need* yang tinggi, melalui KIE dan pelayanan KB di daerah legok termasuk di desa wilayah Kampung KB;
4. Mengintensifkan pelayanan KB Bergerak di wilayah DTPK melalui Baksos pelayanan KB MKJP yang terintergrasi dengan pelayanan papsmear.
5. Mengintensifkan pembinaan program Bangga Kencana baik untuk wilayah Kampung KB maupun wilayah di luar Kampung KB untuk mendorong capaian Program Bangga Kencana dengan mengintensifkan pemanfaatan berbagai media dalam menyebarluaskan program Bangga Kencana di wilayah DIY.
6. Pelibatan generasi milenial menjadi penting di setiap kegiatan yang ada di kelompok kegiatan, oleh karena mobilitasnya yang tinggi dan maju dalam hal Tehnologi Informasi

#### **A.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)**

Selain target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, Perwakilan BKKBN DIY juga mempunyai Indikator Kinerja Kegiatan yang ada dalam Renstra 2020 - 2024. Indikator tersebut terdiri dari 2 (dua) Program Kegiatan, yaitu Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Provinsi dan Program Dukungan Manajemen (DKM) Provinsi. Hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020 tertuang pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2020

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2020	CAPAIAN 2020	PERSENTASE CAPAIAN
22	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi			
	Bidang Dalduk Perwakilan BKKBN Provinsi			
1	Persentase Pemerintah Daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah	1 Prov & 5 Kab/Kota	1 Prov & 5 Kab/Kota	100,00%
2	Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB	48 RDK	27 RDK	56,25%
3	Persentase Kelompok Kerja Bangsa Kencana Provinsi dan Kab/Kota yang efektif	1 Prov & 1 Kab/Kota	1 Prov & 1 Kab/Kota	100,00%
4	Cakupan implementasi pendidikan kependudukan di provinsi	3 Jalur	3 Jalur	100,00%
5	Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk	1 Prov & 1 Kab/Kota	1 Prov & 2 Kab/Kota	150,00%
6	Persentase Kampung KB yang melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan	155 Kampung KB	171 Kampung KB	110,32%
	Bidang KB-KR Perwakilan BKKBN Provinsi			
1	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	58,87 %	92,3 %	156,79%
2	Indeks Informasi Metode KB (Method Information Index/MII)	71 Indeks (Skala 0-100)	86 Indeks (Skala 0-100)	121,13%
3	Persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota dengan kesertaan rendah	56,85 %	72,41 %	127,37%
4	Persentase Kehamilan Yang Tidak Diinginkan	24,1 %	25,0 %	96,27%
5	Persentase Pelayanan KB Pascapersalinan	18,4 %	19,6 %	106,52%
	Bidang ADPIN Perwakilan BKKBN Provinsi			
1	Persentase stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program Bangsa Kencana	35,6 Stakeholder/Mitra	35,6 Stakeholder/Mitra	100,00%
2	Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangsa Kencana	55 %	55 %	100,00%
3	Persentase Penyuluh KB yang berkinerja baik	65 %	90 %	138,46%
4	Jumlah pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	2 Kab/Kota	2 Kab/Kota	100,00%
5	Persentase cakupan perangkat dan jaringan sistem Teknologi dan Informasi di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100,00%
	Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi			
1	Persentase peserta Diklat yang lulus dengan kategori baik dan sangat baik	30 %	80,83 %	269,43%
2	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang digunakan sebagai input rumusan Kebijakan Program Bangsa Kencana di Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
31	Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi			
	Sekretariat Perwakilan BKKBN Provinsi			
1	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
	Pengawasan Perwakilan BKKBN Provinsi			
1	Indeks ZI WBK	75 Indeks	92,3 Indeks	123,07%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan pencapaian indikator kinerja kegiatan tahun 2020 sebagai berikut :

a. Program Bangga Kencana Perwakilan BKKBN Provinsi

Capaian kinerja kegiatan pada Program KBPK Provinsi berada pada kisaran 56,25% s.d 269,43%. Beberapa indikator kinerja kegiatan yang capaiannya masih dibawah 100% dan perlu mendapatkan perhatian adalah :

1. Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna Yang Terbentuk di Kampung KB hanya tercapai sebesar 56,25% atau hanya terdapat 27 Rumah Data Kependudukan (RDK) dari 48 RDK yang ditargetkan di tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan kriteria RDK Paripurna yang terdapat dalam panduan pengelolaan RDKIK baru diterima dari BKKBN Pusat Bulan Agustus 2020 sehingga belum secara optimal OPD KB dapat melaporkan kondisi RDK di wilayahnya sesuai dengan kriteria di buku panduan tersebut. Selain itu, sosialisasi Rumah DataKU ke Kab/ Kota dilakukan secara virtual dan belum maksimal serta belum semua PKB mendapat sosialisasi pengelolaan Rumah DataKU yang terbaru
2. Jumlah Keluarga yang mengakses PPKS pada tahun 2020 hanya sebesar 619 keluarga atau hanya mencapai 69,24% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 894 keluarga. Hal tersebut disebabkan karena Pandemi Covid-19 sehingga kegiatan sosialisasi PPKS ke mitra sangat terbatas dan sebagian besar masyarakat enggan untuk datang langsung ke PPKS. Meskipun PPKS juga melayani via *online* namun minat masyarakat untuk konsultasi secara online masih rendah.
3. Persentase Kehamilan yang Tidak Diinginkan pada PUS tahun 2020 di DIY mencapai 25%, dimana angka tersebut lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 24,1%. Hal tersebut dikarenakan rendahnya tingkat kesertaan KB dengan metode kontrasepsi modern (*mCPR*). Dimana penggunaan metode kontrasepsi modern memiliki efektifitas yang baik dan dapat menurunkan kehamilan yang tidak direncanakan dan tidak dikehendaki

Selain ketiga indikator tersebut, indikator kinerja yang lain dapat tercapai 100% bahkan lebih. Untuk capaian tertinggi ada pada indikator Persentase

Peserta Diklat yang lulus dengan Kategori Baik dan Baik Sekali yaitu sebesar 269,63%

- b. Program Dukungan Manajemen Perwakilan BKKBN Provinsi  
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan DKM seluruhnya berada pada kategori baik dengan kisaran capaian sebesar 100% s.d. 123,07%.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

### **B.1. Realisasi Anggaran Perwakilan BKKBN DIY**

Pagu awal anggaran Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 yang tertuang dalam DIPA Nomor: SP DIPA-068.01.2.017972/2020 tanggal 12 November 2019 adalah sebesar Rp.65.225.545.000,-. Akibat adanya pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020, maka pada bulan Maret 2020 pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan surat edaran Nomor: 6/MK.02/2020 tanggal 15 maret 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dengan adanya kebijakan tersebut, Pagu anggaran Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta menjadi Rp.57.365.599.000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 7.859.946.000,-.

Realisasi penyerapan DIPA Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta TA 2020 adalah sebesar Rp. 51.584.849.642 atau 89.92 persen dari pagu anggaran Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta TA. 2020 sebesar Rp57.365.599.00,-. Adapun realisasi anggaran Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta TA 2020 per jenis belanja adalah sebagai berikut :



*Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Perwakilan BKKBN DIY TA. 2020 per jenis belanja*

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	46.173.761.000	40.570.863.620	87,87
2.	Belanja Barang	11.041.838.000	10.870.759.522	98,45
3.	Belanja Modal	150.000.000	143.226.500	95,48
Jumlah		57.365.599.000	51.584.849.642	89,92

*Sumber: Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tingkat UAKPA tahun 2020*

Pagu anggaran sebesar Rp.57.365.599.000 tersebut terbagi kedalam 4 (empat) program, dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Perwakilan BKKBN DIY TA. 2020 per program*

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN	49.848.199.000	44.222.993.521	88,83
2.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN	63.395.000	63.345.000	99,92
3.	Program Pelatihan dan Pengembangan BKKBN	363.318.000	363.166.669	99,96
4.	Program Kependudukan dan KB	7.090.687.000	6.935.344.452	97,81
Jumlah		57.365.599.000	51.584.849.642	89,92

*Sumber: Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tingkat UAKPA tahun 2020*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa selama periode tahun 2020 alokasi anggaran belum terserap dengan baik yakni masih ada anggaran yang serapanya dibawah 90 %. Hal ini mengindikasikan bahwa anggaran belum digunakan secara efektif dan efisien bagi pencapaian tujuan strategis dan sasaran strategis sesuai yang telah ditargetkan dalam Renstra tahun 2020-2024 dan ditetapkan setiap tahunnya dengan Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja. Belum optimalnya capaian realisasi anggaran tahun 2020 disebabkan antara lain:

- a. Adanya kebijakan pemerintah yang tidak memasukkan komponen tunjangan kinerja pada pembayaran gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya
- b. Adanya kelebihan penganggaran belanja Alokon dimana harga satuan alokon jauh dibawah pagu anggaran yang ditetapkan. Optimalisasi sudah dilakukan tetapi masih terdapat sisa anggaran.

## **B.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Pelaksanaan program Banggakencana selain menggunakan dana APBN yang tertuang dalam DIPA Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta, juga menggunakan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang KB melalui Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta. Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang KB terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik Sub Bidang KB, Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Sub Bidang KB (BOKB) dan Dana Alokasi Khusus Penugasan. Dengan adanya dukungan dari DAK Sub Bidang KB tersebut sangat membantu dalam pencapaian target kinerja di DIY. Karena Anggaran APBN mengalami refocusing yang cukup besar (Rp. 7.859.946.000,-) akibat adanya Pandemi Covid 19. Sehingga beberapa kegiatan koordinasi di tingkat kecamatan maupun kabupaten/kota dibiayai melalui DAK tersebut.

Selain dukungan anggaran, pencapaian Program Bangga Kencana juga didukung oleh sumber daya manusia (pegawai) yang ada di DIY baik ASN yang ada di Perwakilan BKKBN DIY maupun Penyuluh Keluarga Berencana. Pada tahun 2020 ini Perwakilan BKKBN DIY mempunyai pegawai sebanyak 295 orang dengan rincian ASN di Kantor Perwakilan BKKBN DIY sebanyak 97 orang dan Penyuluh Keluarga Berencana sebanyak 198 orang. Dengan bergabungnya tenaga Penyuluh KB di Perwakilan BKKBN DIY sejak tahun 2017 memberi dampak positif terhadap pencapaian target kinerja di DIY. Hal ini terbukti dengan adanya trend meningkatnya persentase *mCPR* dan menurunnya tingkat *unmet need* di DIY. Meskipun capaian tersebut masih belum signifikan dan masih diperlukan inovasi lebih dari para Penyuluh KB guna mencapai target kinerja yang ada sehingga dapat mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang di DIY.

## C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Selain capaian kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2020, juga terdapat beberapa capaian lainnya yang telah dicapai oleh Perwakilan BKKBN DIY sampai dengan Tahun 2020. Capaian tersebut antara lain :

### 1. Peringkat 1 Nasional Lomba PKBRS tipe TNI/Polri tahun 2020

Dalam upaya merevitalisasi peran PKBRS dan meningkatkan motivasi setiap



RS dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB di Rumah Sakit, BKKBN melaksanakan Lomba PKBRS Tingkat Nasional tahun 2020 se-Indonesia. Dari 3 kategori RS yang dilombakan, Perwakilan BKKBN DIY berhasil menghantarkan Juara 1

Nasional di 2 kategori yang berbeda yaitu RS. Bhayangkara Polda DIY sebagai Juara 1 Lomba PKBRS Tingkat Nasional kategori tipe RS TNI/Polri, dan RS Rajawali Citra sebagai Juara 1 Lomba PKBRS Tingkat Nasional kategori RS tipe D. Prestasi ini sangat membanggakan dan tentunya memberi motivasi yang besar bagi Perwakilan BKKBN DIY dan Rumah Sakit mitra kerja untuk bisa selalu memberikan pelayanan KB yang terbaik bagi masyarakat.

### 2. Peringkat 2 Nasional Pelayanan KB Sejuta Akseptor

Memperingati Hari Keluarga Nasional tahun 2020, BKKBN dalam upaya



terobosannya untuk meningkatkan capaian layanan KB di masa Pandemi COVID-19 menyelenggarakan inovasi **Pelayanan KB Sejuta Akseptor** secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 29 Juni 2020.

Berkat koordinasi yang baik oleh Perwakilan BKKBN DIY bersama mitra kerja dan dukungan segenap masyarakat DIY, maka Perwakilan BKKBN DIY berhasil menorehkan prestasi capaian pelayanan KB dengan hasil 18.212 akseptor dari target sejumlah 8.150 akseptor (223.5%), sehingga menempatkan DIY sebagai 2 besar Nasional dalam kegiatan ini.

### 3. Juara 2 Kategori Kinerja Lini Lapangan dalam Adpin Award

Di era pandemi covid-19 petugas lini lapangan DIY dalam hal ini adalah PKB/PLKB sesuai tugas dan fungsinya sebagai penggerak di masyarakat dituntut untuk terus berkontribusi mendukung serta mensosialisasikan program



bangga kencana. Dalam segala keterbatasan akibat pandemi yang berkelanjutan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, PKB/PLKB Daerah Isimewa Yogyakarta berupaya mengubah pendekatan secara

konvensional menjadi pendekatan modern melalui pemanfaatan media sosial. Pemanfaatan media sosial oleh PKB/PLKB diterapkan untuk mengumpulkan para kader agar dapat terjaring dalam suatu networking yang terkoordinir dan termanajemen dengan baik, sehingga informasi terkini terutama seputar perubahan perilaku di era pandemik dapat tersosialisasikan dan aplikatif. Selain mempermudah dalam mensosialisasikan program bangga kencana, penggunaan jejaring media sosial juga turut mendukung pemerintah dalam menerapkan social distancing untuk meminimalisir pertemuan.

Pada ajang Adpin Award 2020 dalam kategori kinerja lini lapangan, indikator yang termasuk sebagai bahan penilaian, yakni dokumen, dukungan, dan hasil kerja oleh para petugas lini lapangan. Kriteria penilaian pada indikator dokumen seperti tersedianya kelengkapan dokumen SK PPKBD & SUB PPKBD, SK Pokja Kampung KB, SK Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh KB, sedangkan kriteria penilaian pada indikator dukungan adalah besaran Dukungan Anggaran OPD Provinsi/Pemda Untuk Penggerakan Lapangan, Persentase Dukungan Anggaran Perwakilan BKKBN Provinsi untuk Hubalila, Dukungan Anggaran Kab/kota terhadap pembiayaan kegiatan lini lapangan, dan pada indikator Hasil

kerja terdapat sub indikator Mekanisme Operasional, Institusi Masyarakat Pedesaan, Kinerja Penyuluh KB sebagai bahan penilaian dapat dipenuhi oleh lini lapangan DIY. Dari akumulasi penilaian terhadap kriteria tersebut DIY meraih juara kedua untuk kategori ini.

#### 4. Juara Harapan II Sistem Pencatatan Pelaporan Terbaik Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor

Dalam rangka peringatan Harganas XXVII tanggal 29 Juni 2020, BKKBN menyelenggarakan Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor di seluruh wilayah Indonesia dengan tema “BKKBN baru dengan cara baru dan semangat baru

hadir di dalam keluargamu”, dimana pada kegiatan tersebut Perwakilan BKKBN DIY mendapat penghargaan sebagai Juara Harapan II Tingkat Nasional dalam Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor. Kegiatan ini turut mendongkrak capaian kesertaan KB Baru maupun KB Aktif.



Sesuai dengan harapan, melalui pelayanan serentak yang dilaksanakan ini berdampak pada peningkatan capaian peserta KB baru dan peserta KB aktif dapat dipertahankan atau dengan kata lain tingkat putus pakai kontrasepsi dapat diminimalisir. Mengingat pada situasi pandemi Covid-19 belakangan, angka kesertaan KB ulang sempat mengalami penurunan yang signifikan.

Pencatatan pelaporan yang dilakukan oleh Perwakilan DIY menunjukkan adanya ketepatan dan kecepatan sehingga antara data hasil pelayanan KB serentak pada tanggal 29 Juni 2020 terekam dalam sistem informasi manajemen pelaporan yang ada. Sehingga kontrol terhadap akseptor yang dilayani dan jenis kontrasepsinya dapat termonitor dengan sesuai.

## 5. Apresiasi Duta GenRe Nasional Tahun 2020

Dalam Jambore Ajang Kreatifitas (JAK) Nasional sekaligus Pemilihan Duta



GenRe Nasional, Perwakilan BKKBN DIY ikut berpartisipasi dan diwakili oleh sepasang Duta GenRe yaitu Dhella Rezki Legynia Putri dan Anwar Maulana Sidik.

Diperoleh

penghargaan 10 besar Duta GenRe Indonesia Putri Tahun 2020 oleh Dhella Rezki Legynia Putri.

## 6. Sertifikasi Kompetensi CTU Bidan melalui MONIKA tahun 2020

MONIKA merupakan sertifikasi kompetensi bagi para Provider KB yang telah dilatih CTU, pemasangan IUD dan Implan yang diselenggarakan oleh BKKBN

A screenshot of a table showing the results of the MONIKA certification for 2020. The table has several columns, including 'Nama', 'Kantor', 'Jenis Tindakan', 'Status', 'Tanggal', 'Dokter', 'Pemeriksa', and 'Status CTU'. The rows are color-coded: green for 'Lulus' (Pass), yellow for 'Tidak Lulus' (Fail), and red for 'Tidak Lulus' (Fail). The table shows a high percentage of providers passing the certification.

sejak tahun 2011 – 2016. Sertifikasi ini dikeluarkan oleh JNPK-KR (Jaringan Nasional Pelatihan Klinik Kesehatan Reproduksi). Pada tahun 2020 Perwakilan BKKBN DIY berhasil mencapai 195 provider yang tersertifikasi dari target sebanyak 188 provider (103,72%). Dengan

tercapainya target sertifikasi tersebut maka kompetensi para provider KB akan memberikan pelayanan KB yang berkualitas bagi masyarakat di DIY.



## 7. Sekolah Lansia Kelompok BKL

Pada tahun 2020, sekolah lansia masih berjalan dan bertambah 2 (dua) sekolah lansia lagi yaitu : Sekolah Lansia BKL Manunggal Asih dari Kabupaten Gunungkidul dan Sekolah Lansia BKL Melati dari Kabupaten Kulonprogo.



Sekolah Lansia terselenggara atas kerja sama antara Perwakilan BKKBN DIY dengan Yayasan IRL (Indonesia Ramah Lansia).

Tepat pada tanggal 02 Desember 2020, 3 (tiga) sekolah

lansia berhasil menyelenggarakan wisuda sebagai tanda kelulusan sekolah lansia untuk jenjang “Standar- 1”. Dan sebagai Dewan Prosesi dalam wisuda sekolah lansia kelompok BKL adalah Wakil Gubernur DIY, Kepala Perwakilan BKKBN DIY dan Direktur Indonesia Ramah Lansia.

Dalam arahnya, beliau berharap semoga dengan wisuda ini bisa meningkatkan kualitas lansia dan mampu mewujudkan lansia tangguh di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana yang diharapkan kita bersama. Para wisudawan juga diharapkan meningkatkan kemampuan untuk terus mencari ilmu yang bermanfaat dalam kehidupannya, karena menuntut ilmu bisa kita peroleh dari ayunan sampai usia sepuh atau akhir hayatnya.

## 8. Jumat Sharing

Sebagai upaya agar pegawai dapat terus menambah wawasan dan keterampilannya, Perwakilan BKKBN DIY melalui bidang pelatihan dan pengembangan (Latbang) menyelenggarakan Jumat Sharing. Jumat sharing merupakan sarana berbagi ilmu dan pengalaman melalui aktivitas belajar bersama secara rutin dari, oleh, dan untuk pegawai. Kegiatan yang dikemas secara informal ini dilaksanakan dua kali setiap bulan setelah kegiatan senam pagi. Kegiatan ini dilakukan secara daring dan luring.

Jumat Sharing diharapkan dapat berkelanjutan dan menjadi rintisan fasilitasi kebutuhan pelatihan pegawai sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Melalui kegiatan ini juga diharapkan dapat menyerap aspirasi kebutuhan pelatihan pegawai sekaligus sebagai sarana internalisasi nilai-nilai budaya kerja dan peningkatan kompetensi.

## **D. EVALUASI KINERJA**

### **1) Review Renstra Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2020-2024**

Di dalam Renstra Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, sasaran, strategi, program dan kegiatan yang akan di capai selama 5 tahun kedepan dalam Program Bangga Kencana. Penetapan sasaran, indikator kinerja kegiatan dan target yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun sudah berdasarkan sasaran kinerja BKKBN Pusat Tahun 2020-2024 yang ada pada Renstra BKKBN Pusat, karena Perwakilan BKKBN DIY sebagai unit pelaksana program Bangga Kencana di daerah. Penetapan target tahun 2020-2024 sudah menyesuaikan kondisi DIY dengan berdasarkan data dan capaian program Bangga Kencana di tahun 2019.

### **2) Review Pengelolaan Kinerja**

Pada tahun 2020 kinerja Perwakilan BKKBN DIY berdasarkan pada Perjanjian Kinerja 2020 dan juga Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020 yang tercantum dalam Renstra Perwakilan BKKBN DIY. Review pengelolaan kinerja dilakukan pada 5 aspek, yaitu :

#### **a. Perencanaan Kinerja**

Pada Tahun 2020 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan RPJMN 2020-2024 sehingga pada tahun ini Perwakilan BKKBN DIY melakukan penyusunan Renstra sebagai dasar perencanaan kinerja 5 (lima) tahun kedepan. Dari indikator kinerja yang ada pada Renstra kemudian disusun Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan. Dimana Rencana Kerja Tahunan tersebut digunakan sebagai Struktur Program dan Anggaran (SPA) untuk menyusun program dan anggaran serta kegiatan tahun 2020 yang tertuang dalam DIPA Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2020. Perwakilan



BKKBN juga telah menyusun Rencana Aksi Pelaksanaan Kinerja (RAPK) tahun 2020 berdasarkan pada DIPA yang telah disusun.

b. Perjanjian Kinerja

Perwakilan BKKBN DIY mendapat indikator dan target kinerja dari BKKBN Pusat yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja tersebut mengalami 2 (dua) kali penyesuaian dikarenakan adanya refocusing anggaran sebagai dampak dari adanya pandemi Covid 19. Penyesuaian pertama dilakukan pada jumlah anggaran yang ada disesuaikan dengan hasil refocusing. Sedangkan yang kedua terjadi penyesuaian jumlah indikator kinerja yang ada dari semula 24 (dua puluh empat) indikator menjadi 10 (sepuluh) indikator. Dari target kinerja yang ada setelah dilakukan review terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang tidak sesuai dengan kondisi riil di DIY, yaitu pada indikator Persentasi Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*).

c. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan hasil capaian kinerja tahun 2020 dengan target tahun 2020 baik yang terdapat pada Perjanjian Kinerja maupun Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan Renstra. Selain itu juga membandingkan capaian tahun 2020 dengan target jangka menengah (target tahun 2024) dan juga pengukuran trend capaian dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Data capaian yang digunakan untuk pengukuran bersumber dari Puslitbang BKKBN, Statistik Rutin dan SMART.

d. Pelaporan Kinerja

Dari pengukuran kinerja tahun 2020 dilakukan analisis hasil capaian kinerja, dimana dari 10 (sepuluh) indikator yang ada hanya 1 (satu) indikator yang masih dalam capaian merah dengan capaian kurang dari 50%. Sedangkan untuk 9 (sembilan) indikator lainnya dapat tercapai dengan capaian diatas 80%.

e. Evaluasi Kinerja

Berdasarkan perencanaan hingga laporan kinerja yang telah dilakukan maka kinerja Perwakilan BKKBN DIY pada tahun 2020 bisa dikatakan cukup optimal. Perwakilan BKKBN DIY dapat mencapai sebagian besar target yang telah ditetapkan baik pada Perjanjian Kinerja maupun Renstra 2020.

Selain itu Perwakilan BKKBN DIY juga mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran pasca *refocusing* dengan penyerapan anggaran diatas 95% pada anggaran Program Bangga Kencana.

### 3) Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta berdasarkan hasil penilaian Tim Internal ZI menuju WBK, telah memenuhi nilai minimum pada setiap area perubahan, sebagaimana disampaikan pada table berikut :

*Tabel 3.9 Hasil Penilaian Internal ZI menuju WBK Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2019/2020*

<b>NO</b>	<b>AREA PERUBAHAN</b>	<b>NILAI</b>	<b>NILAI MINIMUM</b>
1.	Manajemen Perubahan	7	4,8
2.	Penataan Tata Laksana	5,86	4,2
3.	Penguatan Sistem Manajemen SDM	9,19	6
4.	Penguatan Akuntabilitas	10	6
5.	Penguatan Pengawasan	15	9
6.	Penguatan Pelayanan Publik	9,25	6
<b>TOTAL PENGUNGKIT</b>		<b>56,3</b>	<b>36</b>

Sumber : Hasil penilaian Internal ZI menuju WBK Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2019/2020

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Perwakilan BKKBN DIY lulus dan layak untuk diajukan sebagai unit kerja berpredikat “Menuju WBK” di lingkungan BKKBN kepada Tim Penilai Nasional/Kementerian PAN dan RB RI Tahun 2020. Sebagai tindak lanjut perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perwakilan BKKBN DIY, telah dilakukan pembinaan pegawai, baik yang ada di perwakilan BKKBN DIY maupun perwakilan PKB DIY, pada tanggal 7 Desember 2020 dengan narasumber Sekretaris Utama BKKBN RI dan Inspektur Utama BKKBN RI serta Perjanjian Kinerja sudah disusun sampai dengan tingkat individu dan telah menggambarkan sasaran, target dan indikator kinerja yang linear dengan sasaran, target dan indikator organisasi.

#### 4) Evaluasi Atas Implementasi SAKIP

Implementasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Perwakilan BKKBN DIY menunjukkan trend yang positif selama 3 (tiga) tahun terakhir. Adapun hasil penilaian SAKIP Perwakilan BKKBN DIY dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 seperti yang tertuang pada tabel berikut :

*Tabel 3.10 Hasil Penilaian SAKIP Perwakilan BKKBN DIY*

NO	URAIAN	BOBOT	2017	2018	2019
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	20,19	21,04	24,66
2.	Pengukuran Kinerja	25,00	10,22	12,18	14,38
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	11,01	11,87	11,00
4.	Evaluasi Kinerja	10,00	4,71	6,54	6,88
5.	Capaian Kinerja	20,00	10,00	111,5	13,54
<b>TOTAL</b>		<b>100,00</b>	<b>56,13</b>	<b>63,15</b>	<b>70,45</b>
<b>PREDIKAT</b>			<b>CC</b>	<b>B</b>	<b>BB</b>

Dari tabel diatas dapat terlihat dari tahun 2017 nilai SAKIP DIY mengalami kenaikan, hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan SAKIP di Perwakilan BKKBN DIY telah berjalan dengan baik.

Pada pertengahan Tahun 2020 telah dilakukan evaluasi capaian kinerja terkait Indikator Kinerja Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (Unmet Need) yang masih jauh dari target dan telah dilakukan strategi untuk pencapaian indikator kinerja sesuai dengan harapan, walaupun pada hasil akhir Indikator kinerja tersebut tidak tercapai. Begitu juga dengan indikator kinerja yang lain juga telah dilakukan evaluasi pada tahun berjalan sehingga dilakukan strategi baru agar kinerja Perwakilan BKKBN DIY dapat tercapai indikator.

## **E. PERBAIKAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2021**

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Program Bangga Kencana Tahun 2020 di DIY, maka diperlukan beberapa perbaikan dalam perencanaan program dan anggaran tahun 2021 agar dapat meningkatkan kinerja dan dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun perbaikan tersebut antara lain :

- 1) Memperhatikan kondisi pandemi covid 19 yang sampai saat ini masih melanda, maka setiap kegiatan harus yang dirancang secara efektif dan efisien dengan lebih banyak menggunakan dukungan teknologi informasi.
- 2) Pelaksanaan program pembangunan keluarga pada tahun 2021 hampir 90 % ber-*tagging* Pro PN maka diperlukan koordinasi lebih intensif dengan lintas sektor dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sehingga kegiatan pembinaan, pendampingan dan penguatan terhadap beberapa kelompok kegiatan yang menjadi target Pro PN dapat dilaksanakan, guna menjaga keberlangsungan kegiatan kelompok.
- 3) Menetapkan anggaran untuk kegiatan yang prioritas dalam mencapai target kinerja tahun 2021
- 4) Memperluas kerja sama dan kolaborasi program/kegiatan dan anggaran dengan dinas/sector terkait, Perguruan Tinggi serta sektor swasta

## BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020, menyajikan informasi realisasi kinerja tahun 2020 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, disertai analisis capaian serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya sehingga dapat mencapai keberhasilan pencapaian program yang lebih tinggi dalam rangka evaluasi guna perbaikan di masa yang akan datang. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran program Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendukung pencapaian tujuan/sasaran strategis Renstra BKKBN periode tahun 2020.

### A. Simpulan

1. Capaian Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 yang masuk dalam kategori BAIK SEKALI {BIRU} dengan rentang pencapaian antara 105,73% s.d. 117,65% adalah :
  - 1) Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)
  - 2) Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR* 15-19)
  - 3) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
2. Capaian Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 yang masuk dalam kategori BAIK {HIJAU} dengan rentang pencapaian antara 92,08% s.d. 100% adalah :
  - 1) Angka Prevalensi kontrasepsi modern (*Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR*)
  - 2) Media Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) umur 25-49 tahun
  - 3) Keluarga yang memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK

- 4) Bina Keluarga Lansia yang melaksanakan 7 dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang
  - 5) Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu
3. Capaian Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020 yang masuk dalam kategori CUKUP {KUNING} dengan pencapaian 82,66% adalah Pemenuhan ketersediaan Alokasi di Faskes
4. Capaian Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020 yang masuk dalam kategori KURANG {MERAH} dengan pencapaian sebesar 42,51% adalah Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet Need*).

## **B. Langkah-Langkah ke Depan**

Berdasarkan capaian kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020, langkah-langkah yang perlu dilakukan ke depan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan revitalisasi KIE dan penggerakan Program kepada masyarakat dengan dukungan komitmen dan kebijakan dalam mempertimbangkan skema kegiatan yang berbasis Tehnologi Informasi dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB yang tepat sasaran;
2. Melakukan pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB;
3. Menajamkan segmentasi sasaran kegiatan program Bangga Kencana dan difokuskan pada wilayah wilayah dengan pencapaian *mCPR* rendah dan *Unmet Need* yang tinggi, melalui KIE dan pelayanan KB di daerah legok termasuk di desa wilayah Kampung KB;
4. Mengintensifkan pelayanan KB Bergerak di wilayah DTPK melalui Baksos pelayanan KB MKJP yang terintergrasi dengan pelayanan papsmear.

5. Mengintensifkan pembinaan program Bangga Kencana baik untuk wilayah Kampung KB maupun wilayah di luar Kampung KB untuk mendorong capaian Program Bangga Kencana dengan mengintensifkan pemanfaatan berbagai media dalam menyebarluaskan program Bangga Kencana di wilayah DIY.
6. Pelibatan generasi milenial menjadi penting di setiap kegiatan yang ada di kelompok kegiatan, oleh karena mobilitasnya yang tinggi dan maju dalam hal Tehnologi Informasi

# LAMPIRAN



# **RENCANA STRATEGIS**

PERWAKILAN BKKBN DIY TAHUN 2020 - 2024

**PERWAKILAN BKKBN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

## **TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERWAKILAN BKKBN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Visi BKKBN adalah **“terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong.”** Visi BKKBN mengandung pengertian :

- Keluarga berkualitas, yaitu tentram, mandiri dan bahagia. Untuk mencapai keluarga berkualitas angka kelahiran total (TFR) diturunkan menjadi 2,26 pada tahun 2020 sampai dengan 2,1 pada tahun 2024.
- Kebijakan pengendalian penduduk dilaksanakan untuk mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan menghasilkan Bonus Demografi. Pengendalian penduduk berkontribusi pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.
- Pengaturan kelahiran melalui berbagai kegiatan prioritas Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB KR) yang komprehensif dan pendewasaan usia perkawinan (PUP) yang merupakan salah satu upaya pokok dalam menurunkan TFR. Bidang KB KR meningkatkan kesehatan ibu dan anak guna membangun manusia berkualitas dan berdaya saing.
- Pembangunan keluarga yang holistic integratif sesuai siklus hidup sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas keluarga yang berketahanan dan berkarakter.

BKKBN mempunyai misi untuk mewujudkan visi tersebut, yaitu :

- Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang
- Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif
- Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup
- Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global
- Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi

- Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur

Tujuan BKKBN dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 yaitu :

- Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia
- Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

## **2.1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai dengan Perka BKKBN Nomor 82 Tahun 2011 (pasal 2), Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional di Bidang Pengendalian Penduduk, Penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
- Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di Bidang Pengendalian Penduduk, Penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
- Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di Bidang Pengendalian Penduduk, Penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
- Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, penggerakan hubungan antarlembaga, bina lini lapangan, serta pengelolaan data dan informasi di Bidang Pengendalian Penduduk, Penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

- Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di Bidang Pengendalian Penduduk, Penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
- Pelaksanaan tugas administrasi umum.
- Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.

## **2.2. Arah Kebijakan dan Strategi**

Arah kebijakan dan strategi Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta mengacu pada arah kebijakan BKKBN yang tertuang dalam Renstra BKKBN 2020-2024. Lima arah kebijakan dan strategi Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga melalui strategi:
  - Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga.
  - Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga.
  - Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
  - Peningkatan kemandirian ekonomi bagi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP khususnya MOP dan MOW, serta peserta KB mandiri di wilayah Kampung KB.
  - Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan.
  - Penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia
  - Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.
- b. Memperkuat pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk melalui strategi:
  - Pengembangan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK).
  - Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk.

- Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan.
  - Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan.
- c. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran melalui strategi:
- Penguatan kapasitas akses dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR.
  - Penguatan kemitraan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan KBKR.
  - Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR di wilayah dan sasaran khusus.
  - Peningkatan KB pria.
  - Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD), dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP).
  - Peningkatan kemandirian PUS dalam ber-KB.
- d. Meningkatkan advokasi dan penggerakan Program Bangga Kencana sesuai karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
- Peningkatan penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah.
  - Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub-PPKBD.
- e. Memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi, dengan strategi:
- Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi Program Bangga Kencana berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan wilayah.
  - Pengembangan *smart technology/smart program* untuk memperkuat pengelolaan Program Bangga Kencana.

Agar operasionalisasi Program Bangga Kencana dapat berjalan dengan baik, perlu mendapatkan dukungan dari :

- a. Aspek Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Program Bangga Kencana Bidang Pelatihan dan Pengembangan bertugas untuk meningkatkan kualitas SDM, memanfaatkan hasil penelitian, dan pengembangan inovasi, yang dapat diwujudkan melalui strategi:

- Peningkatan kualitas SDM Program Bangga Kencana melalui pendidikan dan pelatihan yang terstandarisasi berbasis teknologi informasi.
- Peningkatan kualitas, pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan inovasi Program Bangga Kencana sebagai input/masukan bagi rumusan kebijakan.

b. Aspek Dukungan Manajemen

Sekretariat memberikan dukungan manajemen terhadap Program Bangga Kencana melalui strategi:

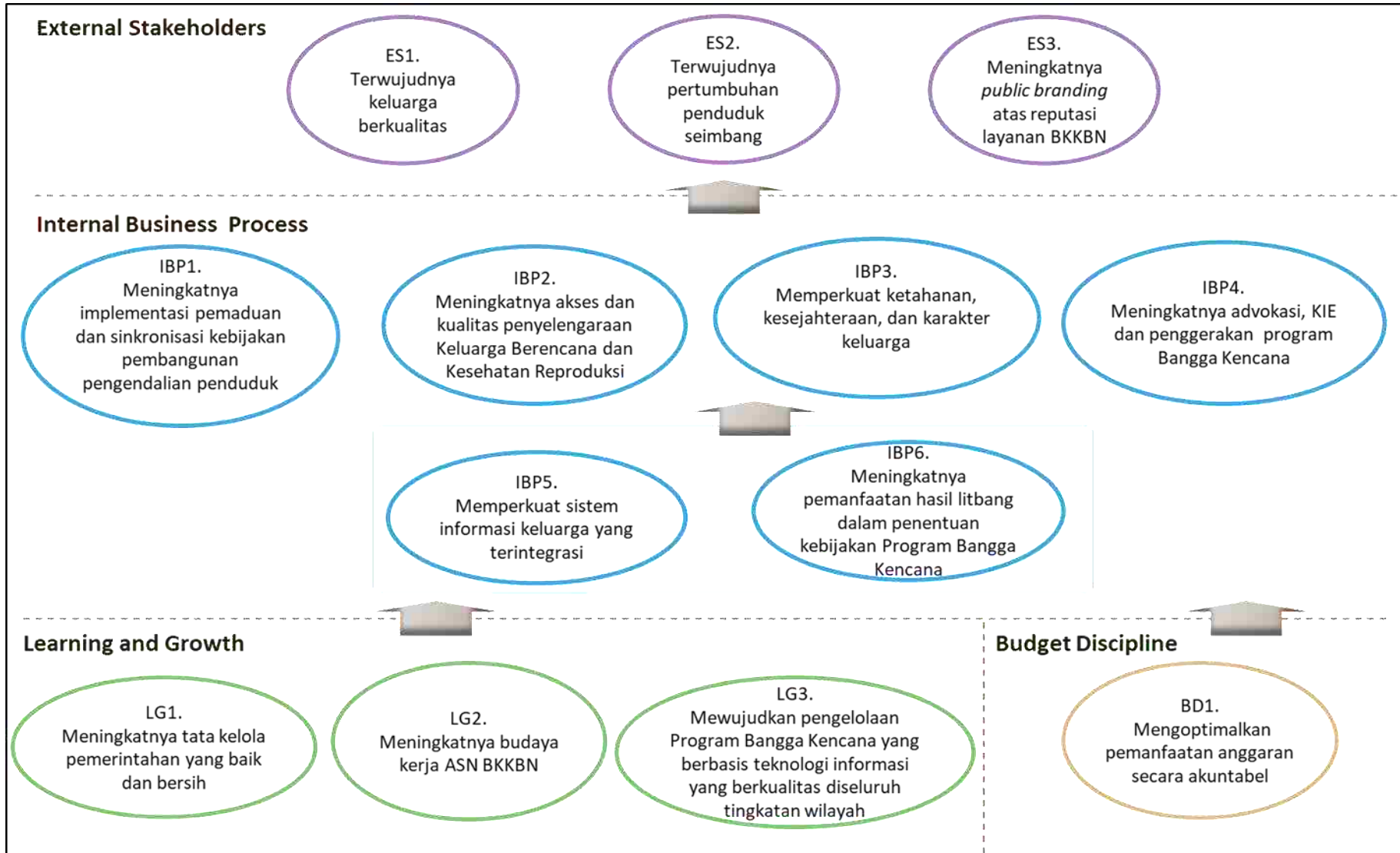
- Sosialisasi landasan hukum kependudukan dan KB, serta pengelolaan organisasi dan tatalaksana.
- Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan BMN.
- Penguatan perencanaan program dan anggaran.
- Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM aparatur.
- Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan yang berkualitas.

c. Aspek Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan Program Bangga Kencana guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui strategi:

- Pembinaan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundangan, ekonomis, efektif, dan efisien.
- Pembinaan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) secara efektif dan efisien di Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Monitoring terhadap kebijakan Kepala BKKBN dan Kepala Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta agar dilaksanakan secara konsisten.
- Pemantauan pencapaian sasaran strategis Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta secara efektif dan efisien.

# Peta Strategi Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta



No	Program/ Kegiatan	Dampak (Impact)/ Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/ Keluaran (Output)	Indikator Dampak/ Indikator Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Sasaran Kegiatan/ Indikator Output	Target Per-Provinsi					Perkiraan Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Status Prioritas						
				Satuan	DI Yogyakarta					2020	2021	2022	2023			2024					
					2020	2021	2022	2023	2024												
I	Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	III Sasaran Program Bangsa Kencana : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Program Bangsa Kencana dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, serta mewujudkan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	III Indikator Sasaran Program Bangsa Kencana :								14.137,46	14.580,81	15.475,84	16.425,45	17.431,68	Program TEKNIS (Bangga Kencana)					
			1	Angka kelahiran total ( <i>Total Fertility Rate /TFR</i> ) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata anak per Wanita	1,92	1,9	1,87	1,85	1,83											
			2	Angka prevalensi kontrasepsi modern ( <i>Modern Contraceptive Prevalence Rate /mCPR</i> )	Persen	62,01	62,4	62,79	63,17	63,67											
			3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>Unmet Need</i> )	Persen	5,74	5,62	5,5	5,38	5,29											
			4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun ( <i>Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19</i> )	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	17	16	14	13	12											
			5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks (Skala 0-100)	61,43	63,07	65,36	67,66	69,95											
			6	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun	23	23	23	23	23											
			7	Persentase SDM Aparatur dan Tenaga Program yang Kompeten	Persen	30	45	65	75	80											
			8	Persentase Kerjasama Internasional Bangsa Kencana yang diimplementasikan	Persen	0	0	0	0	0											
			9	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Penentuan Kebijakan Program Bangsa Kencana	Persen	75	78	81	84	87											
22	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi	F.1 Sasaran Kegiatan di 33 BKKBN Provinsi (33 unit Eselon II Provinsi):  Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana diseluruh tingkatan wilayah	F.1 Indikator Kinerja Kegiatan di 33 BKKBN Provinsi (33 unit Eselon II Provinsi):													Program Bangsa Kencana di 33 BKKBN					
			F.1.1 Bidang KSPK Perwakilan BKKBN Provinsi																		
			1	Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	Keluarga	43.856	44.456	45.056	45.656	46.256											K/L
			2	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan GenRe	PIK Remaja dan BKR	279 PIK Remaja & 139 BKR	281 PIK Remaja & 141 BKR	292 PIK Remaja & 151 BKR	304 PIK Remaja & 161 BKR	316 PIK Remaja & 172 BKR											RPJMN
			3	Jumlah Kelompok BKL Yang Melaksanakan 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia	Kelompok BKL	143	143	143	143	143											RPJMN
			4	Jumlah Keluarga yang mengakses PPKS	Keluarga	894	910	926	942	959											K/L
			5	Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga	Persen	60,00	70	80	90	100											K/L
				(1) Keluaran/ Output: Pembinaan Pembangunan keluarga di seluruh tingkatan wilayah	Kab/Kota	5	5	5	5	5											
				1.1 Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan pengasuhan dalam rangka pembentukan karakter anak	Kab/Kota	60	70	80	90	100											
				(2) Keluaran/ Output: Promosi 1000 HPK pada keluarga yang memiliki baduta	Keluarga	51.768	51.768	51.768	51.768	51.768											
	2.1 Jumlah keluarga yang memiliki baduta yang terpapar promosi 1000 HPK	Keluarga	51.768	51.768	51.768	51.768	51.768									Bidang KSPK Provinsi	RPJMN				



No	Program/ Kegiatan	Dampak (Impact)/ Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/ Keluaran (Output)	Indikator Dampak/ Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Sasaran Kegiatan/ Indikator Output	Target Per-Provinsi						Perkiraan Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisa- si Pelaksa- na	Status Prioritas	
				Satuan	DI Yogyakarta						2020	2021	2022	2023			2024
					279 PIK Remaja & 139 BKR	281 PIK Remaja & 141 BKR	292 PIK Remaja & 151 BKR	304 PIK Remaja & 161 BKR	316 PIK Remaja & 172 BKR								
			(3) Keluaran/ Output: Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	PIK Remaja dan BKR	279 PIK Remaja & 139 BKR	281 PIK Remaja & 141 BKR	292 PIK Remaja & 151 BKR	304 PIK Remaja & 161 BKR	316 PIK Remaja & 172 BKR								
			3.1 Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR)	Persen	60%	70%	80%	90%	100%								
			3.2 Jumlah PIK Remaja dan BKR yang melaksanakan edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu	PIK Remaja dan BKR	279 PIK Remaja & 139 BKR	281 PIK Remaja & 141 BKR	292 PIK Remaja & 151 BKR	304 PIK Remaja & 161 BKR	316 PIK Remaja & 172 BKR								
			(4) Keluaran/ Output: Peningkatan Pelayanan Ramah Lansia Melalui 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia	Kelompok BKL	143	143	143	143	143								
			4.1 Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan dalam pelaksanaan Bina Keluarga Lansia (BKL)	Persen	60%	70%	80%	90%	100%								
			4.2 Persentase PPKS yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi ketahanan keluarga rentan	Persen	60%	70%	80%	90%	100%								
			(5) Keluaran/ Output: keluarga yang mengikuti kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga	Keluarga	132.250	132.911	133.576	134.244	134.915								
			5.1 Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga	Persen	60	70	80	90	100								
			<b>F.1.2 Bidang DALDUK Perwakilan BKKBN Provinsi</b>														
			1 Persentase Pemerintah Daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah	Pemerintah Daerah	1 prov & 5 kab/kota	1 prov & 5 kab/kota	1 prov & 5 kab/kota	1 prov & 5 kab/kota	1 prov & 5 kab/kota								K/L
			2 Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB	Rumah Data Kependudukan Paripurna di Kampung KB	48	58	65	72	77								K/L
			3 Persentase Kelompok Kerja Bangsa Kencana Provinsi dan Kab/Kota yang efektif	Pemda Provinsi Kab/Kota	1 prov & 1 kab/kota	1 prov & 1 kab/kota	1 prov & 2 kab/kota	1 prov & 2 kab/kota	1 prov & 3 kab/kota								K/L
			4 Cakupan implementasi pendidikan kependudukan di provinsi	Jalur (formal, nonformal, dan informal)	3	3	3	3	3								K/L
			5 Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk	Pemerintah Daerah	1 prov & 1 kab/kota	1 prov & 1 kab/kota	1 prov & 2 kab/kota	1 prov & 2 kab/kota	1 prov & 3 kab/kota								K/L
			6 Persentase Kampung KB yang melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan	Kampung KB	155,0	156,0	157,0	158,0	159,0								K/L
			Keluaran/ Output: Sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	Pemda Kab/Kota	1 kab/kota	1 kab/kota	2 kab/kota	2 kab/kota	3 kab/kota								
			1.1 Cakupan pembinaan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Penyusunan <i>Grand Design</i> , Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)	Provinsi, Kab/Kota	1 prov & 5 kab/kota	1 prov & 5 kab/kota	1 prov & 5 kab/kota	1 prov & 5 kab/kota	1 prov & 5 kab/kota								
			1.2 Cakupan koordinasi integrasi indikator Program Bangsa Kencana dalam kebijakan pembangunan daerah	Provinsi, Kab/Kota	1 prov & 5 kab/kota	1 prov & 5 kab/kota	1 prov & 5 kab/kota	1 prov & 5 kab/kota	1 prov & 5 kab/kota								Bidang Pengendalian Penduduk

No	Program/ Kegiatan	Dampak (Impact)/ Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/ Keluaran (Output)	Indikator Dampak/ Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Sasaran Kegiatan/ Indikator Output	Target Per-Provinsi					Perkiraan Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisa- si Pelaksa- na Provinsi	Status Prioritas		
				Satuan	DI Yogyakarta					2020	2021	2022	2023			2024	
			1.3	Cakupan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang telah terbentuk dan diregistrasi	Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang telah diregistrasi	77	82	86	91	96							
			1.4	Cakupan fasilitasi pengembangan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	58	67	77	86	96							
			1.5	Cakupan fasilitasi penggerakan Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/Kota	Pemda Provinsi Kab/Kota	1 prov	1 prov	1 prov	1 prov	1 prov							
			1.6	Jumlah fasilitasi ke pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam pengimplementasian kerjasama pendidikan kependudukan melalui 3 jalur pendidikan yaitu formal, nonformal, dan informal	Pemda Provinsi, Kab/Kota	1 prov & 5 kab/kota	1 prov & 5 kab/kota	1 prov & 5 kab/kota	1 prov & 5 kab/kota	1 prov & 5 kab/kota							
			1.7	Persentase Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk	Pemerintah Daerah	1 prov & 1 kab/kota	1 prov & 1 kab/kota	1 prov & 2 kab/kota	1 prov & 2 kab/kota	1 prov & 3 kab/kota							
			1.8	Persentase Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB bersama mitra kerja	Pemerintah Daerah	1 prov & 3 kab/kota	1 prov & 3 kab/kota	1 prov & 4 kab/kota	1 prov & 4 kab/kota	1 prov & 5 kab/kota							
			1.9	Persentase mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB bersama mitra kerja	Mitra Kerja	3	6	10	13	16							
			<b>F.1.3</b>	<b>Bidang KBKR Perwakilan BKKBN Provinsi</b>													
			1	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Persen	58,87	65,4	71,93	78,47	85							K/L
			2	Indeks Informasi Metode KB ( <i>Method Information Index /MI</i> )	Indeks (Skala 0-100)	71,0	72,9	74,7	76,5	78,4							K/L
			3	Persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota dengan kesertaan rendah	Persen peserta KB	56,85	57,01	57,17	57,33	57,49							K/L
			4	Persentase Kehamilan Yang Tidak Diinginkan	Persen	24,1	23,7	23,3	22,8	22,3							K/L
			5	Persentase Pelayanan KB Pascapersalinan	Persen	18,4	21,4	24,4	27,4	29,4							K/L
				(1) Keluaran/ Output: Kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan	Persen	38,32	46,12	53,92	61,72	69,52							
			1.1	Persentase rumah sakit yang pelayanan KB nya meningkat	Persen	10	20	30	40	50							
			1.2	Jumlah Tenaga Pelayanan mendapatkan fasilitasi kompetensi (Kumulatif)	Tenaga Kesehatan (Kumulatif)	188	219	250	281	313							Bidang KBKR Provinsi
			1.3	Peningkatan Jumlah Provider Vasektomi yang Kompeten	Provider	3	4	5	6	7							

No	Program/ Kegiatan	Dampak (Impact)/ Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/ Keluaran (Output)	Indikator Dampak/ Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Sasaran Kegiatan/ Indikator Output	Target Per-Provinsi					Perkiraan Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisa- si Pelaksa- na	Status Prioritas		
				Satuan	DI Yogyakarta					2020	2021	2022	2023			2024	
					3 Frek/tahun/kab/Ko- ta	4 frek/tahun/kab/Ko- ta	4 frek/tahun/kab/Ko- ta	5 frek/tahun/kab/Ko- ta	5 frek/tahun/kab/Ko- ta								
			1.4	Jumlah Pelayanan KB dan KR Bergerak/Bakti Sosial di Wilayah dan Sasaran Khusus	Gerak	3	4	4	5	5							
			1.5	Persentase PUS dengan kehamilan risiko tinggi (4 Terlalu)	Persen	51,60	49,60	47,60	45,60	43,60							
			1.6	Jumlah kab/ kota dengan PKB/PLKB yang puskesmas di wilayahnya melayani KB Pascapersalinan	kab/kota	1	2	3	4	5							
			(2) Keluaran/ Output: Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Faskes		Persen	62,00	65,00	68,00	72,00	75,00							
			1.1	Persentase Faskes teregister yang mendapat ketersediaan Alokasi MKJP	Persen	75,60	78,87	82,14	85,41	88,68							
			<b>F.1.4 Bidang ADPIN Perwakilan BKKBN Provinsi</b>														
			1	Persentase <i>stakeholders</i> /pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program Bangsa Kencana	Stekaholder/ Mitra	35,6	37,6	39,4	41,6	43,5							K/L
			2	Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangsa Kencana	Persen	55	60	65	70	75							K/L
			3	Persentase Penyuluh KB yang berkinerja baik	Persen	65,0	70,0	75,0	80,0	90,0							K/L
			4	Jumlah pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	Kab/Kota	2	5	5	5	5							K/L
			5	Persentase cakupan perangkat dan jaringan sistem Teknologi dan Informasi di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persen Wilayah Prov dan Kab/Kota	100	100	100	100	100							K/L
			Keluaran/Output: Penggerakkan stakeholder mitra kerja serta perubahan sikap dan perilaku masyarakat berdasarkan data dan informasi yang berbasis IT dalam Program Bangsa Kencana		Layanan	34	34	34	34	34							
			1.1	Persentase Mou/PKS yang di tindaklanjuti unit kerja di BKKBN	MOU/PKS (kumulatif)	28,0	30,0	32,0	34,0	36,0							
			1.2	Persentase Kelembagaan Pengendalian Penduduk dan KB di Kab/Kota yang berbentuk Dinas utuh	Dinas utuh (non kumulatif)	37,0	39,0	41,0	43,0	45,0							
			1.3	Persentase penyebaran materi KIE Program Bangsa Kencana sesuai segmentasi, sasaran dan wilayah	Persen	30% (2 Kab/Kota)	40% (2 Kab/Kota)	50% (3 Kab/Kota)	60% (3 Kab/Kota)	70% (4 Kab/Kota)							
			1.4	Persentase penyebaran materi KIE Program Bangsa Kencana dalam rangka penurunan unmet need	Persen	50% (3 Kab/Kota)	60% (3 Kab/ Kota)	70% (4 Kab/ Kota)	80% (4 Kab/Kota)	90% (5 Kab/Kota)							Bidang ADPIN Provinsi
			1.5	Jumlah pemanfaatan sarana dan media KIE Program Bangsa Kencana	kab/kota	3	3	4	4	5							
			1.6	Persentase Tim Advokasi Terpadu Lintas Sektor Program Bangsa Kencana yang melakukan advokasi	persen	30% Tim Advokasi Provinsi dan Kab/Kota (3 Tim dari 6 Provinsi & Kab Kota)	40% Tim Advokasi Provinsi dan Kab/Kota (3 Tim dari 6 Provinsi & Kab Kota)	50% Tim Advokasi Provinsi dan Kab/Kota (4 Tim dari 6 Provinsi dan Kab Kota)	60% Tim Advokasi Provinsi dan Kab/Kota (4 Tim dari 6 Provinsi dan Kab Kota)	70% Tim Advokasi Provinsi dan Kab/Kota (5 Tim dari 6 Provinsi dan Kab Kota)							
			1.7	Frekuensi pembinaan Kinerja Penyuluh KB dalam pelaksanaan tupoksi dalam mengelola Prgram Bangsa Kencana di Wilayah Binaan	Frekuensi Kegiatan	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0							



No	Program/ Kegiatan	Dampak (Impact)/ Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/ Keluaran (Output)	Indikator Dampak/ Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Sasaran Kegiatan/ Indikator Output	Target Per-Provinsi					Perkiraan Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisa- sina Pelaksa- na	Status Prioritas				
				Satuan	DI Yogyakarta					2020	2021	2022	2023			2024			
					Unit Kerja	(merupakan target nasional, belum dapat didistribusikan untuk masing-masing prov)	(merupakan target nasional, belum dapat didistribusikan untuk masing-masing prov)	(merupakan target nasional, belum dapat didistribusikan untuk masing-masing prov)	(merupakan target nasional, belum dapat didistribusikan untuk masing-masing prov)								(merupakan target nasional, belum dapat didistribusikan untuk masing-masing prov)		
31	Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi	I.1 Sasaran Kegiatan di 33 BKKBN Provinsi (33 unit Eselon II Provinsi):	I.1 Indikator Kinerja Kegiatan di 33 BKKBN Provinsi (33 unit Eselon II Provinsi):																
			I.1.1 Sekretariat Perwakilan BKKBN Provinsi																
		Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan manajemen dalam pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di Provinsi	1 Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	Bulan	12	12	12	12	12						K/L				
			(1) Keluaran/ Output: Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	1	1										
			1.1 Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala)	Bulan	12	12	12	12	12										
			(2) Keluaran/ Output: Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1										
			2.1 Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	Persen	100	100	100	100	100						Sekretariat Provinsi				
			2.2 Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor	Persen	100	100	100	100	100										
			(3) Keluaran/ Output: Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1										
			3.1 Jumlah pengadaan kendaraan bermotor	Unit	(sesuai telaah perkiraan kebutuhan masing-masing provinsi, dokumen pendukung yang tersedia, serta memperhatikan RKBMN)														
			3.2 Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	Unit															
			3.3 Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	Unit															
		3.4 Luas pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	m <sup>2</sup>																
			I.1.2 Pengawasan Perwakilan BKKBN Provinsi																
		Sasaran Kegiatan: Mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi	1 Indeks ZI WBK	Indeks	75,0	77,0	79,0	82,0	85,0						K/L				
			Keluaran/ Output: Layanan Audit Internal	Layanan	1	1	1	1	1										
			1.1 Persentase Temuan Eksternal dan Internal yang telah Ditindaklanjuti dan Dinyatakan "Selesai"	Temuan yang ditindaklanjuti dan dinyatakan "Selesai"	TDP 100% TPS 70%	TDP 100% TPS 75%	TDP 100% TPS 80%	TDP 100% TPS 85%	TDP 100% TPS 90%						Pengawasan Provinsi				



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Ukik Kusuma Kurniawan  
**Jabatan** : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama** : Hasto Wardoyo  
**Jabatan** : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja dapat berakibat pada *reward* dan *punishment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Hasto Wardoyo

Yogyakarta, 1 September 2020  
Pihak Pertama,

Ukik Kusuma Kurniawan

PERWAKILAN BKKBN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	SASARAN KINERJA	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
1	Menurunnya angka kelahiran total	1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	1.92
2	Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern	1	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR)	62.01
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi	1	Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (Unmet Need)	5.74
4	Menurunnya angka kelahiran remaja	1	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	17.00
5	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	61,43
6	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan	1	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) umur 25-49 tahun	23.00
7	Tersedianya Alokasi Fasilitas Kesehatan	1	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Faskes	323
8	Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Baduta tentang 1000 HPK	1	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	51,768
9	Meningkatnya Pelayanan Ramah Lansia Melalui 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia	1	Bina keluarga lansia yang melaksanakan 7 dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang	143
10	Meningkatnya pengetahuan Remaja Putri sebagai calon ibu tentang edukasi Kespro dan Gizi melalui peran Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dan Bina Ketahanan Remaja (BKR)	1	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	418

NO	KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	
1	Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1	Sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	336,415,000
		2	Kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan	605,888,000
		3	Pembinaan Pembangunan keluarga di seluruh tingkatan wilayah	316,323,000
		4	Penggerakkan stakeholder mitra kerja serta perubahan sikap dan perilaku masyarakat berdasarkan data dan informasi yang berbasis IT dalam Program KKBPK	907,154,000
		5	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	984,178,000
		6	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	150,000,000
		7	Layanan Perkantoran	48,714,021,000
		8	Layanan Audit Internal	63,395,000
		9	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	194,250,000
		10	Layanan Penelitian dan Pengembangan	169,068,000
2	Proyek Prioritas Nasional	11	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Faskes	3,138,990,000
		12	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	350,000,000
		13	Peningkatan Pelayanan Ramah Lansia Melalui 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia	137,500,000
		14	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	1,298,417,000
		<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>57,365,599,000</b>

Kepala Badan Kependudukan  
Dan Keluarga Berencana Nasional,



Hasto Wardoyo

Yogyakarta, 1 September 2020  
Kepala Perwakilan BKKBN  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Ukik Kusuma Kurniawan

LAMPIRAN DEFINISI OPERASIONAL

Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan Definisi Umum	Rumus Perhitungan Indikator Kinerja	Periode Waktu Pengukuran Indikator Kinerja	Sumber Data Pengukuran Indikator Kinerja	Keterangan	
Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi	1	Menurunnya angka kelahiran total	1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata anak per Wanita 1. Rata – rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (15-49 tahun) sumber: BPS, Sistem Informasi Rujukan Statistik (SiRuSa) 2. Jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya jika dapat melampaui masa melahirkan anak dengan mengikuti pola ASFR saat ini (SDKI 2007, pp.49)	Rata – rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (15-49 tahun) $TFR = 5 \times \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$ i : Kelompok usia 15-19 tahun, 20-24 tahun,...., 45-49 tahun; ASFR <sub>i</sub> : ASFR untuk wanita kelompok usia ke-i	Tahunan	Pendataan Keluarga/SDKI	Pendataan Keluarga dan SDKI dilaksanakan 5 tahunan (Updating PBDKI setiap tahun)
	2	Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern	1	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen Persentase wanita kawin usia 15-49 tahun yang menggunakan kontrasepsi modern pada saat pengamatan. Adapun kontrasepsi modern terdiri dari peserta KB IUD, Implant, MOP, MOW, Suntik, Pil, Kondom dan MAL	Banyaknya peserta KB aktif modern dibagi dengan banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS). $mCPR = \frac{\sum PA\ Modern}{\sum PUS} \times 100\%$ Keterangan PA Modern : Peserta KB Aktif modern PUS : Pasangan Usia Subur usia 15 – 49 tahun	Tahunan/ Bulanan	Pendataan Keluarga/SDKI Statistik Rutin	Pendataan Keluarga dan SDKI dilaksanakan 5 tahunan (Updating PBDKI setiap tahun)
	3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi	1	Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (Unmet Need)	Persen 1. Persentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara KB (Statistik Rutin) 2. Wanita usia subur yang tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi namun menginginkan penundaan kehamilan (penjarangan) atau berhenti sama sekali (pembatasan) SDKI 2007, pp.98)	Formula Statistik Rutin: $\frac{PUS\ Bukan\ Peserta\ KB}{(IAT+TIAL)} \times 100\%$ Total PUS Keterangan IAT : Ingin Anak Ditunda (Penjarangan) TIAL : Tidak Ingin Anak Lagi (Pembatasan) Total PUS : Jumlah Seluruh PUS  Formula SDKI : U : U <sub>L</sub> + U <sub>S</sub> U : Total Unmet Need U <sub>L</sub> : Persentase WUS yang tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi namun menginginkan penundaan kehamilan (penjarangan) U <sub>S</sub> : Persentase WUS yang tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi namun menginginkan berhenti sama sekali (pembatasan)	Tahunan/ Bulanan	Pendataan Keluarga/SDKI Statistik Rutin	Pendataan Keluarga dan SDKI dilaksanakan 5 tahunan (Updating PBDKI setiap tahun)
	4	Menurunnya angka kelahiran remaja	1	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun Angka kelahiran selama setahun per 1000 wanita pada kelompok umur 15-19 Tahun. Angka ini dapat digunakan untuk membedakan fertilitas umur muda	Formula ASFR 15-19 Tahun : $ASFR_{15-19} = \frac{K_{15-19}}{P_{15-19}} \times 1000$ P <sub>15-19</sub> : jumlah perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun; K <sub>15-19</sub> : jumlah kelahiran pada kelompok umur 15-19 tahun	Tahunan	Pendataan Keluarga/SDKI	Pendataan Keluarga dan SDKI dilaksanakan 5 tahunan (Updating PBDKI setiap tahun)
	5	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks (Skala 0-100) Pengukuran perbandingan dari kualitas keluarga untuk semua wilayah di Indonesia, serta mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga maju, berkembang atau rentan	Nilai Komposit dari 3 dimensi dengan mempertimbangkan bobot tertentu, yaitu (a) Dimensi Ketentraman dengan indikator antara lain (1) kegiatan ibadah; (2) legalitas keluarga; (3) jaminan kesehatan; (4) jaminan keuangan; dan (5) keharmonisan keluarga; (b) Dimensi Kemandirian dengan indikator antara lain (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) keberlangsungan pendidikan; (3) kesehatan keluarga; (4) akses informasi; (c) Dimensi Kebahagiaan dengan indikator antara lain (1) interaksi keluarga; (2) interaksi sosial  Formula iBangga: iBangga = 1/3 ( Indeks ketentraman + Indeks kemandirian + Indeks kebahagiaan ) x 100	Tahunan	Pendataan Keluarga/ Susenas	Pendataan Keluarga dilaksanakan 5 tahunan (Updating PBDKI setiap tahun)



Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan Definisi Umum	Rumus Perhitungan Indikator Kinerja	Periode Waktu Pengukuran Indikator Kinerja	Sumber Data Pengukuran Indikator Kinerja	Keterangan		
	6	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan	1	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) umur 25-49 tahun	Tahun	Umur dimana dari semua wanita pada kelompok umur 10-49 tahun sudah kawin	Umur dimana median atau 50 persen dari semua wanita kelompok umur 10-49 tahun yang sudah kawin	Tahunan	Pendataan Keluarga/SDKI	Pendataan Keluarga dan SDKI dilaksanakan 5 tahunan (Updating PBDKI setiap tahun)
						$M_d = X_1 + \left( \frac{F(X_0) - F(X_1)}{F(X_2) - F(X_1)} \right) i$ <p>Keterangan:            • Md : median;            • X1 : batas bawah UKP untuk kelompok dimana median terletak;            • F(x0): 50% dari total observasi (n);            • F(x1): Frekuensi kumulatif kelas di bawah kelas median;            • F(x2): Frekuensi kumulatif kelas di atas kelas median;            • i: Interval umur.</p>				
	7	Tersedianya Alokasi di Fasilitas Kesehatan	1	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Kesehatan (Faskes)	Pemenuhan kebutuhan alokasi di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan telah terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen BKKBN	Jumlah faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan telah terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen BKKBN yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan alokasi	Bulanan/ Triwulanan	SIGA; E-Monev Bappenas; SMART Kemenkeu	
	8	Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Baduta tentang 1000 HPK	1	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	keluarga	Keluarga pada lokus prioritas yang memiliki anak usia 0 -2 tahun dan ibu hamil yang mendapatkan promosi dan KIE pengasuhan 1000 HPK dalam rangka pencegahan stunting	Σ keluarga pada lokus prioritas yang memiliki anak usia 0 -2 tahun dan ibu hamil yang mendapatkan promosi dan KIE pengasuhan 1000 HPK dalam rangka pencegahan stunting	Bulanan/ Tahunan	SIGA; E-Monev Bappenas; SMART Kemenkeu	
	9	Meningkatnya Pelayanan Ramah Lansia Melalui 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia	1	Bina keluarga lansia yang melaksanakan 7 dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang	Kelompok	Kelompok BKL Yang Melaksanakan 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia yang terdiri dari dimensi spiritual, intelektual, hobi, kesehatan fisik, vokasional, sosial dan lingkungan	Jumlah Kelompok BKL Yang Melaksanakan 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia dan dilaporkan melalui aplikasi SIGA secara rutin	Bulanan	SIGA; E-Monev Bappenas; SMART Kemenkeu	
	10	Meningkatnya pengetahuan Remaja Putri sebagai calon ibu tentang edukasi Kespro dan Gizi melalui peran Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dan Bina Ketahanan Remaja (BKR)	1	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	Poktan PIK Remaja dan BKR	PIK Remaja dan BKR yang mendapatkan pembinaan kespro dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu	Σ PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	Bulanan/ Tahunan	SIGA; E-Monev Bappenas; SMART Kemenkeu	

STRUKTUR PROGRAM DAN ANGGARAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI TA 2020

Perwakilan BKKBN Provinsi : DI Yogyakarta

No.	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / IKK / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
		Target	Satuan		
	<b>PAGU PERWAKILAN BKKBN PROVINSI</b>			<b>65.225.546.300</b>	
I	<b>Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga</b>			<b>13.364.181.300</b>	
3331	<b>Pengelolaan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga di Provinsi</b>			<b>13.364.181.300</b>	
3331.075	<b>Sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk</b>	5	Wilayah	<b>718.500.000</b>	
	<b>3331.075.001 Tanpa Sub Output</b>				
18.1	<b>Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/Parameter dan Proyeksi Penduduk)</b>	100	%	<b>153.500.000</b>	
221	<b>Sinkronisasi kebijakan dan strategi penetapan perencanaan pengendalian penduduk</b>	5	Kab/kota	<b>108.000.000</b>	
	a Sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)				
	b Pelaksanaan fasilitasi penyusunan GDPK tingkat provinsi/kabupaten/kota				
	c <u>Fasilitasi penguatan Kampung KB dengan lintas sektor dan mitra kerja</u>				
	d <u>Advokasi pengintegrasian indikator program KKBPK kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah kebijakan pembangunan kependudukan</u>				
222	<b>Penetapan profil (parameter dan proyeksi) penduduk</b>	4	dokumen	<b>45.500.000</b>	
	a <u>Penyusunan Profil Kampung KB Percontohan</u>				100 % Kampung KB Percontohan
	b <u>Fasilitasi pembentukan dan pembinaan Rumah Data Kependudukan</u>				
	c Fasilitasi penghitungan proyeksi parameter kependudukan dan penyusunan profil Program KKBPK				
	d Diseminasi data profil (parameter & proyeksi) program KKBPK tk. Provinsi dan kab/kota dalam perencanaan pembangunan daerah				
	e Evaluasi pelaksanaan Kampung KB				
18.2	<b>Persentase Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan</b>	110	Kab/Kota	<b>268.750.000</b>	
223	<b>Internalisasi Kebijakan Pengendalian dampak kependudukan di Kabupaten/ Kota</b>	1	model	<b>268.750.000</b>	
	a Workshop Perumusan Isu tentang Dampak Pengendalian Penduduk di Provinsi				
	b <u>Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan di Kabupaten/Kota (Rencana aksi dan intervensi solusi strategis)</u>				
	c Sosialisasi Penyediaan Informasi Peringatan Dini Dampak Kependudukan untuk OPD Kab/Kota				
	d Seminar Hasil Analisis Dampak Kependudukan di Tingkat Provinsi				
	e <u>Pembinaan dan Pengembangan Center of Excellent (CoE) Pengelolaan Kampung KB</u>				
18.3	<b>Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)</b>	34	Provinsi	<b>184.500.000</b>	
224	<b>Implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)</b>	3	Jalur Pendidikan (Formal, Nonformal&Informal)	<b>184.500.000</b>	
	a <u>Sosialisasi dan fasilitasi Pedoman Umum/Juklak kepada Pemda (OPD KKB) dan petugas KKBPK dan fasilitasi pembentukan pendidikan kependudukan Formal, Nonformal dan Informal</u>				
	b Pembentukan percontohan pelaksanaan pendidikan kependudukan (satuan pendidikan/formal)				
	c Pembentukan percontohan pendidikan kependudukan jalur nonformal dan informal				
	d Penggandaan Materi, Pedoman Umum/Juklak				
	e Pengembangan materi sesuai Isu lokal				
	f Pelaksanaan Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK)				
18.4	<b>Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk</b>	34	Provinsi	<b>111.750.000</b>	
225	<b>Peningkatan kemitraan dalam perencanaan pengendalian penduduk</b>	6	Provinsi dan Kab/Kota	<b>39.000.000</b>	
	a Fasilitasi dan koordinasi mitra kerja dalam pertemuan nasional Program KKBPK				
	b Penguatan Lintas Sektor dan advokasi Pengelola Pengendalian Kependudukan Tingkat Provinsi dan Kab/kota				
	c <u>Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Bidang Pengendalian Penduduk</u>				
226	<b>Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Penduduk</b>	5	Kab/Kota	<b>72.750.000</b>	
	a <u>Penguatan dan Bimbingan Teknis Program KKBPK di Kampung KB</u>				
	b Monitoring dan evaluasi terpadu pelaksanaan program pengendalian penduduk				
3331.076	<b>Kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan</b>	31.590.176	Peserta KB	<b>822.088.900</b>	Target Kaltim termasuk Kaltara
	<b>3331.076.002 Tanpa Sub Output</b>				
18.5	<b>Jumlah pergerakan pelayanan KB MKJP</b>	182	Peserta KB	<b>260.524.900</b>	
230	<b>Penggerakan dan pemantapan kesertaan ber-KB MKJP</b>	182	Peserta KB	<b>256.524.900</b>	
	a MOP	89			
	b MOW	93			
	c IUD	-			
	d IMPLANT	-			
231	<b>Pelayanan Pencabutan Implant</b>	2	Kasus	<b>4.000.000</b>	
	a Pelayanan pencabutan implant	-			
	b Ayoman Komplikasi/kegagalan	2			

No.	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / IKK / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
		Target	Satuan		
18.6	Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus	3	Frek/Th/Kab	144.714.000	
232	Peningkatan kualitas penggerakan pelayanan KBKR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (237 kab/kota dengan kesertaan rendah), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus	3	Gerak	144.714.000	
a	<u>Pelayanan KB bergerak (mobile) di Wilayah Galciltas dengan mitra terkait</u>				
b	Pelayanan KB bergerak (mobile) di wilayah miskin perkotaan dengan mitra terkait				
c	Pendampingan pengelola program KB dalam pelayanan KB Pria bersama mitra kerja				
d	Forum koordinasi peningkatan kemitraan dalam penggarapan KBKR di Wilayah Galciltas, Miskin Perkotaan, dan sasaran Khusus (KB Pria) Tk. Prov dan Kab/Kota				
e	Penguatan Penyediaan 1 Tim Vasektomi di tiap kabupaten dan kota				
f	Penguatan Kapasitas Motivator KB Pria bersama Mitra Kerja				
g	Pemantapan tim pelayanan KB Bergerak				
h	Penguatan Program KBKR di wilayah dan sasaran khusus bersama mitra kerja (PPKT,Perbatasan, Kumuh Miskin, DAS, Transmigrasi, wilayah bencana dll)				
18.7	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	85%	Faskes	218.600.000	-
233	Faskes KB (pemerintah dan swasta) yang memberikan pelayanan KB sesuai dengan SOP dan kesehatan reproduksi	323	Faskes	218.600.000	
a	<u>Penguatan faskes pemerintah, faskes swasta, dan peran UKBM dalam peningkatan pelayanan KB MKJP</u>				
b	<u>Workshop perhitungan rencana distribusi alokon di faskes</u>				
c	Pelaksanaan Pre Service Training				33 Provinsi yang mempunyai FK
d	Uji Petik Identifikasi Penggunaan Kontrasepsi Swasta				7 Provinsi ( Jawa Barat, Maluku , Sulawesi Utara, NTT, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Papua Barat)
e	Pelaksanaan Standar Kepatuhan Pelayanan KB (MONIKA)				20 Provinsi (Aceh, Riau, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kalbar, Kalsel, Kalteng, NTB,Sulbar, Sulut, Sulteng, Sultra, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat)
f	Dukungan Pelaksanaan Hari Kontrasepsi Sedunia				
18.8	Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	(85% dari 53.342 faskes) dan (30% dari 265.045 poktan)	Faskes dan poktan	148.250.000	
234	Peningkatan promosi Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	5	Kab/Kota	148.250.000	
a	Penggandaan dan distribusi Materi Pengelolaan Infertilitas dalam Keluarga Berencana				
b	Penggandaan dan distribusi Materi Hak-Hak Reproduksi				
c	Integrasi Penguatan Promosi dan Konseling Kesehatan dan Hak-hak Reproduksi bersama Mitra Kerja pada Kegiatan Momentum (Hari Kanker Sedunia, Hari AIDS Sedunia, Hari Anak Nasional, Hari Keluarga Nasional, dll)				
d	<u>Strategi Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran berkualitas dalam menurunkan AKI bersama Mitra Kerja</u>				
e	Sosialisasi Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi bagi poktan di Kampung KB				
f	<u>Sinkronisasi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi dalam program KKBPK</u>				
g	Deteksi dini KAR pada kegiatan momentum				
18.9	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan KBKR di Kabupaten dan Kota	514	Kab/Kota	50.000.000	
235	Pembinaan, monitoring, evaluasi dan fasilitasi KBKR di Kabupaten dan Kota	5	Kab/Kota	50.000.000	
a	Monitoring dan pembinaan terpadu Bidang KBKR ke Tk. kab/kota				
3331.080	Pemenuhan Ketersediaan Alokon di Faskes		Faskes	3.138.990.000	
3331.080.01	Tanpa Sub Output				
18.33	Jumlah ketersediaan Alokon	323		3.138.990.000	
236	Jaminan Ketersediaan Alokon	323	Faskes	3.138.990.000	
a	Pemenuhan Alokon (pengadaan)	38.540			
-	IUD	11.900	buah		
-	Implant	13.320	buah		
-	Pil	-	cycle		
-	Suntik	-	vial		
-	BMHP	13.320			
b	Administrasi pengadaan alokon				
3331.077	Pembinaan Pembangunan keluarga di seluruh tingkatan wilayah		Wilayah	841.866.000	
3331.077.003	Tanpa Sub Output				
18.10	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah	514	Kab/Kota	435.150.000	
240	Sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	5	Kab/Kota	435.150.000	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / IKK / KOMPONEN / SUB KOMPONEN			TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
				Target	Satuan		
		a	<u>Sosialisasi Kebijakan dan Strategi Pembinaan Tumbuh Kembang Anak dalam rangka Pembentukan Karakter</u>				
		b	Orientasi Orangtua Hebat dalam rangka Pembentukan Karakter Anak Sejak Dini di Tingkat Provinsi				Provinsi Sumut, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel (jumlah penduduk usia 0-9 tahun terbanyak berdasarkan Data SUPAS Proyeksi Penduduk 2015-2045)
		c	Penguatan kemitraan dalam rangka momentum strategis (Harganas, Hari Anak Nasional, Hari Ibu)				
		d	<u>Pengembangan dan Sosialisasi Materi Pesan Inti Promosi BKB di Tingkat Provinsi sesuai dengan Kearifan Lokal</u>				
		e	<u>Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga Bersama Mitra Kerja</u>	1	Paket	150.000.000	
18.11	Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative			514	Kab/Kota	213.500.000	-
	241	Fasilitasi Penguatan dan pembinaan BKB Holistic Integrative		5	Kab/Kota	213.500.000	
		a	<u>Pengembangan dan Penggandaan Materi dan Media BKB sesuai kearifan lokal</u>				
		b	Pengembangan materi promosi BKB berbasis IT di tingkat provinsi				
		c	Pengembangan Model Akademi Keluarga Hebat Indonesia di Tingkat Provinsi				Provinsi Sumut, Sumbar, Sumsel, Jabar, Jatim, DIY (Perguruan Tinggi yang memiliki MoU dengan BKKBN)
		d	Koordinasi Kemitraan Program Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Balita dan Anak dalam rangka Pembentukan Karakter Sejak Dini di tingkat provinsi				
		e	<u>Keterpaduan Pelaksanaan Program BKB dengan Mitra Kerja dalam rangka Pembentukan Karakter Anak Sejak Dini</u>				Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Sumut, Kalbar, Gorontalo, Riau, Jambi, Kepri, Kalteng, Kaltim (tingkat partisipasi keluarga ikut BKB rendah)
		f	Peningkatan Partisipasi Keluarga pada Program Pembinaan dan Tumbuh Kembang Balita dan Anak dalam rangka Pembentukan Karakter				DKI Jakarta, DIY, Jatim, Aceh, Sumbar, Sumsel, Lampung, Kalsel, Kaltara, Sultra, Sulteng, Sulsel, Sultra, Maluku, Bali, NTB, NTT, Papua, Bengkulu, Malut, Babel, Papbar, Sulbar
18.13	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL			100%	Kab/Kota	-	
	244	Pengembangan dan pembinaan kelompok BKL		-	Kelompok BKL	-	
18.14	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS			514	Kab/Kota	119.568.000	
	245	Pembinaan kelompok UPPKS dan pembinaan PEK		5	Kab/Kota	119.568.000	
		a	<u>Pengembangan dan Penggandaan Media KIE Pemberdayaan Ekonomi Keluarga</u>				
		b	Penguatan Kerjasama Kemitraan Kelompok UPPKS dengan dinas terkait/lintas sektor				
		c	<u>Fasilitasi Pameran dan Gelar Dagang Dalam rangka Hari keluarga Tingkat Nasional dan Provinsi</u>				
		d	Penguatan Kerjasama dengan Mitra Kerja Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui Momentum Hari Keluarga Tingkat Nasional dan Provinsi				
		e	Pengembangan Strategi Modelling Pemasaran Berbasis TI bersama mitra				
18.15	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK			514	Kab/Kota	73.648.000	
	246	Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK di Kabupaten dan Kota		5	Kab/Kota	73.648.000	
		a	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Bidang KSPK Provinsi) di kab/kota				
		b	<u>Dukungan Pengembangan Model PPKS di BP</u>				Banten, Riau, Sulsel, Kalsel, NTB
		c	Penguatan Data PPKS Online bagi Pengelola PPKS Kabupaten/Kota				
3331.081	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK			51.768	Keluarga	350.000.000	segmentasi wilayah. Lokus mengikuti TNP2K dan Bappenas
	3331.081.001	Tanpa Sub Output					
	18.23	Promosi dan KIE 1000 Hari Pertama Kehidupan		51.768		350.000.000	segmentasi wilayah. Lokus mengikuti TNP2K dan Bappenas
		247	Peningkatan Promosi Pengasuhan 1000 HPK bagi ibu hamil dan keluarga baduta	51.768	Keluarga	350.000.000	segmentasi wilayah. Lokus mengikuti TNP2K dan Bappenas
		a	Pembinaan dan monitoring evaluasi Pro PN				
		b	Perbanyak Materi dan Media KIE Pro PN				
		c	Peningkatan Kapasitas bagi Pengelola Pro PN				
		d	Sosialisasi Materi dan Media KIE Pro PN				
3331.082	Peningkatan Promosi dan Penguatan Keluarga yang memiliki Lansia dan Lansia melalui BKL			143	Kelompok BKL	137.500.000	
	3331.082.001	Tanpa Sub Output					
	18.24	Jumlah keluarga yang memiliki lansia yang ikut BKL		143		137.500.000	Mengakomodir Pro PN baru : Jumlah Kelompok BKL Yang Melaksanakan 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh Dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Lansia
		248	Promosi dan Peningkatan Akses Keluarga Lansia	143	Kelompok BKL	137.500.000	
		a	<u>Perbanyak dan Pengembangan Materi dan Media</u>				
		b	<u>Sosialisasi 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh</u>				
		c	<u>Orientasi pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia</u>				

No.	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / IKK / KOMPONEN / SUB KOMPONEN			TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN		
				Target	Satuan				
			d <u>Pertemuan integrasi pendampingan perawatan jangka panjang lansia bersama mitra</u>						
3331.085	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu				Kelompok	1.298.417.000	-		
	3331.085.003	Tanpa Sub Output							
	18.12	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR)			100%	Kab/Kota	1.298.417.000	-	
		242	Pembinaan PIK R/M di Provinsi dan Kabupaten/Kota			279	kelompok	914.892.000	
			a	Pengembangan dan penyediaan modul, materi dan media PKBR sesuai dengan kearifan lokal					
			b	Workshop peningkatan kualitas pelaksanaan PKBR bagi pengelola PIK Remaja					
			c	Orientasi PS/KS					
			d	Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan PKBR kelompok PIK Remaja					
			e	Temu kerja pengelola Program GenRe					
			f	Jambore Ajang Kreativitas GenRe dalam Penyiapan Perencanaan Kehidupan Berkeluarga					
			g	Promosi GenRe pada kegiatan momentum					
			h	Apresiasi Duta GenRe dan PIK Remaja Unggulan					
			i	Dukungan Kegiatan PIK R di Kampung KB					
		243	Pembinaan kelompok BKR			139	kelompok	383.525.000	
			a	Pengembangan dan penyediaan modul, materi dan media PKBR sesuai dengan kearifan lokal					
			b	Workshop peningkatan kualitas pelaksanaan PKBR bagi pengelola BKR					
			c	Orientasi Kader BKR					
			d	Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan PKBR kelompok BKR					
			e	Apresiasi BKR Unggulan					
			f	Dukungan Kegiatan BKR di Kampung KB					
3331.078	Penggerakkan stakeholder mitra kerja serta perubahan sikap dan perilaku masyarakat berdasarkan data dan informasi yang berbasis IT dalam Program KKBPK			514	Wilayah	6.056.819.400	-		
	3331.078.004	Tanpa Sub Output							
	18.16	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK			34	Provinsi	446.500.000	-	
		250	Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK			5	Kab/Kota	446.500.000	
			a	Pengembangan Materi dan Isi Pesan Advokasi Promosi dan KIE (segmentatif dan berbasis data)					
			b	Pertemuan Kelompok Kerja Advokasi (Tim Pokja Advokasi)					
			c	Pelaksanaan Advokasi Program KKBPK oleh Tim Pokja Advokasi di Kabupaten/Kota dan pada kegiatan momentum kedaerahan					
			d	Advokasi Program KKBPK Berbasis Komunitas/Org Profesi/TNI-POLRI/Ormas/Or Remaja/LSM dst					
			e	Audiensi/Integrasi Program KKBPK bersama Stakeholders					
			f	Advokasi dan KIE Program KKBPK bersama mitra kerja			1	Paket	150.000.000
	18.17	Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional					536.000.000	-	
		251	Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional			6	Media	431.000.000	
			a	Advokasi Program KKBPK melalui media elektronik (Televisi/ radio)					
			b	Pencitraan Program KKBPK melalui PSA (surat kabar/majalah)					
			c	Advokasi Program KKBPK melalui Infografis dan Videografis					
			d	Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Lembar Cetakan (factsheet, policy brief, poster, leaflet, sticker, lembar balik)				Sosialisasi Program KKBPK melalui PK2020 (provinsi lokus PK)	
			e	Promosi dan KIE melalui Radio Streaming/radio lokal/radio komunitas					
			f	Promosi dan KIE Berbasis Online					
			g	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Luar Ruang dan media lini bawah					
			h	Sosialisasi Pelaksanaan Hari Keluarga					
			i	Exhibition/Pameran Program KKBPK					
			j	Fasilitasi Advokasi dan KIE Program KKBPK bersama Mitra Kerja					
			k	Iklan Layanan Masyarakat					
			l	Penguatan Sosialisasi Rebranding Program KKBPK					
		252	Pelaksanaan Advokasi dan KIE program KKBPK melalui mupen			-	Kegiatan	105.000.000	
			a	Pendayagunaan Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB sebagai Sarana KIE Peningkatan Kesertaan dan Pembinaan ber-KB di Tk. Kab. Kota					
			b	Pendayagunaan Media Production Center (MPC)					
			c	Maintenance/Upgrading sarana MPC					
	18.18	Jumlah Penggerakkan Pembinaan KKBPK bagi PKB/PLKB dan mitra kerja di setiap tingkatan wilayah			34	Provinsi	252.000.000		
		253	Dukungan Penggerakkan Pembinaan KKBPK bagi mitra kerja di setiap tingkatan wilayah			5	Wilayah	252.000.000	
			a	Pembinaan Penyuluh KB di Kampung KB					
			b	Jambore (orientasi) Program KKBPK Tk Provinsi bagi Penyuluh KKBPK (PKB dan PLKB), Kader dan Pasangan KB Lestari					
			c	Kegiatan Pembinaan Kinerja Penyuluh KKBPK Triwulanan					
	18.19	Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat			34	Provinsi	218.800.000		
		254	Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat			5	Wilayah	69.800.000	
			a	Pertemuan Penguatan Mekanisme Operasional dan Tenaga Lini Lapangan dalam Pengelolaan Program KKBPK di Balai Penyuluhan					
			b	Bimbingan teknis pelaksanaan penggerakkan mekanisme operasional Lini Lapangan oleh Provinsi					
			c	Pertemuan Penguatan Pemenuhan SDM Lini Lapangan untuk Pendataan Keluarga di Balai Penyuluhan					
		255	Monitoring dan Evaluasi penggerakkan mekanisme operasional dan implementasi kegiatan Bidang ADPIN di Lini Lapangan			5	Kab/kota	149.000.000	
			a	Monitoring dan Evaluasi Terpadu ADPIN					
			b	Pertemuan Koordinasi Organisasi Profesi Penyuluh KKBPK					
			c	Fasilitasi Pengiriman Kepala Desa/Lurah ke Kegiatan Lokakarya Program KKBPK Tingkat Nasional					
			d	Pelaksanaan Uji Kompetensi Sertifikasi Penyuluh KKBPK Tk Provinsi					
			e	Fasilitasi HARGANAS Tingkat Nasional bagi PKB/PLKB					

No.	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / IKK / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
		Target	Satuan		
	f <u>Penguatan Program KKBPK bagi Pengelolaan Kampung KB di tingkat desa/kelurahan</u>				
18.20	Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK	100%	Kab/Kota	255.000.000	
256	Peningkatan kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK	5	Kab/kota	255.000.000	
	a Pertemuan integrasi Kampung KB bersama mitra kerja Tk. Provinsi dan Tk. Kabupaten dan Kota				
	b Penilaian penghargaan bidang KKBPK bagi mitra kerja dalam rangka Hargan				
	c Fasilitasi kunjungan kerja lembaga eksekutif dan legislatif dari pusat/provinsi/kabupaten/kota ke BKKBN Provinsi				
	d Fasilitasi pelaksanaan TMKK di provinsi				
	e Rapat koordinasi teknis kerja sama kemitraan tingkat daerah provinsi				
	f Pertemuan mitra kerja Program KKBPK di Provinsi				
	g Pembinaan dan monitoring terpadu peningkatan kemitraan dengan stakeholder dan mitra kerja				
18.21	Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi	34	Provinsi	4.348.519.400	-
257	Peningkatan pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi	-	dokumen	4.126.800.400	
a	<u>Pengelolaan Sistem Informasi Keluarga</u>	2	kab/kota	99.638.000	33 provinsi : 2 Kab/Kota 1 prov (Jambi) : 11 Kab/Kota
b	Pengadaan Formulir Pendataan Keluarga 2020	266.740	Keluarga	4.027.162.400	Anggaran Pendataan Keluarga TA 2020 per Provinsi
c	Orientasi Pendataan Keluarga 2020	-			
	- Tk. Provinsi	5	Kab/Kota		
	- Tk. Kabupaten/Kota	31	Kecamatan		
	- Tk. Kecamatan	219	Desa/Kelurahan		
	- Tk. Desa/Kelurahan	4.446	Kader		
d	Operasional Pendataan Keluarga 2020	666.850	Keluarga		
	- Supervisor	219	Desa/Kelurahan		
	- Manager	219	Desa/Kelurahan		
	- Manager	31	Kecamatan		
e	Monitoring/Pengamatan Pelaksanaan Pendataan Keluarga 2020	-			
	- Kabupaten ke Kecamatan sd Desa	45	OH		
f	Pengumpulan Hasil Pendataan Keluarga 2020	-			
	- Kecamatan ke Desa	45	OH		
h	Jasa Pengolahan PK 2020 (Perekaman Data Keluarga)	666.850	Keluarga		
	Data Manager	31	Kecamatan		
i	Sarasehan /Penyajian Hasil Pendataan Keluarga 2020	-			
	- Tk. Provinsi	1	Keg		
	- Tk. Kabupaten/Kota	5	Keg		
	- Tk. Kecamatan	31	Keg		
	- Tk. Desa/Kelurahan	219	Keg		
j	Pengadaan Output Data Keluarga 2020	666.850	Keluarga		
k	Pengadaan PK Kit	4.446	Kader		
l	Sinkronisasi PK 2020 ke dalam SIGA	-	Kab/Kota		
m	Sosialisasi Pendataan Keluarga	-			
	- Tk. Provinsi	1	Keg		
	- Tk. Kabupaten/Kota	5	Keg		
n	Penggandaan JUKNIS PK2020	-			
	- Juknis PK Lengkap	5	Kab/Kota		
	- Juknis Pengolahan	31	Kecamatan		
	- Juknis Manager	31	Kecamatan		
	- Juknis Supervisor	219	Desa/Kelurahan		
o	Penggandaan Buku Saku PK2020	4.446	Kader		
p	Publikasi	-			
	- Tk. Provinsi	1	Keg		
	- Tk. Kabupaten/Kota	5	Keg		
258	Pengembangan, peningkatan kualitas dan pemanfaatan sistem informasi kependudukan dan keluarga	5	Kab/Kota	221.719.000	
a	<u>Penilaian dan Verifikasi Kualitas Data Rutin</u>				
b	Penyusunan Laporan statistik program KKBPK (Umpan Balik) Tk. Provinsi				
c	<u>Peningkatan Kompetensi teknis Pengelola Data dan Informasi Provinsi</u>				
d	<u>Monitoring Evaluasi terpadu Pengelolaan Data dan Informasi</u>				
II	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BKKBN			50.951.021.000	
5297	Pengelolaan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di provinsi			50.951.021.000	
5297.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	Layanan	2.087.000.000	
5297.950.001	Tanpa Sub Output				
24.3	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala)	12	Bulan	2.087.000.000	
051	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	1	dokumen	460.000.000	
a	<u>Pemaduan Perencanaan Program dan Anggaran KKBPK Tk. Provinsi dan Kab/Kota (Korenda)</u>				
b	Fasilitasi sinkronisasi program dalam forum Rakortek dan musrenbangda				
c	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan DAK Sub Bidang KB - (termasuk fasilitasi melalui aplikasi Krisna DAK)				
d	Penyusunan data basis perencanaan program dan anggaran Provinsi dan Kab/Kota				
e	<u>Konsolidasi Perencanaan program KKBPK Pusat dan Provinsi (e-KOREN I / KOREN II)</u>				
f	<u>Forum sinkronisasi Perencanaan Program dan Anggaran (koordinasi lintas Bidang dan lintas sektor - Prov dan Kab/Kota)</u>				
g	Rapat Koordinasi Teknis pembahasan usulan DAK subbidang KB Kab Kota				
057	Pengelolaan Kepegawaian	331	pegawai	387.000.000	
a	<u>Pembinaan dan pengembangan Jabatan Struktural dan Fungsional</u>				
b	Analisa dan Pemetaan Beban Kerja Pegawai				
c	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMSDM)				

No.	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / IKK / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
		Target	Satuan		
	d Pengadaan Pegawai				
	e Orientasi CPNS ASN				
	f Seleksi jabatan ASN				
	g <b>Pemetaan Kompetensi ASN dan pengembangan karir ASN</b>				
	h Fasilitasi Kesejahteraan dan Pra Purna Tugas ASN				
	i Pembinaan ASN BKKBN				
	j Pelaksanaan MRF melalui SIMSDM				
	k Pembinaan Agent of Change (AoC)				
	l Rekonsiliasi data kepegawaian pusat dan provinsi				
054	<b>Pengelolaan Keuangan</b>	1	Laporan	560.000.000	
	a <b>Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN Semester I dan II (Tk. Pusat dan provinsi)</b>				
	b Pembinaan dan pendampingan pelaksanaan anggaran thd pejabat perbendaharaan, pejabat pengadaan, pengelola BMN dan petugas SAI Tk. Prov dg Mitra Kerja Terkait				
	c Pertemuan Spending review Program dan Anggaran (koordinasi dengan Kanwil DJPB)				
	d <b>Akselerasi Percepatan Pelaporan DAK Sub Bid KB Fisik dan Non Fisik bagi TIM Pengendali DAK Kab/Kota, Monitoring DAK</b>				
	e Pelaksanaan sosialisasi DAK regional (biaya penyelenggaraan)				
	f Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan dan BMN				
	g Penatakelolaan barang persediaan dan pengelolaan gudang alkon serta Stock Opname alkon gudang provinsi				
	h <b>Distribusi Alokasi ke Gudang Kab/Kota (distribusi dinamis dan buffer)</b>				
	i Penatausahaan BMN (Daftar Barang Ruangan dan Labelisasi BMN)				
	j Pengelolaan dan pembentukan Tim penghapusan tk. Kuasa pengguna Barang				
	k <b>Penyusunan RK BMN tk. Kuasa pengguna Barang Ke Pusat</b>				
	l Honor Petugas Pengelola BMN (Pengelola Barang Persediaan)				
	m Peningkatan kapasitas pengadaan barang/jasa bagi Pokja ULP				
	n Penyelenggaraan SPIP				
061	<b>Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan RB</b>	1	dokumen	460.000.000	
	a <b>Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (termasuk PUPK dan NSPK)</b>				
	b Pembinaan Hukum dan Bantuan Hukum bagi lembaga dan Pegawai Perwakilan BKKBN Provinsi				
	c Pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIIH) Perwakilan BKKBN Provinsi				
	d Forum Koordinasi Jurnalis Program KKBPK				
	e Liputan Program KKBPK dan media publikasi				
	f pembinaan Reformasi Birokrasi Perwakilan BKKBN Provinsi				
052	<b>Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi</b>	5	Kab/Kota	220.000.000	
	a Bimbingan teknis pengelolaan gudang alkon dan non alkon Kab/Kota				
	b Monitoring DAK Kab/kota				
	c <b>Fasilitasi Monitoring Mitra Kerja dan Pemangku Kepentingan Perwakilan BKKBN Provinsi</b>				
	d <b>Bimbingan Teknis Pelaksanaan NSPK Bidang Pengendalian Penduduk dan KB di kabupaten/kota</b>				
	e Fasilitasi Rakornas				
	f Konsultasi dan bimbingan teknis ke pusat				
5297.951	<b>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>	1	Layanan	150.000.000	
951.001	Tanpa Sub Output				
24.4	<b>Persentase pengadaan sarana prasarana sesuai analisis kebutuhan</b>	100	%	150.000.000	
051	<b>Pengadaan Kendaraan Bermotor</b>	0	Bulan Layanan		
	a Pengadaan Kendaraan Dinas roda 2				
	b Pengadaan Kendaraan Dinas roda 4				
	c Pengadaan Kendaraan Fungsional (Pengangkut distribusi alkon/alkes)				
052	<b>Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi</b>	-	Bulan Layanan	-	LCD 7 Balai Diklat @8jt (bogor, cirebon, pati, ambarawa, banyumas, jember, malang)
	a Pengadaan Komputer/Laptop/printer (termasuk PC Pengarsipan)				
053	<b>Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran</b>	-	Bulan Layanan	-	Sarpras 7 Balai Diklat (bogor, cirebon, pati, ambarawa, banyumas, jember, malang)
	a Pengadaan Peralatan gedung kantor (APAR, Penghancur kertas, dsb)				
	b Fasilitas Kantor dan Rumah Jabatan				
	c Pengadaan Sarana Penunjang gedung kantor dan Gudang Alokasi				
	d Pengadaan Peralatan Pendukung Pengarsipan (Mobile file/Roll O Pack, Ac Cassete dsb)				
054	<b>Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan</b>	-	Bulan Layanan	150.000.000	Gedung utama Sulsei Rp 13.941.001.000; gedung kantor Sumut Rp 2.194.350.000; gedung kantor Sulteng Rp 894.368.000 dan asrama diklat Sulteng Rp 2.200.000.000; gedung kantor Lampung Rp 1.422.047.000;
	a Rehab/Perbaikan/pembangunan Gedung Kantor				
5297.994	<b>Layanan Perkantoran</b>	1	Layanan	48.714.021.000	
994.001	Tanpa Sub Output				
24.1	<b>Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)</b>	100	%	46.173.761.000	ASN dan PKB/PLKB
001	<b>Gaji dan Tunjangan Perwakilan BKKBN Provinsi</b>	13	Bulan Layanan	46.173.761.000	ASN dan PKB/PLKB
	a Pembayaran gaji dan tunjangan				
994.002	Tanpa Sub Output				
24.2	<b>Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran</b>	12	Bulan	2.540.260.000	
002	<b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>	12	Bulan Layanan	2.540.260.000	
	a Langganan Daya dan Jasa (listrik, telp, Air) kantor BKKBN Pusat, Rumah Jabatan, Gudang dan Mess				

No.	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / IKK / KOMPONEN / SUB KOMPONEN		TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
			Target	Satuan		
		b	Langganan jasa sewa mesin foto copy dan kendaraan dinas operasional			
		c	Langganan Koran, Majalah, Buku, Air Minum, dan Langganan TV Cable			
		d	Pembayaran PBB dan tunggakan PBB			
		e	Pembayaran Pajak kendaraan Bermotor roda 2, roda 4 dan roda 6			
		f	Honorarium Jasa Perorangan Kontraktual (Satpam/keamanan, Petugas Kebersihan, Pramubakti, Pengemudi dan kebersihan Gudang Alkon)			
		g	Pemeliharaan gedung dan bangunan			
		h	Pemeliharaan peralatan dan mesin			
		i	Honor pengelola Anggaran Satker			
III	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN				137.064.000	-
5298	Pengelolaan program pengawasan provinsi				137.064.000	-
5298.96	Layanan Audit Internal		1	Layanan	137.064.000	-
	5298.965.001	Tanpa Sub Output				
	28.1	Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK	34	Provinsi	137.064.000	-
	052	Pelaksanaan Audit Internal	2	Laporan	137.064.000	
	a	Evaluasi Pelaksanaan SPIP dan Penilaian Resiko				
	b	Evaluasi Penerapan ZI WBK dan PMPRB				
	c	Fasilitasi Pemeriksaan Internal dan Eksternal				
	d	TLHP Internal dan Eksternal				
	e	Evaluasi Pengawasan				
	f	Rakorwas (Rapat Koordinasi Pengawasan)				
	g	Audit/Uji Petik (Bagi Auditor)/Monev (Bagi Adminwas)				
	h	Penyusunan Laporan PKPT PKAU Provinsi				
IV	Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN				773.280.000	
5299	Pengelolaan Program Pelatihan dan Pengembangan Provinsi				773.280.000	
5299.966	Layanan Pendidikan dan Pelatihan		1	Layanan	413.280.000	
	5299.966.001	Tanpa Sub Output				
	33.1	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga)		Orang	413.280.000	
	052	Pengembangan Kompetensi	124	Orang	413.280.000	
	a	<u>Pelatihan Dasar CPNS</u>	3	or		
	b	<u>Pelatihan Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, KB dan PK bagi PKB (PNS)</u>	6	or		
	c	Peningkatan Kompetensi Aparatur Provinsi				
	d	Diklat Teknis Program KKBPK bagi PLKB Non PNS				
	e	<u>Pelatihan Peningkatan Kompetensi Teknis Program KKBPK bagi PKB/PLKB</u>	60	or		
	f	<u>Pelatihan PK2020</u>	25	or		
	g	Pelatihan Teknis bagi SDM Kabupaten dan Kota				
	h	Pelatihan Teknis Program Pembangunan Keluarga				
	i	Pelatihan Pengelolaan Program KKBPK di Balai Diklat KKB				
	j	<u>Orientasi Teknis bagi Toma, Toga, Toda dan Mitra Kerja</u>	30	or		
	k	Orasi Ilmiah Widyaiswara				
	l	Identifikasi Kebutuhan Diklat				
	m	Pengembangan kurikulum, Materi dan Media Pembelajaran				
	n	<u>Penjaminan Mutu Diklat</u>	1	keg		
	o	Penyusunan Tata Laksana Diklat				
	p	Fasilitasi Visitasi Penilaian Akreditasi Balatbang dan Balai Diklat				
	q	<u>Pembinaan SDM provinsi</u>	2	keg		
	r	Fasilitasi Evaluasi Pasca Diklat				
	s	Kegiatan/pelatihan lain untuk pemenuhan standarisasi kompetensi SDM Aparatur dan Tenaga Fungsional				
5299.967	Layanan Penelitian dan Pengembangan		1	Layanan	360.000.000	
	5299.967.001	Tanpa Sub Output				
	33.2	Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB)	3	Dokumen	360.000.000	
	051	Pelaksanaan Penelitian	3	Penelitian	360.000.000	
	a	Identifikasi Kebutuhan Penelitian dan Pengembangan Kependudukan, KB dan KS				
	b	Diseminasi Hasil Penelitian Kependudukan, KB dan KS				
	c	Fasilitasi Penyusunan dan Penerbitan Hasil Penelitian Jurnal Ilmiah Litbang Kependudukan, KB dan KS				
	d	Koordinasi Lintas Sektor Program Kependudukan, KB dan KS				
	e	<u>Penelitian Kependudukan, KB dan KS</u>				
	f	Kajian Strategis Kependudukan, KB dan KS				

Cat:  
Kegiatan (sub komponen) yang di cetak tebal dan garis bawah adalah kegiatan prioritas

Sekretaris Utama,

Nofrijal















RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2020  
PERWAKILAN BKKBN DIY

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN/AKTIVITAS YANG DIPERLUKAN UNTUK MENCAPAI TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA TAHUN 2020	TARGET KINERJA BULANAN												KET
							JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
			2 Penatakelolaan Barang Persediaan Dan Pengelolaan Gudang Alokasi Serta Stock Opname	10.100.000	Sekretaris														
			3 Penatausahaan Daftar Barang Ruangan	1.650.000	Sekretaris														
			4 Pengelolaan Penghapusan Tingkat Kuasa Pengguna	2.050.000	Sekretaris														
			5 RK BMN Tingkat Kuasa Pengguna	300.000	Sekretaris														
		Persentase penyerapan anggaran	1 Forum Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Bagi Pengelola Keuangan	13.500.000	Sekretaris	≥95%												≥95%	
			2 Pembinaan Pengelolaan Program Kabupaten/Kota	6.000.000	Sekretaris														
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Hasil Evaluasi	1 Forum Sikronisasi Perencanaan Program dan Anggaran (lintas bidang dan lintas sektor)	192.579.000	Sekretaris	71,00												71,00	
			2 Penyusunan , Penyempurnaan Dokumen Perencanaan dan evaluasi RKP	4.500.000	Sekretaris														
			3 Penyusunan LKIP	3.500.000	Sekretaris														
			4 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Manajemen Melalui Review Program KKBPK	90.631.000	Sekretaris														
			5 Forum Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran (RADALGRAM)	48.750.000	Sekretaris														
5	Meningkatnya kematangan penyelenggaraan SPIP	Level maturitas penilaian mandiri penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1 Evaluasi Pelaksanaan SPIP Dan Penilaian Resiko	18.400.000	Sekretaris	3,4 (skala 1 – 5)												3,4 (skala 1 – 5)	
<b>TOTAL ANGGARAN</b>				<b>7.732.368.000</b>															

Mengetahui,  
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG(K)

Yogyakarta, 15 Mei 2020

Kepala,

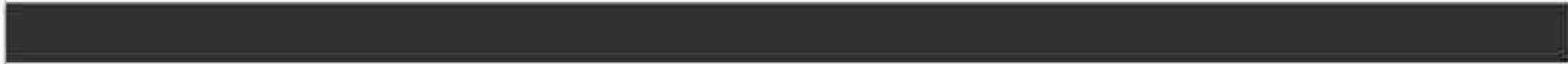
DR. Ukik Kusuma Kurniawan, SKM., MPS., MA



Logout

- Dashboard Kinerja Anggaran
- Dashboard Kinerja Tagging
- Entri Data
- Monitoring
- Ubah Password
- Informasi

Dashboard Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional D.I. Yogyakarta



Nilai SMART  
87,44

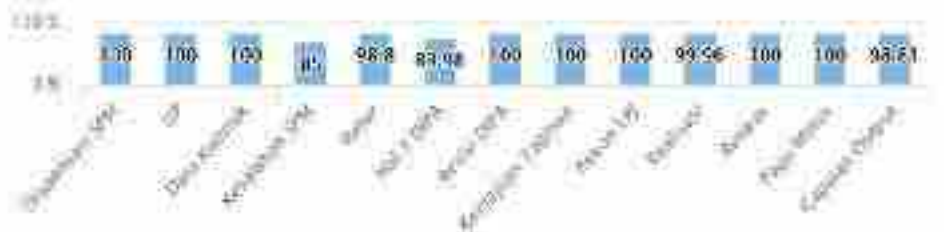
Tahun Anggaran: 2020



Terdapat 5 komponen dalam penentuan nilai SMART anggaran dan taggung jawab, Capaian Kinerja Kegiatan dan realisasi volume kegiatan BPP dan realisasi indikator efisiensi kegiatan BPP. Angka menggunakan format satu titik desimal.

Nilai IKPA  
98,96

Tahun Anggaran: 2020



Realisasi adalah hasil antara persentase realisasi anggaran terhadap pada BPP-nya terhadap target perencanaan anggaran tahunan. Nilai indikator yang ditampilkan di atas selagunanya dalam 5-4/19/2021, untuk memastikan eksistensi data tahun 2020, terdapat Revisi BPP dan Deviasi Halusur II BPP yang diperhitungkan dalam nilai akhir IKPA.





**RUMUSAN  
RAPAT KERJA DAERAH (RAKERDA)  
PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA,  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (BANGGAKENCANA)  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 11 MARET 2020**

---

Memperhatikan arahan Pimpinan BKKBN, arahan Wakil Gubernur DIY, Kepala Perwakilan BKKBN DIY, paparan keynote speech Sekertaris Daerah dan pembahas dari; Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kepala DP3AP2, Kepala PSKK UGM, serta diskusi yang berkembang pada Rakerda dengan tema “Program Bangga Kencana di Era Milenial menuju Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”, dapat dirumuskan beberapa poin sebagai berikut :

1. *Pertama*, melalui kegiatan Program BANGGAKENCANA, Perwakilan BKKBN DIY beserta stakeholders dan mitra kerja siap membantu Pemerintah DIY dalam menyelesaikan masalah keluarga di era milenial. Upaya ini perlu koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas agar implementasi program dan kegiatan dapat terwujud dengan baik serta tujuan pembangunan Nasional dapat tercapai.
2. *Kedua*, Gubernur DIY melalui Wakil Gubernur mengingatkan kepada kita semua bahwa tahun 2020 merupakan tahun strategis. Melalui Rakerda ini harus mampu meningkatkan semangat baru dan menunjukkan kinerja maksimal untuk mendukung visi, misi dan janji Presiden tahun 2020-2024 serta berkontribusi maksimal dalam agenda pembangunan jangka menengah Nasional 2020-2024. Untuk itu, diperlukan langkah percepatan untuk peningkatan sinergitas pemangku kepentingan dalam implementasi program BANGGAKENCANA.
3. *Ketiga*, untuk mengatasi kejahatan remaja di Jogja, perlu upaya membentuk berkarakter baik pada anak melalui pendidikan, ketahanan keluarga, dan masyarakat.
4. *Keempat*, Perilaku anak dipengaruhi pola asuh dan ketahanan keluarga sehingga untuk mewujudkan remaja yang berketahanan, produktif, berdaya

juang dan berbudaya memerlukan penguatan 3 (tiga) pilar untuk mewujudkan, yaitu: (1) kemampuan pengasuhan anak, (2) pemenuhan kebutuhan dan hak anak, (3) Faktor keluarga dan lingkungan. Kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan penting untuk membangun Keluarga tangguh yang produktif dan berbudaya.

5. *Kelima*, upaya preventif telah diupayakan di DIY, antara lain melalui pendidikan berbasis budaya, pengembangan potensi anak berbasis minat bakat, serta pembinaan dan pendampingan. Keberhasilan upaya ini membutuhkan komitmen sekolah, masyarakat, stakeholders dan keluarga.
6. *Keenam*, DIY sudah memiliki peraturan daerah tentang Ketahanan Keluarga, untuk mengimplementasikannya perlu peran semua sektor. Peran orang tua terutama ayah juga perlu ditingkatkan karena ayah sebagai role model bagi anak.
7. *Ketujuh*, Dalam merumuskan kebijakan untuk kaum muda diharapkan juga melibatkan kaum muda. RT dan RW juga diharapkan jadi agen untuk implementasi perda ketahanan keluarga.
8. *Kedelapan*, Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dan informasi KB yang berkualitas, pemahaman KB dan Kespro bagi remaja dan calon pengantin, perlu peningkatan penggunaan jaminan kesehatan Nasional untuk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang dengan mengembalikan keberhasilan KB di DIY dengan TFR di bawah 2.

Demikian rumusan hasil rakerda, semoga dapat menjadi dasar pijakan dalam melaksanakan program BANGGAKENCANA di DIY selanjutnya.

Yogyakarta, 11 Maret 2020.

Tim Perumus :

1. Witono, M.Kes
2. Rahmat Hidayat, MA
3. Riza Fatma Arifa, M.Si
4. Drs. Didik Sudarmaji



# NOTULEN REVIEW PROGRAM BANGGA KENCANA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020

## I. PELAKSANAAN

- Hari/tanggal : Selasa, 8 September 2020
- Tempat : Sahid Raya Hotel, Babarsari Yogyakarta
- Peserta : 105 orang berasal dari Sekretaris Daerah DIY, Dinas Kesehatan DIY dan Kabupaten/Kota, DP3AP2 DIY, OPD KB Kab/Kota, TNI, Polri, IBI DIY dan Kabupaten/Kota, BPJS, PKK DIY dan Kabupaten/Kota, IpeKB Indonesia-DIY dan Kabupaten/Kota, IPADI DIY, FAPSEDU DIY, BKKBN DIY
- Narasumber : 1. Kepala Perwakilan BKKBN DIY– Dr. Ukik Kusuma Kurniawan  
2. Drs. R. Kadamanta Baskara Aji - Sekretaris Daerah DIY  
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dalduk dan KB, Kulon Progo – Sudarmanto, S.IP, M.Si.  
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Bantul – Dra. Sri Nuryanti, M.Si.  
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Gunungkidul – Sujoko, S.Sos., M.Si.  
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sleman – dr. Mafilindati Nuraini, M. Kes  
7. Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana – Drs. Tri Karyadi Riyanto Raharjo, SH, M.Si.

## II. HASIL

### A. Laporan dan Evaluasi Program Bangga Kencana oleh Kepala Perwakilan BKKBN DIY - Bapak Dr. Ukik Kusuma Kurniawan

- Tema Review 2020 : “Refleksi Program Bangga Kencana di Era Pandemi Covid-19 dan Strategi Pelaksanaan Kegiatan di Era Adaptasi Kebiasaan Baru Tahun 2020”
- Review Program disesuaikan arah RPJMN 2020-2024 dengan menonjolkan 2 agenda prioritas pembangunan:
  - a) Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
  - b) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokoh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter.
- Lima Indikator dari empat belas indikator program Bangga Kencana Tahun 2020 DIY belum tercapai, yaitu:
  - a) Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) dari target 5,74 baru tercapai 9,5
  - b) Jumlah Peserta KB Baru (Pelkon) dari target 92.137 baru tercapai 21.616

- c) Tersedianya Alokasi di Fasilitas Kesehatan dari target 323 baru tercapai 197
- d) Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Bidan tentang 1000 HPK dari target 51.768 baru tercapai 3.335
- e) Meningkatnya pengetahuan Remaja Putri sebagai calon ibu tentang edukasi Kespro dan Gizi melalui peran PIK Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) dari target 418 baru tercapai 219
- Arah Kebijakan dan Strategi 2020-2024:
  - a) Pembangunan Keluarga yaitu meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga
  - b) Pengendalian Penduduk yaitu memperkuat pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk
  - c) Keluarga Berencana yaitu meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi
  - d) Meningkatkan advokasi dan penggerakan Program Bangga Kencana sesuai karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran
  - e) Memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi

**B. Arahan dan Pembukaan Review oleh Sekretaris Daerah DIY- Bapak Drs. R. Kadamanta Baskara Aji**

- Yang perlu diperhatikan dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan adalah bahwa penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai penerima manfaat hasil pembangunan tetapi juga sebagai subjek yang berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan.
- Program Bangga Kencana harus peka terhadap perkembangan zaman, harus terus relevan dengan kondisi masyarakat dan selayaknya ditujukan pada generasi X, millenials dan Zillennials. Generasi-generasi yang lahir pada kisaran tahun 1980-2000-an.
- Diperlukan pendekatan yang berbeda dalam memberikan pemahaman program karena pendekatan untuk era *baby boomer* (lahir di era 1946-1955), generasi pasca Revolusi Kemerdekaan yang masih kental dengan nuansa komunikasi satu arah, informasi dan teknologi yang belum melimpah, serta pemerintah adalah pemain tunggal dan utama dari keseluruhan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, apabila dibandingkan dengan perubahan sosial yang terjadi dewasa ini menjadi kurang relevan lagi.
- Penilaian atas apa yang telah dikerjakan perlu dilakukan, apalagi penilaian yang dilakukan harusnya dilakukan oleh pihak eksternal.
- BKKBN perlu untuk membangun posisi baru (*repositioning*) sebagai *confirmatory* bahkan lebih jauh lagi sebagai juri, sehingga masyarakat menempatkan Program Bangga Kencana dari BKKBN ini dalam posisi yang tetap relevan dan terpercaya dalam informasi Pembangunan Keluarga berkualitas, Kependudukan serta Keluarga Berencana.



- BKKBN bersama mitra kerja terkait diharapkan berkontribusi besar dalam upaya “Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang seimbang” dengan berfokus kepada:
  1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang;
  2. Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif;
  3. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang *holistic integrative* sesuai siklus hidup;
  4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global;
  5. Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi;
  6. Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur.
- Melalui pertemuan review ini diharapkan dapat dirumuskan 4 hal yaitu:
  - a) Perlukah adanya penyesuaian indikator kinerja
  - b) Perlukah adanya perubahan strategi yang dapat dilakukan terutama pada masa covid
  - c) Penilaian apa yang akan digunakan atas apa yg telah dilaksanakan
  - d) Bagaimana kita mereviu target akhir atas pencapaian yang dilakukan.

**C. Materi Capaian Program Bangga Kencana di Kabupaten Kulon Progo oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dalduk dan KB, Kulon Progo – Sudarmanto, S.IP, M.Si.**

- Penjelasan umum Renstra Bangga Kencana BKKBN 2020-2024 : Visi dan Misi BKKBN
- Penjelasan umum Visi dan Misi RPJMD Kulon Progo 2017-2020
- Penjelasan umum program Bangga Kencana yang fokus pada pembangunan keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS) guna mewujudkan keluarga berkualitas yang tentram, mandiri, bahagia
- Indikator capaian program pembangunan keluarga meliputi : Kesertaan KB anggota dan cakupan pembinaan BKB; Kesertaan KB anggota dan cakupan pembinaan BKR; Kesertaan KB anggota dan cakupan pembinaan BKL; Cakupan pembinaan PIK-R
- Capaian jumlah kelompok kegiatan BKB di Kulon Progo telah mencapai 83,62%
- Capaian jumlah kelompok kegiatan BKR di Kulon Progo telah mencapai 81%
- Capaian jumlah kelompok kegiatan BKL di Kulon Progo telah mencapai 81%
- Capaian jumlah kelompok kegiatan UPPKS di Kulon Progo telah mencapai 81,76%

- Capaian kinerja Cakupan : Capaian BKB : 90,55; Capaian BKR : 85,62; Capaian BKL : 83,43; PIK R Jalur Sekolah : 32,79; PIK R Jalur Masyarakat : 46,60
- Capaian program kependudukan : capaian LPP (data belum tersedia), capaian TFR (data belum tersedia)
- Capaian Program Keluarga Berencana :
  - ✓ Capaian PB : hingga Juni 2020, mencapai 2.978 atau sebesar 27,8% terhadap PPM
  - ✓ Capaian PA : hingga Juni 2020, mencapai 44.189 atau sebesar 87,23% terhadap PPM
  - ✓ Unmetneed : hingga Juni 2020, mencapai .505 atau sebesar 9,18%
  - ✓ MKJP : hingga Juni 2020, mencapai 20.093 atau sebesar 45,5%
- Capaian serapan anggaran DAK Fisik dan Non Fisik : DAK Fisik 56,64%, DAK Non Fisik 32,56%
- Kendala Bangsa Kencana di era COVID-19 : Hambatan pertemuan dan tatap muka karena social distancing yang berdampak pada terbatasnya KIE terhambatnya pelayanan KB dan rendahnya serapan anggaran; Beberapa Faskes dan PMB melakukan penundaan dan atau bahkan penghentian sementara pelayanan KB, karena kehati hatian dan pencegahan covid di wilayahnya; Adanya hambatan sistem jaminan kesehatan untuk mencover pelayanan KB
- Upaya dan strategi yang telah dan akan dilakukan : Optimalisasi pelayanan KB melalui Baksos; Rintisan Kerja sama dengan Faskes RS dalam pelayanan KB MKJP tertentu; Memanfaatkan berbagai media KIE dalam situasi keterbatasan di era covid, termasuk bersama tim gugus kerja covid kapanewon; Mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan pelayanan KB, karena adanya hambatan sistem pembiayaan jaminan kesehatan

**D. Materi Capaian Program Bangsa Kencana di Kabupaten Bantul oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Bantul – Dra. Sri Nuryanti, M.Si.**

- Peserta KB Baru Berdasarkan Alat Kontrasepsi, Bulan Juni 2020 : jumlah capaian 4.928; jumlah capaian terhadap PPM adalah 17,60%
- Peserta KB Aktif Berdasarkan Alat Kontrasepsi, Bulan Juni 2020 : jumlah capaian 100.830; jumlah capaian terhadap PPM adalah 80,88%
- Unmet Need KB Bulan Juni 2020 sejumlah 15.809; persentase terhadap PUS adalah sebesar 11,34%
- Peserta KB Drop Out (DO) Bulan Juni 2020 : 392 orang atau sebanyak 10,39% dari PA bulan lalu
- Strategi untuk Mencapai Program Banggakencana di Era Adaptasi Kebiasaan Baru Tahun 2020.
  - ✓ Konseling kunjungan rumah kepada PUS Hamil dan Unmet need.



- ✓ Peningkatan Penyuluhan KB tingkat dusun melalui Kader IMP dan mengoptimalkan penyuluhan melalui media sosial WA, Facebook, Intagram (poster, flayer, video pendek)
- ✓ Mengoptimalkan pendataan terhadap PB dan PA oleh kader
- ✓ Mengoptimalkan pelayanan KB di PMB dengan alkon dr BKKBN
- ✓ Penyaluran Pil dan Kondom lewat IMP
- ✓ Advokasi kpd tokoh formal dan informal utk program Bangga Kencana
- ✓ Peningkatan KIE melalui Pertemuan Kring dusun dan Group WA
- ✓ Bekerjasama dengan Babinsa dan Babinkamtibmas dalam melakukan KIE kunjungan rumah
- ✓ Memberikan reward setahun sekali bagi Dusun/Desa yg tercapai target tahunan
- ✓ Membuat grebek PUS Unmeet need dan baksos tingkat kecamatan
- Daya Dukung untuk Mencapai Program Banggakencana di Era Adaptasi Kebiasaan Baru Tahun 2020 : Jumlah PKB ASN 43 org, PKB Non ASN 29 org; Jumlah IMP 7.082 orang; Insentif / ketersediaan dana APBD (Anggaran untuk MKJP semester dua 216.575.000; Anggaran untuk KIE semester dua 555.750.000)
- Dengan sisa waktu bulan September Oktober Nopember Desember, DPPKBPMMD Kabupaten Bantul akan melakukan upaya untuk mengoptimalkan pencapaian kepesertaan KB

**E. Materi Capaian Program Bangga Kencana di Kabupaten Gunungkidul oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Gunungkidul – Sujoko, S.Sos., M.Si.**

- Sekilas Gunungkidul:
  - ✓ batas administrasi,
  - ✓ wilayah,
  - ✓ potensi wisata,
  - ✓ jumlah penduduk : 742.731 orang
  - ✓ SDM lini lapangan : PKB 62 orang, PPKBD 144 orang, Sub PPKBD 1.431 orang, Kelompok KB 6.929 orang
  - ✓ Poktan : Kelompok BKB 380 ; Kelompok BKR 109 ; Kelompok BKL 151 ; Kelompok UPPKS 381 ; Kelompok PIK-R/M 65
- Evaluasi Pencapaian Peserta KB Aktif di Masa Pandemi Covid 19 Semester I Tahun 2020 Kabupaten Gunungkidul
  - ✓ Capaian PA terhadap PUS adalah sebesar 78,93%
  - ✓ Capaian MKJP terhadap PPM adalah sebesar 34,25%
  - ✓ Unmet Need adalah sebesar 9,31%
- Evaluasi Pencapaian Peserta KB Baru di Masa Pandemi Covid 19 Semester I Tahun 2020 Kabupaten Gunungkidul
  - ✓ Capaian PB terhadap PPM adalah sebesar 21,53%
  - ✓ Capaian PB MKJP terhadap PPM adalah sebesar 8,24%

- Permasalahan yang muncul:
  - ✓ Masih rendahnya capaian Peserta KB Baru Pasca Persalinan.
  - ✓ Masih rendahnya minat PUS untuk pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
  - ✓ Masih rendahnya capaian peserta KB Pria (MOP)
  - ✓ Pencapaian Peserta KB Baru sampai semester I tahun 2020 masih rendah, sangat dimungkinkan target tidak tercapai di akhir tahun
- Strategi yang telah diupayakan:
  - ✓ Membuat KIE Kreatif Inovatif yang melibatkan kader dalam bentuk video dan lainnya dengan materi mengajak untuk pemakaian kontrasepsi Modern, baik MKJP maupun Non MKJP,, Pasca Persalinan Pasca Keguguran , dan lain-lain yang disebarluaskan menggunakan media sosial (instagram, face book, youtube).
  - ✓ Inovasi yang dilakukan DP3AKBPM dan D Kabupaten Gunungkidul yang bertajuk 'KI EMAS ARGA BAJA' (Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada Masyarakat menuju Keluarga Bahagia Sejahtera), yang diwujudkan dalam bentuk blog.ipekbgunungkidul dan majalah Cahaya Keluarga.
  - ✓ Melibatkan kader dalam kegiatan pendampingan ibu hamil, dengan tujuan meningkatkan cakupan kesertaan KB Pasca Persalinan.
- Mendekatkan akses pelayanan untuk Kontrasepsi Mantap khususnya MOP (peran Perwakilan BKKBN sangat diharapkan).

**F. Materi Capaian Program Bangga Kencana di Kabupaten Sleman oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sleman – dr. Mafilindati Nuraini, M. Kes.**

- Cakupan DALLAP Juni 2020 : BKB yang lapor 177 kelompok; BKR yang lapor 125 kelompok; BKL yang lapor 157 kelompok; UPPKS yang lapor 595 kelompok; PIKR/M yang lapor 136 kelompok; PLKB/PKB yang lapor 44 orang; PPKBD yang lapor 86 orang; Sub PPKBD yang lapor 1.374 orang; kelompok KB yang lapor 5.576 kelompok
- Jumlah PB hingga Juni 2020 : 4.554
- Perkembangan Kesertaan KB Baru Di Masa Pandemi COVID-19 : Bulan Maret-Mei sempat menurun, bulan Juni sudah mulai meningkat kembali, pencapaian peserta KB baru terhadap PPM adalah 4.554 orang atau sebesar 20,16% PPM
- Peserta KB Baru berdasarkan Faskes s/d Juni 2020, tertinggi ditempati BPM 41,63%, diikuti faskes swasta, faskes pemerintah, DPM dan lainnya
- Jumlah PA hingga Juni 2020 : 110.695
- Perkembangan Kesertaan KB Aktif Di Masa Pandemi COVID-19 : Bulan Maret-Mei sempat menurun, bulan Juni sudah mulai meningkat kembali, pencapaian peserta KB aktif terhadap PPM adalah 110.695 orang atau sebesar 96,14% PPM

- CPR s/d Juni 2020 : 76,86
- Unmet Need s/d Juni 2020 : 8,87
- Jumlah anggota yang aktif dalam : BKB 5.245 orang atau 62,01%; BKR 3.161 orang atau 58,28%; BKL 3.414 orang atau 57,66%
- Jabaran kegiatan Juli-Desember 2020
- Rekomendasi kegiatan :
  - ✓ Meningkatkan upaya-upaya pencegahan perkawinan usia anak dengan kegiatan yang lebih gencar lagi untuk sasaran generasi muda baik itu melalui PIK R, Saka Kencana, SSK, dan terintegrasi dengan organisasi pemuda, anak dan remaja lainnya seperti Karang Taruna, FORANS.
  - ✓ Pelatihan CTU bagi provider terutama yang sudah kerjasama dengan BPJS.
  - ✓ Sosialisasi Peraturan penggunaan dan distribusi alokon untuk Non-JKN.
  - ✓ Peningkatan anggaran penggerakan pelayanan KB MKJP (Bhaksos).
  - ✓ Penghitungan parameter kependudukan tingkat kabupaten (seperti TFR dan ASFR).
  - ✓ Meningkatkan pertemuan/rakord/sosialisasi/bimtek program Bangga Kencana melalui virtual meeting yang menysasar sampai dengan poktan dan sekolah/madrasah.
  - ✓ Mengupayakan pelaksanaan BKB AKB dengan sasaran terbatas per kelompok umur (dalam bulan yang sama dengan hari yang berbeda).
  - ✓ Sosialisasi tentang Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Indeks Pembangunan Keluarga (IPK).
- Meningkatkan pemampuan Kampung KB melalui pembinaan virtual meeting dan advokasi anggaran kalurahan.

**G. Materi Capaian Program Bangga Kencana di Kota Yogyakarta oleh Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana – Drs. Tri Karyadi Riyanto Raharjo, SH, M.Si.**

- Jumlah Fasyankes Juni 2020: Faskes KB pemerintah 26; Faskes KB swasta 34; praktek dokter 2; praktek bidan mandiri 12; jejaring faskes KB 2
- Hasil pelayanan peserta KB baru Juni 2020: IUD 203; MOW 22; MOP 0; Kondom 20; Implant 22; Suntikan 64; Pil 11
- Jumlah petugas DALLAP yang lapor hingga Juni 2020 : PKB 18 org; PPKBD 45 org; Sub PPKBD 616 org; Kelompok KB 2.538 org
- Jumlah Poktan yang lapor hingga Juni 2020 : BKB 229 klpk, BKR 79 klpk, BKL 79 klpk; UPPKS 193 klpk; PIK R 57 klpk
- Jumlah PA hingga Juni 2020 adalah 23.529 orang atau 65,83% dari PUS
- Jumlah kesertaan KB Pria adalah sebesar 148 untuk MOP, 5.697 untuk Kondom atau total sebesar 24,84% dari PUS
- % capaian PA-MKJP terhadap PPM : 10.953 orang atau 31,60% dari PPM
- % capaian PA-Priaterhadap PPM : 5.845 orang atau 44,64% dari PPM

- % capaian PB-MKJP terhadap PPM : 731 orang atau 13,74% dari PPM
- % capaian PB-Priaterhadap PPM : 96 orang atau 58,07% dari PPM
- Unmet Need hingga Juni 2020 : 3.869 orang atau 10,82% dari jumlah PUS
- Rencana Strategi dan Inovasi untuk semester 2:

NO	INOVASI	STRATEGI	KEGIATAN	PELAKSANAAN	SASARAN	FREK	DANA
1	UPPKS Bangkit	Memanfaatkan perekrutan tenaga ahli pendamping UPPKS	1. Pendampingan UPPKS dengan Konsultan	September-Desember	213 Kelompok UPPKS	4 bulan	APBD
			2. Pendataan UPPKS sesuai stratifikasi	September-Desember	213 Kelompok UPPKS	4 bulan	APBD
			3. Membuat kulWAG	September-Desember	213 Kelompok UPPKS	4 bulan	Non Budgeter
			4. Memfasilitasi kelompok untuk akses pinjaman modal ke Koperasi AKU Sejahtera	September-Desember	25 Kelompok UPPKS	4 bulan	Koperasi AKU Sejahtera
			5. Memfasilitasi kelompok untuk mengakses dana CSR	September-Desember	5 Kelompok UPPKS di Kampung KB	4 bulan	Bank BPD
			6. Memfasilitasi kelompok masuk di E Nglarisi	September-Desember	20 Kelompok UPPKS	4 bulan	Non Budgeter
			7. Memfasilitasi kelompok UPPKS untuk mengakses program lintas OPD ( misal: pra Koperasi, Aplikasi Sibakul )	September-Desember	10 Kelompok UPPKS	4 bulan	Non Budgeter
2	Jemput Bola Pelayanan KB Ulang (Pil & Kondom)		1. Mengintensifkan penjangkaran peserta KB Baru melalui Poktan, khususnya BKB dan Kampung KB	September-Desember	234 kelompok	4 bulan	Non Budgeter dan BOKB
			2. Pelayanan KB khususnya jenis kondom baru untuk bisa dilayani lewat PKB	September-Desember	14 kecamatan	4 bulan	Non Budgeter

NO	INOVASI	STRATEGI	KEGIATAN	PELAKSANAAN	SASARAN	FREK	DANA
3	SPORA KU ( Sistem Pelaporan Online Rumah Data Kependudukan)		1. Kegiatan Melaporkan perkembangan Data dan Kegiatan di Rumah Data Kampung KB	Juli-Desember	Pengurus rumah data Kampung KB	6 bulan	
			2. Mengevaluasi Perkembangan Data Bangsa Kencana dan Data Lintas Sektor di Kampung KB	Juli-Desember	Pengurus rumah data Kampung KB	6 bulan	
			3. Bertambahnya peran serta Lintas Sektor dalam pengumpulan Data	Juli-Desember	Pengurus rumah data Kampung KB	6 bulan	
4	SI DOEL KENCANA		1. Kegiatan Entry Data dan Pengolahan Data	Juli-Desember	Data Bangsa Kencana	5 bulan	APBD dan BOKB
			2. Sosialisasi Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	Juli-Desember	Database Data Bangsa Kencana		
			3. Bimtek dan pertemuan rutin dalam Verifikasi data	Juli-Desember	Kader Masyarakat berbasis Data (IMP)	6 bulan	
5	BOLANG KKA KENCANA (Berkunjung Ke Rumah Orang dengan Kartu Kembang Anak dan Keluarga Berencana)		1. Kegiatan optimalisasi Posyandu dengan penyebaran KKA	Juli-Desember	1. Kader Posyandu	6 bulan	BOKB
			2. Pengumpulan hasil data dari PKB	Juli-Desember	2. BKB 3. Anak Balita	6 bulan 6 bulan	

- Inovasi :
  - ✓ Hotline 24 jam : dengan kegiatan menerima keluhan dan permasalahan dari akseptor dengan sasaran semua masyarakat dan PUS.
  - ✓ SAR MUPEN KENCANA : dengan kegiatan keliling MUPEN bersama tim; penyediaan media KIE leaflet dan paket sosialisasi. Sasaran : semua masyarakat akseptor dan PUS, Petugas PLKB dan MUPEN
  - ✓ GO SAHAJA
- Rekomendasi Bangsa Kencana :
  - ✓ Memperkuat kembali komitmen PKB, IMP, faskes untuk optimalkan program BangsaKencana
  - ✓ Pegawai OPD KB bias memanfaatkan inovasi- inovasi yang ada untuk menjadi pemantik keberhasilan program BangsaKencana di masa yang akan datang
  - ✓ Menumbuhkan semangat pegawai untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi
  - ✓ BKKBN hendaknya menyiapkan digital capabilities PKB dari tingkat dasar sampai pada analisis data
  - ✓ Pemda hendaknya membuat blue print pemerintahan ( mempersiapkan dan meningkatkan kompetensi SDM aparatur dalam pemerintah digital yang menciptakan “new way of working and thinking” ( cara baru bekerja dan berpikir)
  - ✓ Remindset ASN wawasan digital/transformasi digital ASN
  - ✓ Kerjasama antar OPD lebih ditingkatkan baik secara vertical maupun pemerintah daerah

#### **H. Paparan Penutup oleh Kepala Perwakilan BKKBN DIY (DR. Ukik Kusuma Kurniawan)**

- a. Gambaran hasil capaian program khususnya untuk penggerakkan kepesertaan KB baru , jika dibanding bulan yang sama tahun 2019, hampir separuh bedanya. Catatan lain, capaian program Pro PN secara keseluruhan juga masih perlu ditingkatkan. Tapi hal itu dapat dipahami karena kondisi pandemi COVID-19 berbeda dengan kondisi normal sebelum ada COVID-19
- b. Pada kondisi normal dan pada kondisi pandemi COVID-19 pola pendekatan menjadi berbeda karena adanya keterbatasan.
- c. Sisa waktu tiga bulan kedepan perlu dilakukan pola pendekatan, bagaimana kerjaan rutinitas di lapangan tetap berjalan dan tetap terhindar dari penularan COVID-19 tentunya dilakukan pendekatan dengan bijak.
- d. Memperkuat jaringan dilini terdepan dengan memberdayakan para PKB dan PLKB, kader dan menggandeng dokter, bidan mandiri, puskesmas serta, TP-PKK, agar lebih jitu dan tepat dalam menentukan target sasaran.

- e. Pertemuan review secara konstruktif telah menyumbangkan ide untuk mendapatkan solusi dari berbagai masalah program Bangga Kencana, baik itu menyangkut permasalahan koordinasi serta keselarasan program nasional maupun daerah, maupun kemitraan lintas-sektor, untuk mencapai tujuan dari Program Bangga Kencana yang berkelanjutan secara nasional maupun kewilayahan, bisa segera terwujud dan terlaksana dengan baik meski dengan adaptasi kebiasaan baru era pandemic covid-19

## PEMBAHASAN MATERI

### **Ibu Erlina Hidayati Sumardi, S.IP., MM – Kepala Dinas DP3AP2 DIY**

1. Adanya inovasi dan kreatifitas dari Pemkot Yogyakarta atas pencapaian sasaran dan dapat dikatakan berhasil, sehingga *best practice* ini dapat di detailkan kembali dan bisa di bagikan dan diikuti oleh kab/kota lainnya.
2. Adanya indikator BKKBN DIY yang belum tercapai, permasalahan utamanya ada di persoalan KIE, dikarenakan kondisi covid, sehingga sudah tidak mungkin dilakukan pertemuan dengan masyarakat secara langsung.
3. Capaian PB Pria di Kota Yogyakarta cukup berhasil, sehingga dapat dicontoh oleh kab/kota lainnya.
4. Setiap kegiatan dapat dikoordinasikan dan disinergikan antara kab/kota lainnya.
5. Payung program di DIY adalah kebudayaan, sehingga pelaksanaan program kegiatan di kab/kota dapat dilakukan dengan menggandeng nilai kebudayaan atau berkolaborasi dengan cara-cara kebudayaan.

### **Ibu Dra. Ita Suryani, M.Kes.- Koordinator Bidang ADPIN BKKBN DIY**

1. Variasi cara kab/kota untuk mencapai target sudah baik, apresiasi baik kab/kota sudah lebih tajam analisisnya karena mengangkat level kecamatan.
2. Peserta KB baru jauh dari yang diharapkan, tetapi ada trend kenaikan untuk MKJP di beberapa wilayah. Tenaga kita terbatas, butuh solusi untuk menaikkan capaian di tiap kab/kota.
3. *Unmet Need* perlu diterobos dengan segmentasi. Teman-teman lapangan perlu cara lebih *segmented* untuk mencari PB.
4. Untuk mempertajam, perlu data PUS hamil agar segmentasi sasaran menjadi lebih tajam dan mudah.
5. Ketika capaian turun, penjelasan penting.
6. Di era pandemi, edukasi lewat media sosial penting dan BOKB bisa berperan dimana perlu untuk dicermati lagi.
7. Strategi perlunya evaluasi pada titik tertentu, perlu perbaikan cara untuk pencapaian target dengan sisa waktu yang ada. Perlu cara tertentu dan diluar kebiasaan untuk mencapai target.

### **Dra. Joehananti Chriswandari – Koordinator Bidang KB-KR BKKBN DIY**

1. Kita harus mengakui capaian KB kita rendah, tetapi jika kita bicara prevalensi kita mencapai sekitar 74%.



2. Khusus Kota Yogyakarta memang spesial, karena kesertaan KB tradisional tinggi, KB modern rendah.
3. Ada kemungkinan inovasi bisa diadaptasi untuk mengejar ketertinggalan di semester terakhir.
4. Masyarakat DIY masih berharap layanan KB gratis dengan penggerakan, karena terbukti capaiannya menjadi luar biasa saat program “Sejuta Akseptor”.
5. KB Pasca salin bisa diaktifkan kembali untuk mendorong pencapaian PB.
6. Regulasi terkait panduan pelayanan KB bisa diupdate kembali, dicari yang mendukung pencapaian PB.
7. Pencapaian KB Pria bisa digenjot untuk meningkatkan capaian.
8. BKKBN masih mengusahakan sertifikasi kompetensi untuk provider untuk optimalisasi pelayanan KB.
9. Konseling dan edukasi lewat media sosial menjadi hal yang perlu ditingkatkan di masa pandemi.

### III. SESI TANYA JAWAB

#### A. PERTANYAAN

**Pertanyaan ke-1**, dari Bapak Rubiyono (DP3AP2)

Permasalahan ada dua :

1. Tingkat Unmet need cukup besar
2. PB Baru belum optimal

Apakah karena target yang terlalu tinggi, sedangkan dalam kegiatan momentum dapat tercapai, apakah SDM yang kurang baik?

**Pertanyaan ke-2**, dari Bapak Witono (BKKBN DIY)

- Selamat atas capaian dalam kegiatan sejuta akseptor.
- Yang disampaikan Sekda, bahwa anaknya lebih dari dua, dikarenakan belum adanya ajakan ikut KB, jika ada yang tidak ber KB maka yang disalahkan adalah petugas KB, maka dari itu tugas kita belum selesai, mari kita mengajak masyarakat untuk ber KB.
- Dalam masa pandemi ini, jangan mempersulit hanya karena tidak bisa KB, apapun kebutuhan masyarakat dengan KB, maka Negara harus bisa menjawab.
- Kaitannya dengan TFR, memahami TFR diterjemahkan dengan tidak persis TFR, tetapi mengukur keberhasilan KB dengan rata-rata jumlah anak dalam keluarga.

#### B. JAWABAN

##### 1. Jawaban Narsum Bapak Sudarmanto (Kulon Progo)

- MKJP dan MOW banyak yang berminat, tetapi mekanisme BPJS belum siap
- Terimakasih atas masukannya, memang betul target capaian masih jauh dari harapan karena pandemi

##### 2. Jawaban Narsum Ibu Sri (Bantul)

- OPD KB Bantul, KIE kebudayaan sudah dilaksanakan (baik KIE tradisional maupun modern dengan dana keistimewaan). Nomenklatur di anggaran tidak bisa diusulkan di OPD KB jadi tidak bisa dimasukkan sebagai indikator capaian.

- Kami sudah berusaha di semua tingkatan, tetapi karena kondisi pandemi maka pencapaian PB menjadi sulit.
  - Baksos sudah disiapkan, butuh dukungan BKKBN.
- 3. Jawaban Narsum Bapak Sujoko (Gunungkidul)**
- Kondisi tidak normal, mempersulit pencapaian program
  - Review diharapkan jadi ajang silaturahmi sehingga bisa mengadopsi cara dari kabupaten lain.
- 4. Jawaban Narsum Ibu dr. Mafilindati Nuraini, M. Kes. (Sleman)**
- Kesertaan KB Baru karena terkendala pandemi, sempat tidak menyangka pencapaian terhambat. Kami akan berusaha lagi bulan bulan ke depan untuk mengejar ketertinggalan
- 5. Jawaban Narsum Bapak Tri Karyadi (Kota Yogyakarta)**
- Pelayanan 1 juta akseptor, kurang signifikan untuk mengejar ketertinggalan di Kota Yogyakarta Tidak semua PB menjadi PA
  - Pelayanan 1 juta akseptor tidak semata-mata melayani PB
  - Kegiatan peningkatan kesertaan KB tidak bisa sama caranya antara satu kecamatan dengan yang lain, karena karakteristik tiap wilayah berbeda
  - Kantor KB memiliki program dalam peningkatan kualitas lansia untuk mendukung TFR

Tim Notulis,

Virna Septira Anggraeni, SH  
Anggraeni Wulandari, S.Sos, MA





## NOTULEN KEGIATAN

Nama Kegiatan : RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM  
Hari / Tanggal : Senin/ 26 Oktober 2020  
Tempat : Aula Dinas P3AKBPMD Kabupaten Gunungkidul (Kegiatan dilakukan secara blended, tatap muka dan virtual)  
Jam : 09.00 s.d. 13.00 WIB  
Peserta :

1. OPD KB Kabupaten Kota se-DIY
2. Ketua IPeKB DIY dan Kabupaten
3. Pejabat Fungsional Tertentu di lingkungan Perwakilan BKKBN DIY
4. Pengelola Keuangan Perwakilan BKKBN DIY

Hasil Kegiatan / Pertemuan :

1. Sambutan Kepala Dinas P3AKBPMD Gunungkidul
2. Sambutan Kepala Perwakilan BKKBN DIY
  - Tujuan kegiatan : mengevaluasi hasil capaian program, realisasi anggaran dan ketersediaan alkon di DIY.
  - Kegiatan radargram dilaksanakan safari ke Kabupaten/Kota. Untuk bulan ini dilaksanakan di gunungkidul sekaligus perpisahan Bapak Kepala Dinas P3AKBPMD Gunungkidul.
  - Waktu pelaksanaan anggaran yang tinggal 1,5 bulan agar dapat dimanfaatkan untuk pencapaian program BKKBN.
3. Penyerahan ATTG dari Kepala Dinas P3AKBPMD Gunungkidul disaksikan oleh Kepala Perwakilan BKKBN DIY
4. Penyerahan Kenang-kenangan kepada Kepala Dinas P3AKBPMD Gunungkidul yang memasuki purna tugas per 01 November 2020
5. Paparan Materi
  - a. Paparan Kabid ADPIN

Capaian program sampai September 2020 (cakupan pelaporan 100 % kecuali faskes swasta 99,47 % dan PMB 99,76%)

    - Capaian Peserta KB baru dibandingkan dengan KKP 30,73% (kurang), semua kabupaten dalam kategori kurang. Adapun distribusi per mix kontrasepsinya adalah sebagai berikut:
      - IUD 100,17% (sangat baik), semua kabupaten pada kategori sangat baik
      - MOW 184,10 % (sangat baik), semua kabupaten pada kategori sangat baik
      - MOP 73,75% (baik), dengan rincian Sleman dan Bantul pada kategori sangat baik, sedangkan Kulonprogo, Gunungkidul dan kota Yogyakarta pada kategori kurang
      - Implan 64, 53 % (cukup), dengan rincian Gunungkidul dan Bantul pada kategori baik, Kota YK dan Kulonprogo kategori cukup sedangkan Sleman pada kategori kurang.
      - Suntik 31,25% (kurang), semua kabupaten pada kategori kurang
      - Pil 9,96 % (kurang), semua Kabupaten pada kategori kurang
      - Kondom 9,88% (kurang), semua Kabupaten pada kategori kurang

- Capaian peserta KB Baru Pria sampai dengan September 2020 2.439 dari target KKP 24.178 (10,09%).
- Capaian peserta KB baru terbanyak diperoleh dari faskes pemerintah.
- Tidak tercatat komplikasi selama bulan September 2020
- Kasus kegagalan selama bulan September 2020 tercatat di Kabupaten Gunungkidul (1 kasus IUD), Kabupaten Kulonprogo (2 kasus IUD), Kabupaten Bantul (1 IUD).
- Dibanding tahun lalu bulan agustus terdapat lonjakan karena ada penggerakan hari Kontrasepsi.
- Capaian Peserta KB Aktif dibandingkan dengan KKP 86,17% (cukup) dengan rincian Sleman dan Kulonprogo pada kategori baik, Bantul dan Gunungkidul pada kategori cukup dan Kota Yogyakarta pada kategori kurang. Adapun distribusi per mix kontrasepsinya adalah sebagai berikut:
  - IUD 116,32% (sangat baik), semua kabupaten pada kategori sangat baik
  - MOW 68,95 % (kurang), dengan rincian Kulonprogo, bantul dan Gunungkidul pada kategori sangat baik , kota Yogyakarta pada kategori Baik, sleman pada kategori kurang. Jika dilihat dari data dapat disimpulkan bahwa kabupaten sleman menyumbang pengaruh besar terhadap MOW. Tren untuk sleman bergeser ke suntik.
  - MOP 169,78% (sangat baik), semua kabupaten pada kategori sangat baik kecuali sleman pada kategori baik.
  - Implan 79,72 % (cukup), dengan rincian Kota Yk pada kategori sangat baik, Gunungkidul pada kategori cukup, sedangkan Bantul, Sleman dan Kulonprogo pada kategori kurang.
  - Suntik 98,60% (baik), dengan rincian Sleman pada kategori sangat baik, Gunungkidul pada kategori cukup, sedangkan Bantul, Kota YK dan Kulonprogo pada kategori baik.
  - Pil 70,74 % (kurang), dengan rincian Sleman dan Gunungkidul pada kategori cukup, sedangkan Bantul, Kota YK dan Kulonprogo pada kategori kurang
  - Kondom 49,19% (kurang), semua Kabupaten pada kategori kurang
- Unmeet need DIY 10,21
- Anggota yang aktif dalam kegiatan BKB 55,02% (cukup), Gunungkidul pada kategori baik, Kulonprogo, Bantul, Sleman pada kategori cukup, sedangkan Kota Yogyakarta pada kategori kurang.
- Anggota yang aktif dalam kegiatan BKR 50,92% (cukup), Gunungkidul dan Sleman pada Kategori Baik, Kulonprogo dan Kota YK pada kategori cukup, sedangkan Bantul pada kategori kurang
- Anggota yang aktif dalam kegiatan BKL 52,27% (cukup), semua kabupaten pada kategori cukup

b. Paparan Sekretaris

- Postur anggaran belanja pegawai lebih besar (80,49%) diantara belanja lainnya.
- Realisasi anggaran sd 23 Oktober 2020 sebesar 70,33 %
- Komponen agar dapat mengoptimalkan sisa anggaran yang ada dan mempertimbangkan waktu yang tersisa.
- Ratio ketersediaan alkon berdasarkan data sd 30 September 2020 adalah sebagai berikut:

- IUD 9 bulan
- Pil 5 bulan, proses pengadaan sedang berlangsung.
- Kondom 9,5 bulan
- Suntik 2,3 bulan, ED rata-rata tahun 2021 sehingga perlu dipikirkan solusi agar tidak banyak yang ED.
- Susuk 0,6 bulan, proses pengadaan sedang berlangsung
- Terdapat pengadaan alkon jenis baru yaitu suntik KB 3 bulanan 1 ml dan Minipil
- Mulai Oktober 2020 distribusi alkon mengimplementasikan SIRIKA.

## 6. Diskusi

### **Sihono Yulianto**

1. Baksos merupakan upaya untuk menurunkan Unmeet need
2. Menu Pramusaji di DAK TA. 2021 bagaimana kelanjutannya.

### **Kota**

1. Unmeet need strategi. Dalam penanganan unmeet need ada Jk pendek dan menengah. Perlu ada kesepakatan di kab/kota. Harus ada action untuk mengejar selama 2 bulan, jangka menengah harus dbuat RR.
2. Inkonsisten rebranding. Ketika menyampaikan bangga kencana tetapi background masih KKBPK. Ingin pegangan yang baku.
3. Merapatkan barisan dengan PKB untuk menyisir PUS alot. Menentukan prioritas.
4. Unmeet need kota adalah anomali. Pendekatan tidak hanya target pencapaian peserta KB, PA dan unmeet need tapi perlu dikaji dari sisi dalduk. Cth di kraton yang hamil dan ingin anak segera kecil sekali. Jangan2 di dominasi oleh PUS alot. Tahun ini mendata R1 PUS DPPKB by name by addres, jumlah anak, berapa anak usia terkecil.

### **Gunungkidul**

1. Unmeet need tanpa RR yang valid akan sulit.
2. Pengajuan alkon berdasarkan min max
3. Kampung KB mulai tahun 2020 KP KB sudah menjadi Tk. Desa, terkait yang sudah bagaimana utk cakupan data mencakup seluruh desa dengan dusun awal sebagai secretariat.
4. PPKS mau dihidupkan kembali, senang tetapi perlu persiapan.

### **Kaper DIY**

1. Pramusaji menurut DAK 2021 menurut kepala jatuhnya transport bukan honor.
2. Kondomisasi merupakan langkah terakhir yang dilakukan untuk menurunkan unmeet need. Membuat baseline unmeet need, dilakukan penyuluhan. Definisi unmeet need dan penataan RR.

**Dra. Ita Suryani, M.Kes**

1. Inkonsistensi. RKAKL di susun 2019 dan rebranding february 2020 sehingga yang dipilih disesuaikan dengan RKAKL. Karena itu yang akan diaudit.
2. Kondomisasi utk unmeetneed, pastikan jika PB bisa terecord dalam sistem RR

**Dra. Joehananti Chriswandari**

1. Unmeet need sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya.

**Witriastuti Susani Anggraeni, SE, MM**

1. Akan ada peraturan badan terkait kampung KB, akan dibuatkan peta jalan. Juknis masih berproses di pusat.

**Rohdhiana Sumariati, S.Sos., M.Sc**

1. Berdasarkan Studi unmeet need dipengaruhi Tingkat pendidikan, ketakutan ESO dan keyakinan. PUS alot pengetahuan tinggi sudah tau ESO atau rumor tentang kontrasepsi sehingga tidak mau menggunakan kontrasepsi.

**Novitrisia Widowati, SH., M.Sc**

1. Support anggaramn APBD untuk menghidupkan PPKS tahun 2021 tetap diperlukan.

**dr. Iin Nadzifah**

1. Sejak tahun 2018 dan 2019 PPKS diharapkan bisa dihidupkan kembali di provinsi dan kecamatan. Tahun 2019 ada 3 yang dihidupkan di Balai Penyuluhan. PPKS merupakan layanan public kita untuk melakukan 8 layanan. Harus dipersiapkan. PPKS kencana kita coba ramaikan dengan sekber (secretariat bersama), sebagai strategi untuk menghidupkan PPKS di provinsi. Diharapkan sumber SDM berkualitas sehingga KIE dapat terlaksana. Mampu memberdayakan yang ada di BKKBN DIY. Di wilayah juga diharapkan mampu memberdayakan potensi yang ada. Sementara ada 3 target PPKS yaitu di Pengasih, Kota Yogyakarta dan Gunungkidul akan cooba di inisiasi. Informasi lbh lanjut ada hotline di BKKBN DIY ( BP. Agung).

**Sleman**

1. MOW di sleman merah, masih menagih fasilitasi MOW di sleman
2. Unmeet need memakai data SIGA. Banyak yang anak 1 masih ingin anak, tidak memakai kontrasepsi.
3. PIK R mengalami aduan. Senior dengan junior di medsos, ketemu sampai melakukan perbuatan tidak senonoh sesama jenis. Semua merasa menjadi korban. Bagaimana cara memprotect selanjutnya.
4. Pernikahan pada usia anak selama masa pandemi jumlahnya melebihi kasus 2019. Mohon upaya lebih utk mencegah pernikahan pada usia anak.

## Kulonprogo

1. Masih banyak di kulonprogo yang merah. Terkait unmeet need dari bidang KB bersama PKB akan berusaha meskipun unmeet need sudah  $< 9$
2. Angka MOP masih rendah, kerjasama dg RS hanya MOW
3. Angka pernikahan usia anak dan perceraian tinggi

## Dra. Joehananti Chriswandari

Terkait baksos. Sekarang kita berada pada rangkaian hari vasektomi sedunia. Ada target tertentu mulai 26-30 nov. target MOP dan MOW (hari kontak). Untuk DIY target Mop 8 dan MOW 156. Selalu menyertakan kontrasepsi MKJP, ada di 5 titik di kab/kota termasuk IUD, Implant. Penganggaran sedang revisi.

